

**PERANAN PENDIDIKAN
DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL
DAERAH SUMATERA UTARA**



Direktorat
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

~~Pet 2020~~ med
306.815 PER P

MILIK DEPDIKBUD

Tidak Di Perdagangan

**PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
DAERAH SUMATERA UTARA**

Tim Peneliti/ Penulis :

1. Dra. Farida Hanum Ritonga (Ketua)
2. Drs. J. Fachruddin Daulay (Sekretaris)
3. Drs. Nazief Chatib (Anggota)
4. Drs. Samsul Tarigan (Anggota)
5. Drs. Irwansyah (Anggota)

Editor :

Drs. Syahrial De Saputra T.

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya (P3NB)
1993 / 1994**

P R A K A T A

Pendidikan nasional ialah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sementara pasal 33 UUD 1945 berbunyi "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Hal ini berarti bahwa pemerintah secara langsung harus mampu mengembangkan berbagai potensi yang ada yang berkaitan dengan kerangka kebudayaan Indonesia sendiri yang dapat memperkaya kebudayaan nasional Indonesia.

Pendidikan adalah proses belajar baik formal maupun nonformal. Pendidikan nasional ditransformasikan melalui pendidikan informal yaitu melalui pranata sosial keluarga, pendidikan formal yaitu melalui pranata sosial sekolah, pranata sosial agama dan pranata sosial politik.

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang peranan pranata-pranata tersebut dalam pendidikan, maka Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 1992/1993 mengadakan penelitian berjudul "Peranan Pendidikan dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional Daerah Propinsi Sumatera Utara".

Dengan selesainya penelitian ini, tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu memberikan informasi dengan meluangkan waktu yang sangat berharga.

Pada kesempatan ini tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- Direktorat Sosial Politik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- Bappeda Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- Camat Kepala Wilayah Medan Baru Drs. Hasan Diapari;
- Rektor USU Prof. M. Jusuf Hanafiah;
- Kepala Sekolah SMA Kemala Bhayangkari I Medan Drs. Muhammad Kamil Z.
- Kepala Sekolah SPM Kemala Bhayangkari I Medan Drs. Rusli Arus;

- Kepala SD Negeri Percobaan Jalan Sei. Petani Medan Ana Solmidas Jelpa, BA

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini yang tak dapat secara satu persatu disebutkan namanya, tim peneliti mengucapkan terima kasih.

Medan, 30 Maret 1993

Ketua Tim

Dra. Farida Hanum Ritonga

KATA PENGANTAR

Tujuan Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Utara untuk menggali nilai-nilai luhur budaya daerah dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi terwujudnya Ketahanan Nasional di bidang sosial budaya. Dalam perwujudan itu maka Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Utara dalam tahun anggaran 1993/1994 berkesempatan untuk memperbanyak/mencetak naskah hasil perekaman/penelitian yaitu:

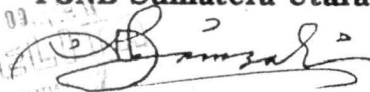
"PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL DAERAH SUMATERA UTARA".

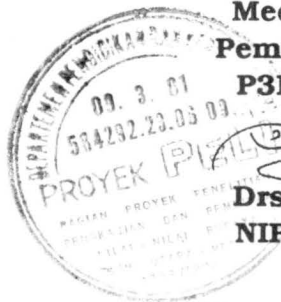
Naskah ini diperbanyak/dicetak berdasarkan hasil penelitian oleh suatu Tim dengan penuh kesungguhan. Namun demikian disadari bahwa hasil penelitian yang digandakan ini masih terasa belum mencapai kesempurnaan. Kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan, sebagai acuan bagi penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.

Terwujudnya upaya ini adalah berkat adanya kepercayaan dari Bapak Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan dan dorongan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak.

Akhirnya semoga upaya penerbitan naskah ini bermanfaat bagi pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa guna menunjang pembangunan manusia seutuhnya.

Medan, Oktober 1993
Pemimpin Bagian Proyek
P3NB Sumatera Utara,


Drs. ABDUL RACHMAN
NIP. 130522137



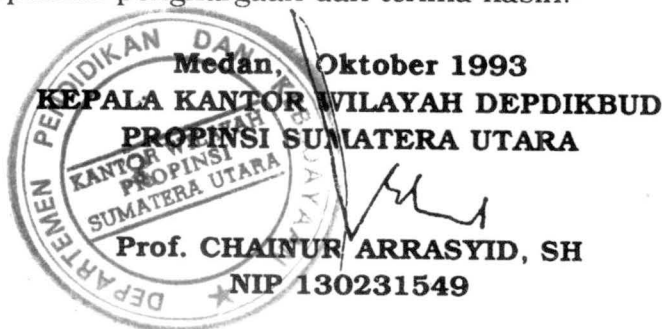
**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Saya merasa gembira atas keberhasilan bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Sumatera Utara Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 1993/1994 menerbitkan beberapa buku lagi sebagai hasil penyusunan Naskah dari beberapa aspek kebudayaan Daerah Sumatera Utara, termasuk penerbitan buku ini.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Pendidikan Nasional ialah pendidikan yang berdasarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melestarikan warisan nilai-nilai budaya luhur bangsa kita, maka perlu adanya usaha pemeliharaan kebudayaan dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa jangan sampai terbawa arus kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Buku yang berjudul: "**PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL DAERAH SUMATERA UTARA**", buku ini memperkaya kepustakaan budaya bangsa Indonesia khususnya sebagai dokumentasi; buku ini juga bermanfaat untuk dijadikan bahan guna menggali nilai-nilai luhur bangsa untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu usaha penerbitan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.



DAFTAR ISI

PRAKATA	I
KATA PENGANTAR	III
KATA SAMBUTAN	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan	7
1.4 Ruang Lingkup	8
1.4.1 Ruang Lingkup Materi	8
1.4.2 Ruang Lingkup Operasional	8
1.5 Metodologi Penelitian	8
1.6 Organisasi Tulisan	9
1.6.1 Tahap Persiapan	10
1.6.2 Tahap Pengumpulan Data	11
1.6.3 Tahap Pengolahan Data	12
1.6.4 Tahap Penulisan Laporan	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAREAH PENELITIAN	14
2.1 Letak Administratif	14
2.2 Keadaan Alam	15
2.3 Penduduk	16
2.4 Pendidikan	17
2.5 Ekonomi	18
2.6 Agama	18

2.7 Politik	19
BAB III PRANATA SOSIAL KELUARGA	20
3.1 Bahasa	20
3.2 Cara Berpakaian	26
3.3 Tingkah Laku	32
3.4 Interaksi Sosial	36
3.5 Konflik	39
3.6 Benda-benda Kerajinan	41
BAB IV PRANATA SOSIAL SEKOLAH	44
4.1 Sekolah Dasar (SD)	44
4.2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	52
4.3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	55
4.4 Perguruan Tinggi	68
BAB V PRANATA SOSIAL EKONOMI	77
BAB VI PRANATA SOSIAL AGAMA	90
6.1 Panti Asuhan	90
6.2 Dakwah	95
6.3 Pendidikan dan Pengajaran	97
BAB VII PRANATA SOSIAL POLITIK	103
BAB VIII PENUTUP	109
8.1 Kesimpulan	109
8.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
DAFTAR INFORMAN	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu proses yang panjang dan mencakup keseluruhan yang dipelajari baik secara formal maupun non formal, yang menghasilkan kebudayaan bagi individu, membentuk kepribadiannya dan sosialisasi dirinya, yang keseluruhannya melengkapi dirinya untuk hidup sebagai warga masyarakat. (Beals and Hoijer, 1959).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan kebudayaan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab,

budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemajuan bangsa Indonesia.

Sementara dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 dinyatakan antara lain bahwa dalam sektor kebudayaan terus menciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya rasa tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, disiplin nasional serta sikap budaya yang mampu menjawab tantangan pembangunan dengan pengembangan pranata-pranata sosial yang dapat mendukung proses pematapan budaya bangsa.

Pendidikan nasional ditransformasikan melalui pendidikan informal (pranata sosial keluarga), pendidikan formal (pranata sosial sekolah), dan pranata sosial politik.

Pranata sosial (social institution) diartikan sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku mengatur kedudukan dan peranan seseorang dalam struktur sosial tertentu. Pranata sosial keluarga, sebagai satuan unit sosial terkecil, banyak berperan dalam menanamkan struktur kepribadian dasar (basic personality structure), terutama pada usia 0-5 tahun, dan mempunyai arti penting dalam pembentukan kepribadian di kemudian hari (freud). Di dalam keluarga, seseorang akan mempelajari sistem pengetahuan mengenai simbol-simbol (process of inculturation) yang berlaku di dalam lingkungan keluarga serta kedudukan dan peranan yang diharapkan oleh masyarakatnya (process of socialization). Setiap kedudukan dan peranan memberikan hak mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga dalam lingkungan sosial tertentu. Jika norma-norma atau aturan-aturan tersebut tidak dipatuhi, biasanya anak dikenakan sanksi sosial (social sanction) yang berupa hukuman (punishment/penalty), atau sebaliknya akan menerima pujian atau penghargaan (reward) dari orang tuanya apabila ia mematuhi norma-norma yang berlaku di lingkungan keluarganya. Pemberian sanksi sosial tersebut bertujuan untuk memelihara keteraturan sosial di lingkungan keluarga.

Proses belajar berlanjut setelah ia memasuki usia sekolah. Di lingkungan sekolah, seseorang mempelajari norma-norma yang berbeda dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan keluarga. Anak-anak belajar memainkan kedudukan dan peranan yang diharapkan oleh lingkungan sekolahnya. Selain itu, anak-anak juga dikenakan sanksi hukuman (ganjaran) apabila melanggar norma, dan diberikan imbalan bagi yang mematuhi norma yang berlaku di sekolah.

Proses belajar selanjutnya ialah di dalam masyarakat. Norma-norma yang mengatur kedudukan dan peranan seseorang sangat beraneka ragam atau majemuk. Semakin banyak pengetahuan mengenai simbol-simbol yang dimengerti (to know) dan dipahami (to understand), maka semakin banyak pilihan yang dapat digunakannya untuk menghadapi atau menginterpretasi lingkungan sosial yang berbeda-beda. Dengan demikian, pranata sosial sangat efisien dan efektif dalam mengatur kedudukan dan peran seseorang dalam struktur sosial tertentu.

Dalam pranata sosial terdapat unsur utama yang berperan yaitu: pelaku, status sosial dan peranan, tujuan, dan norma-norma sosial. Dalam pranata sosial keluarga, pelaku terdiri dari: ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang mempunyai status dan peranan yang berbeda serta memiliki norma-norma sosial yang berfungsi mengatur kedudukan dan peranan seluruh anggota keluarga untuk tujuan tertentu.

Dalam pranata sosial sekolah, pelaku ialah: kepala sekolah, staf administrasi, guru, murid, dan pelaku sosial lainnya yang mempunyai status sosial dan peranan yang berbeda, serta norma-norma sosial yang disepakati bersama dalam mengatur kedudukan dan peranan di lingkungan sekolah untuk tujuan-tujuan tertentu. Pada lingkungan pendidikan tinggi, pelaku sosial ialah: rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua jurusan, staf administrasi, dosen, mahasiswa, dan pelaku sosial lainnya yang mempunyai status dan peranan yang berbeda serta norma-norma sosial yang disepakati bersama dalam mengatur kedudukan dan peranan di lingkungan pendidikan tinggi.

Pada lingkungan masyarakat, pelaku sosial terikat dengan pranata-

pranata sosial yang berlaku dalam struktur sosial tertentu, seperti pranata sosial: ekonomi, agama, dan politik. Masing-masing pranata sosial mengatur kedudukan dan peranan pelaku sosial yang terlibat di dalamnya, serta memiliki norma-norma yang berlaku dalam mengatur kedudukan dan peranan sosial untuk tujuan ekonomi, agama, atau politik.

1.2 Permasalahan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (plural society) terdiri atas berbagai macam golongan suku bangsa (tidak kurang dari 400 suku bangsa) yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Suku bangsa tersebut terbagi atas berbagai golongan agama dan kepercayaan (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Penganut Kepercayaan), golongan ekonomi (atas, menengah, dan bawah), golongan pendidikan (berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan), dan golongan politik (Golongan Karya, PDI, PPP) yang masing-masing memiliki latar belakang sejarah dan kebudayaan berbeda. Dengan adanya perbedaan sejarah dan kebudayaan dari masing-masing golongan, proses mentransformasikan kebudayaan nasional adalah melalui jalur pranata: keluarga, sekolah, ekonomi, agama, dan politik: hal ini tidak semudah seperti yang diharapkan (das sollen).

Seorang pakar antropologi yang bernama Ruth Benedict mengatakan:

"We teach our children one set of values and then expect them to live by another, it is not surprising, therefore, that education in our society frequently fails to accomplish its ends, or that children emerge into adult life unequipped either technically or emotionally to carry out successfully their adult roles (Beals and Hoijer, 1959)."

Dalam kenyataannya, persaingan merebut sumber daya yang tersedia seringkali lebih mengaktifkan kelompok-kelompok kecil (subgroups) yang

terikat dengan golongannya (groups) dari pada mengutamakan kepentingan bangsa (primordialism). Kondisi tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang pada akhirnya akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam situasi sosial yang tidak menentu (anomie), norma-norma kehidupan bermasyarakat lebih banyak ditentukan oleh faktor kekuasaan. Sekelompok orang yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak, cenderung akan mempertahankan *status quo* yang dimiliki dan dikuasainya karena ia memperoleh keuntungan dari situasi sosial yang sengaja diciptakannya. Bagi mereka yang tidak memperoleh keuntungan merasa diperlakukan tidak adil dengan situasi sosial yang tidak menguntungkan tersebut, namun tidak mempunyai pilihan lain karena mereka dihadapkan pada sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam kehidupan keluarga, terutama di kota-kota besar, seringkali para orang tua sibuk bekerja keras dan kurang memiliki waktu terhadap anak-anak mereka, sehingga tanpa disadari hubungan sosial antar anggota keluarga menjadi renggang dan kurang harmonis. Jika situasi ini terus berlangsung, maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak yang tidak berdaya menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadiannya.

Seorang murid, akan mempelajari berbagai mata pelajaran yang tersusun dalam kurikulum sekolah. Murid dituntut untuk mengikuti semua pelajaran yang telah diprogram oleh sekolah tanpa mempunyai kemampuan untuk menolak atau memilih mata pelajaran yang tersusun dalam kurikulum sekolah. Murid dituntut untuk mengikuti semua pelajaran yang telah diprogram oleh sekolah tanpa mempunyai kemampuan untuk menolak atau memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Selain itu, seorang guru dituntut kemampuannya untuk mengejar-paket mata pelajaran yang seringkali berubah. Meskipun demikian, proses belajar mengajar di sekolah terus berlangsung.

Situasi sosial yang agak leluasa, diberikan pada lingkungan pendidik-

an tinggi, terutama yang telah menggunakan sistem kredit semester. Dengan menggunakan sistem kredit semester tersebut, setiap mahasiswa dapat mengukur tingkat kemampuan intelektual atau kemampuan ekonomi (terutama di perguruan tinggi swasta), dalam memilih mata kuliah yang menjadi minatnya.

Di lingkungan pendidikan tinggi, mahasiswa dituntut kemampuannya untuk berpikir obyektif/realitas/kritis, sistematis, metodis, dan universal; sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di kemudian hari. Namun sampai sejauh ini, peranan pendidikan terutama bidang pengajaran dan pengabdian masyarakat masih selalu dipertanyakan. Bahkan, seorang pakar pendidikan yang bernama Munandar menyimpulkan dalam disertasinya, bahwa sistem pendidikan sekolah tidak merangsang kreativitas peserta didik.

Pada masyarakat umumnya, sikap kritis, logis, obyektif, dan metodis, kadangkala diartikan sebagai sikap yang tidak terpuji dan bahkan dianggap membahayakan stabilitas, terutama jika sikap tersebut diperlihatkan dalam membantu masyarakat yang terkena program pembangunan di wilayahnya.

Seorang pakar pendidikan dari IKIP Malang pernah mengatakan bahwa sistem pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah, lebih banyak mengutamakan penguasaan kognitif dari pada penguasaan afektif. Selain itu, sistem pendidikan yang berlaku tidak melihat orientasi pasar, sehingga banyak peserta didik yang telah menyelesaikan masa studinya mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Sekarang ini di masyarakat banyak sekali ditawarkan kursus-kursus pendidikan ketrampilan, yang kelihatannya mengisi kekurangan sistem pendidikan formal seperti kursus: bahasa asing, mengetik, sekretaris, komputer, elektronika, mekanika, kecantikan, mode, kepribadian, dan kursus menjahit pakaian. Kursus-kursus tersebut orientasinya lebih mengutamakan sistem pendidikan siap pakai (know how).

Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Namun, jika hukum dijadikan

alat oleh penguasa untuk mempertahankan eksistensinya, maka yang terjadi adalah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, misalnya penerimaan peserta didik di sekolah negeri maupun swasta tidak berdasarkan bakat dan kemampuan intelektualnya, melainkan masih ada yang menggunakan surat khusus dan uang pendidikan atau uang gedung. Penerimaan pegawai di lingkungan instansi pemerintah masih ada yang menggunakan prinsip hubungan kekeluargaan. Dalam berbagai forum resmi di tingkat nasional masih ada yang menggunakan acuan simbol-simbol kebudayaan suku bangsa atau acuan simbol-simbol agama sebagai kata pembuka dan penutup pembicaraan. Dalam upacara nasional atau hari besar nasional masih mempergunakan doa yang dipimpin oleh satu wakil dari golongan agama tertentu. Dalam mengatur kedudukan dan peranan seseorang, masih ada yang menggunakan latar belakang lembaga pendidikan tertentu, agama tertentu, atau suku bangsa tertentu. Permasalahan tersebut timbul karena masih adanya kepentingan kelompok-kelompok kecil yang terikat dengan golongannya (primordialisisme), yakni sikap lebih mengunggulkan kebudayaan sendiri (ethnocentrisme) atau sikap lebih mengunggulkan disiplin ilmu yang dikuasainya dari pada disiplin ilmu yang lain (pedantic). Padahal, "pembinaan kebudayaan nasional bertujuan untuk kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat lebih mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemajuan bangsa."

Fakta-fakta di atas banyak ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, justru yang menjadi pertanyaan sekarang ialah apa dan bagaimana sesungguhnya peranan pendidikan dalam pembinaan kebudayaan nasional?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor peng-

hambat dan faktor pendukung pengejawantahan kebudayaan nasional yang ditransformasikan melalui pranata: keluarga, sekolah, ekonomi, agama, dan politik.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Penelitian “Peranan Pendidikan dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional” ini, adalah merupakan penelitian kebijakan (policy research) di bidang kebudayaan. Adapun materi yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai upaya pembinaan kebudayaan nasional adalah melalui peranan pendidikan dalam pranata: keluarga, sekolah, ekonomi, dan politik.

1.4.2 Ruang Lingkup Operasional

Lokasi sampel penelitian ini adalah Kecamatan Medan Baru, yaitu salah satu dari 21 kecamatan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, Propinsi Sumatera Utara. Kriteria pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan kepada wilayah kecamatan yang berada di ibukota propinsi. Dari hasil pengamatan di wilayah Kecamatan Medan Baru tersebut bisa didapatkan responden yang dapat mewakili populasi sesuai dengan unsur-unsur dari pranata yang akan diteliti.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research).

Penelitian kepustakaan berguna untuk kepentingan penelusuran informasi yang bersifat latar belakang historis. Dalam pengumpulan data penelitian lapangan, dilakukan melalui wawancara mendalam (depth interview), selain itu juga mempergunakan kuesioner yang bersifat terbu-

ka (open questions) terhadap para responden yang sekaligus sebagai informan penentu (key informan). Melalui metode pengumpulan data ini diharapkan akan memperoleh data yang lengkap.

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang menguraikan secara menyeluruh mengenai variabel-variabel yang diteliti (descriptive research). Artinya bahwa laporan penelitian berupa deskripsi mengenai variabel-variabel tertentu yang diteliti dengan menyajikan frekuensi, angka rata-rata, atau kualifikasi lainnya untuk masing-masing kategori di suatu variabel. Sehingga dalam pengolahan analisis data menggunakan pengolahan data statistik yang bersifat deskriptif (statistik deskriptif).

Berdasarkan pranata-pranata dalam objek kajian penelitian ini, maka dalam pranata keluarga diambil responden sebanyak lima keluarga. Terhadap pranata sekolah yang terdiri dari: tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan Perguruan Tinggi. Masing-masing dari jenjang pendidikan diambil responden sebanyak lima orang. Dalam pranata ekonomi mengambil lembaga ekonomi koperasi sebanyak lima responden, yaitu satu orang pimpinan/kepala dan empat orang stafnya (yang menjabat pengurus). Dalam pranata agama mengambil objek pesantren dengan lima orang responden, yaitu satu orang pimpinan pesantren dan empat orang pengurus. Dalam pranata politik yang terdiri dari Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Masing-masing dari ketiga partai politik tersebut diambil responden sebanyak lima orang, yaitu satu orang pimpinan partai dan empat orang lainnya menjabat pengurus.

1.6 Organisasi Tulisan

Sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Pemimpin Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Utara, maka diambil langkah kebijaksanaan agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam prosedur dan pertanggungjawaban ilmiah penelitian tentang “Peranan Pendidikan Dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional” ini, dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan. Langkah awal dari penelitian ini adalah tahap persiapan, kemudian tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap penulisan laporan.

1.6.1 Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan sarana yang diperlukan dalam penelitian. Setelah Pimpinan Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Utara menunjuk ketua tim, maka berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Nomor GI/07.92.12/III tanggal 12 Juli 1992, susunan personalia tim penelitian aspek “Peranan Pendidikan Dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional Daerah Sumatera Utara” ini, terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris merangkap anggota serta tiga orang anggota.

Dalam tahap persiapan ini dimantapkan materi yang akan dibahas yaitu variabel-variabel yang akan diteliti pada pembicaraan berikutnya, sehingga akan tersusun suatu laporan yang sistematis. Pada permasalahan yang telah dikemukakan terdahulu dijelaskan bahwa, persoalan utama yang menjadi pokok bahasan menitik beratkan kepada pranata: keluarga, sekolah, ekonomi, agama, dan politik. Dengan unsur-unsur materi tentang pranata-pranata yang akan dibahas dalam penelitian ini maka unit analisis yang akan dikemukakan didasarkan kepada: institusi lokal yang berlaku di lingkungan keluarga, institusi regional seperti dalam pranata ekonomi yaitu situasi dan kehidupan di pasar-pasar dan di toko-toko, institusi nasional yang dalam pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi, institusi pranata politik yang di dalamnya termasuk orang-orang yang memegang kekuasaan, institusi pranata ekonomi yang dalam hal ini dipilih koperasi. Pada masing-masing pranata tersebut ditentukan indikator-indikator yang utama. Diantaranya adalah bahasa yang diper-

gunakan baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah seperti: cara berpakaian, tingkah laku (perbuatan), interaksi sosial lainnya baik di lingkungan keluarga serta dengan teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya maupun di sekolah dalam pranata-pranata lainnya. Selain itu, dengan suku bangsanya sendiri seperti: tipe-tipe akomoditinya yakni dalam persaingan dan konflik, dan benda-benda kerajinan tradisional yang dimiliki keluarga.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pada dasarnya semua anggota tim terlibat dalam keseluruhan tugas mulai dari tahapan persiapan sampai kepada penulisan draft awal penelitian. Keseluruhan tugas tersebut tertuang dalam rencana kegiatan operasionalisasi dengan petunjuk pelaksanaan teknis penelitian dan berpedoman kepada kontrak yang telah ditandatangani oleh ketua tim.

1.6.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pelaksanaan pengumpulan data adalah operasionalisasi kegiatan yang utama dalam penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini hanya mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila segala sesuatunya telah dipersiapkan, terutama yang berkenaan dengan kelengkapan peralatan di samping lokasi yang jelas dan dilaksanakan berdasarkan *time schedule*, yang telah dibuat oleh Pimpinan Bagian Proyek Penelitian ini.

Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian ini, maka dalam pengumpulan data dilakukan dengan melakukan metode yang dianggap relevan dengan tipe penelitian ini, yaitu pengumpulan dengan cara interview (wawancara), observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara (interview) dilakukan terhadap para informan terpilih berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Oleh karena dalam penelitian ini lebih cenderung menggunakan data kualitatif (meskipun tidak mengabaikan data kuantitatif) dan agar data yang dijarah tidak banyak menyimpang dari masalah yang diteliti, maka wawancara dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Daftar per-

tanyaan disusun secara terbuka (Open question) atau tidak berstruktur (unstructured). Dengan demikian akan memungkinkan para informan dapat memberi informasi yang lebih lengkap. Sedangkan untuk memperoleh jawaban yang lebih teliti dan akurat, wawancara dilakukan secara mendalam (depth interview) yaitu dengan memfokuskan pertanyaan yang diajukan pada salah satu atau beberapa masalah tertentu.

Untuk mengetahui gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dalam kaitan ini, termasuk kegiatan-kegiatan sosial para informan dalam pranata-pranata yang telah ditetapkan, maka dalam hal ini juga dilakukan observasi terutama untuk menjalin data yang tidak mungkin didapatkan secara langsung pada saat wawancara, karena masalah-masalah yang dipertanyakan terlalu pribadi sifatnya atau politis. Meskipun data yang diperoleh melalui observasi ini merupakan data informal (dengan mendengarkan pembicaraan-pembicaraan penduduk setempat tanpa melakukan wawancara), namun data ini penting artinya dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara.

Dalam studi kepustakaan dipilih buku-buku atau literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menelusuri informasi yang bersifat historis. Dengan demikian diharapkan bahwa data yang diperoleh baik di lapangan maupun melalui studi kepustakaan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.6.3 Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dilakukan setelah selesai pengumpulan data lapangan. Semua data dari lapangan dan studi kepustakaan diolah, untuk disajikan menjadi data yang dapat dipergunakan bagi penulisan berikutnya. Semua data diklasifikasikan sesuai dengan materi yang dibutuhkan dalam kerangka acuan yang telah dijabarkan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pembuatan ikhtisar jawaban-jawaban informan yang merupakan data primer, kemudian dirumuskan menjadi data yang dapat dipergunakan dalam penulisan laporan dengan mengikuti sistem-

tika penulisan yang telah ditentukan dalam kerangka acuan penelitian.

1.6.4 Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan merupakan kegiatan lanjutan setelah tahap pengolahan data diselesaikan. Semua anggota tim masing-masing membuat draft laporan seara terpisah sesuai dengan bab-bab yang telah ditentukan dalam rapat penelitian. Draft-draft tersebut selanjutnya didiskusikan oleh tim. Setelah melalui perbaikan yang berdasarkan atas tanggapan dari semua anggota tim dalam diskusi, maka draft penelitian tersebut oleh masing-masing anggota tim direvisi sehingga sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya semua draft diserahkan kepada sekretaris tim untuk dijadikan sebagai satu kesatuan. Kemudian ketua dan sekretaris tim melakukan editing terhaap draft yang telah dipersatukan tersebut, agar terdapat keseragaman bahasa dan sistem penulisan maupun agar penulisan yang disajikan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD). Penulisan draft akhir ini merupakan naskah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti tentang “Peranan Pendidikan Dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional Kebudayaan Daerah Sumatera Utara”.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1 Letak Administratif

Kecamatan Medan Baru yang menjadi sampel lokasi penelitian ini, adalah salah satu dari 21 kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, Propinsi Sumatera Utara. Luas Kecamatan Medan Baru ini terdiri dari 540 hektar.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989, tentang Pembentukan/Pemekaran kecamatan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, wilayah Kecamatan Medan Baru terdiri dari 18 kelurahan dengan luas arealnya lebih kurang 1.852,4 hektar. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh dua perwakilan kecamatan, yaitu: Perwakilan Kecamatan Medan Polonia dengan membawahi 5 kelurahan dan Perwakilan Kecamatan Maimun dengan membawahi 6 kelurahan.

Kecamatan Medan Baru yang dikenal dewasa ini terdiri dari 6 kelurahan dengan 63 lingkungan/dusun, yaitu sebagai berikut: Kelurahan Titi Rantai 10 lingkungan, Kelurahan Padang Bulan 12 lingkungan, Kelurahan Merdeka 13 lingkungan, Kelurahan Babura 12 lingkungan, Kelurahan Petisah Hulu 12 lingkungan, dan Kelurahan Darat 4 lingkungan.

an.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Medan Baru adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatas dengan jalan Gajah Mada Kecamatan Medan Petisah, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sembada Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang, sebelah Timur berbatas dengan Sei Babura Kelurahan Polonia dan Kampung Anggrung Kecamatan Medan Polonia, sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Padang Bulan Selayang I dan Selayang II Kecamatan Medan Selayang dan Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal.

2.2 Keadaan alam

Wilayah Kecamatan Medan Baru terletak antara 6 sampai 15 meter di atas permukaan laut dan beriklim tropis. Jarak antara wilayah kecamatan dengan pusat pemerintahan/kotamadya sekitar 5 kilometer. Lokasi lingkungan kelurahan yang terjauh dari pusat pemerintahan kecamatan, jaraknya lebih kurang 7,5 kilometer.

Secara fisik, wilayah kecamatan ini bukanlah merupakan pusat kota. Hal ini terbukti di beberapa bagian wilayahnya masih terhampar luas (39 ha) lahan-lahan kosong yang diusahakan penduduk sebagai tanah pertanian. Tanah pertanian tersebut terdiri dari sawah tadah hujan, lahan kering, dan kebun. Kebun tersebut selain ditanami padi juga sayur-mayur dan tanaman palawija lainnya seperti: jagung, ketela pohon, ubi rambat, kacang tanah, pepaya dan pisang. Jenis dan luas tanaman tanah pertanian di Kecamatan Medan Baru adalah sebagai berikut: padi 15 ha, jagung 3 ha, ketela pohon 5 ha, ubi rambat 5 ha, kacang tanah 1 ha, sayur-sayuran 10 ha. Penggunaan tanah lainnya di wilayah Kecamatan Medan Baru ini terdiri dari: lapangan olah raga, taman rekreasi, jalur hijau, perkantoran, kuburan dan lain-lain.

Dengan demikian terlihat bahwa di Kecamatan Medan Baru, walaupun terletak di ibukota propinsi, masih terdapat tanah pertanian yang cukup luas dan sebagian dari penduduknya mengusahai tanah pertanian

tersebut sebagai sumber mata pencahariannya.

Setiap kelurahan di Kecamatan Medan Baru ini, masing-masing mempunyai sebuah Balai Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sementara beberapa instansi vertikal pemerintah yang ada, antara lain: Koramil, Polsekta, KUA, PPLKB, Jupen, Depdikbud, PSK, Statistik, Pertanian, dan Bank.

Dalam berbagai kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Medan, maupun atas swadaya masyarakat melalui wadah LKMD. Peranan LKMD sangat besar dalam menunjang kegiatan pembangunan di setiap kelurahan dalam menggalakkan partisipasi masyarakat secara aktif bergotong royong seperti pelaksanaan Inpres Desa setiap tahunnya dan kegiatan Bulan Bakti LKMD.

2.3 Penduduk

Menurut data Monografi Kecamatan Medan Baru, sampai bulan Mei 1992 jumlah penduduknya 46.980 jiwa yang terdiri dari 8.722 kepala keluarga (KK), dan jumlah ini setiap tahunnya bertambah terus. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat ini bukan disebabkan tingginya angka kelahiran, dalam arti sebagai akibat kegagalan program Keluarga Berencana (KB), melainkan karena tingginya angka urbanisasi. Tingginya angka urbanisasi ini disebabkan karena di daerah ini terdapat 2 buah perguruan tinggi yaitu Universitas Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi negeri dan Dharma Agung sebagai perguruan tinggi swasta, yang para mahasiswanya cenderung bermukim di sekitar kedua kampus tersebut.

Penduduk Kecamatan Medan Baru terdiri dari berbagai kelompok etnis dan ras, selain status sebagai warga negara Indonesia (WNI) bahkan diantaranya ada yang warga negara asing (WNA). Mayoritas penduduknya adalah kelompok etnis Karo, disamping kelompok-kelompok etnis lainnya seperti: Jawa, Mandailing, Batak Toba, Simalungun, Melayu, dan Minang-

kabau. Selain itu banyak terdapat etnis Cina, Sikh, dan Tamil. Mereka ini paling banyak berdiam di Kelurahan Darat (khususnya orang-orang Sikh dan Tamil), tetapi etnis Cina hampir tersebar di seluruh Kecamatan Medan Baru. Dengan demikian terlihat bahwa penduduk Kecamatan Medan Baru merupakan masyarakat yang heterogen.

Rincian penduduk Kecamatan Medan Baru berdasarkan atas kelurahan, yaitu kelurahan: Titi Rantai berjumlah 8.323 jiwa, Padang Bulan berjumlah 6.094 jiwa, Merdeka berjumlah 10.029 jiwa, Babura berjumlah 10.093 jiwa, Petisah Hulu berjumlah 7.842 jiwa, Darat berjumlah 2.989 jiwa.

2.4 Pendidikan

Kecamatan Medan Baru, merupakan salah satu diantara kecamatan yang ada di Kotamadya Medan, dimana terdapat berbagai jenis sarana pendidikan dan berbagai tingkat pendidikan. Sarana pendidikan itu, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai tingkat perguruan tinggi, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta atau lembaga-lembaga. Keadaan ini erat kaitannya dengan sejarah perkembangan Kota Medan dimana wilayah Kecamatan Medan Baru yang dikenal sekarang ini merupakan kawasan pemukiman elit penduduk Kota Medan semenjak dahulu. Artinya karena penduduk daerah Medan Baru pada umumnya golongan elit, sehingga wajarlah apabila berbagai jenis dan tingkat pendidikan terdapat di wilayah Kecamatan Medan Baru ini.

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Medan Baru adalah sebagai berikut: Taman Kanak-kanak (TK) 8 buah, SD Negeri 6 buah, SD Inpres 6 buah, Madrasah 1 buah, SD Swasta 6 buah, SMTP Negeri 1 buah, SMTP Swasta 4 buah, SMTA Swasta 11 buah, Akademi 2 buah, Perguruan Tinggi Negeri 1 buah, Perguruan Tinggi Swasta 2 buah. Berdasarkan data mengenai sarana pendidikan tersebut, terlihat bagaimana potensialnya Kecamatan Medan Baru dalam hal pendidikan.

2.5 Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk sehari-hari, di wilayah Kecamatan Medan Baru terdapat 2 buah pasar umum dan 1 buah pasar dengan bangunan semi permanen, selain itu terdapat 6 buah bank, juga terdapat beberapa buah koperasi yang dikelola oleh masyarakat, pegawai negeri maupun ABRI.

Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya yang masih terdapat lahan-lahan pertanian, sehingga ada penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani. Mata pencaharian sebagai petani berjumlah 40 orang, dengan rincian 26 orang petani pemilik dan 14 orang petani penggarap. Hasil-hasil pertanian penduduk terutama padi dipergunakan untuk kebutuhan sendiri, sedangkan sayur-mayur selain untuk kebutuhan sendiri juga dijual untuk kebutuhan pasar.

Sumber-sumber mata pencaharian penduduk lainnya adalah sebagai pedagang, pegawai negeri, ABRI, dan lain-lain. Perincian penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut: petani pemilik tanah 26 jiwa, petani penggarap 14 jiwa, pengusaha sedang dan besar 2.223 jiwa, pegawai negeri 1.539 jiwa, ABRI 1.429 jiwa, pensiunan pegawai negeri dan ABRI 962 jiwa, dan lain-lain 34.922 jiwa. Jumlah keseluruhan 41.115 jiwa.

2.6 Agama

Kerukunan umat beragama antar pemeluknya di Kecamatan Medan Baru, menunjukkan kondisi dan situasi yang mantap. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan keagamaan selalu ditopang dan didukung oleh umat yang berlainan agama. Situasi dan kondisi yang demikian, berkat pembinaan secara berkesinambungan sesuai dengan sasaran pembangunan di bidang spiritual yang menyangkut keagamaan.

Pembentukan pribadi generasi pemuda untuk lebih mempertebal keimanan dilakukan melalui pembinaan dalam bidang keagamaan seperti

pembentukan dan pembinaan remaja mesjid bagi kalangan generasi muda Islam, maupun perkumpulan kerohanian oleh para remaja Kristen yang bekerja sama dengan pimpinan gereja. Kecenderungan para pemeluk agama untuk lebih meningkatkan keyakinan diri kepada Tuhan tercermin dalam menjalankan ibadah maupun dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat antar pemeluk agama. Untuk menunjang masyarakat dalam menjalankan ibadahnya, di Kecamatan Medan Baru mempunyai 12 buah mesjid, 11 buah musholla, 15 buah gereja, dan 2 buah kuil.

Adapun distribusi penduduk Kecamatan Medan Baru menurut agama yang dianutnya adalah sebagai berikut: Islam 19.600 jiwa, Katholik 8.810 jiwa, Protestan 12.344 jiwa, Hindu 2.005 jiwa, Budha 3.211 jiwa, dan aliran kepercayaan 1.020 jiwa.

2.7 Politik

Organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang ada di Kecamatan Medan Baru adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketiga organisasi sosial politik tersebut masing-masing mempunyai satu komisariat di Kecamatan Medan Baru ini.

Perolehan suara dari ketiga Organisasi Partai Politik tersebut, dalam Pemilihan Umum tahun 1977, 1982 dan 1987 adalah sebagai berikut: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 1977 memperoleh 11.625, tahun 1982 memperoleh suara 20.268, tahun 1987 memperoleh suara 13.935; Golongan Karya (Golkar) tahun 1977 memperoleh suara 40.352, tahun 1982 memperoleh suara 42.459, tahun 1987 memperoleh suara 48.682; Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun 1977 memperoleh suara 3.465, tahun 1982 memperoleh suara 6.016, tahun 1987 memperoleh suara 14.649.

BAB III

PRANATA SOSIAL KELUARGA

3.1 Bahasa

Penduduk Kota Medan adalah masyarakat yang heterogen baik dari etnis yang ada maupun bahasa yang dipergunakan. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu kelompok etnis, baik pada kelompok Karo, Melayu, Jawa, Mandailing, dan Batak Toba, pada umumnya bahasa daerahnya hanya dipergunakan di lingkungan keluarga saja, itupun sudah sangat terbatas.

Di kalangan kelompok etnis Jawa, bahasa Jawa hanya dipergunakan oleh suami, istri dan anak-anak namun dalam hal ini pun, hanya suami dan istri yang lebih banyak menyapa dengan mempergunakan bahasa Jawa kepada anak-anak. Dalam hal demikian mau tidak mau harus dijawab dalam bahasa Jawa pula oleh anak mereka. Begitu pun sering terjadi tanpa disadari oleh anak-anak mereka menyambut teguran orang tuanya dalam bahasa Indonesia.

Dalam keluarga Jawa, tidak jarang pula ditemukan sebagai keluarga luas, suasana percakapan dalam bahasa Jawa sama keadaannya seperti keluarga batih. Artinya bahasa Jawa hanya dipergunakan oleh suami, isteri dan anak-anak. Sedangkan kepada anggota-anggota keluarga lain-

nya seperti cucu-cucunya, mereka tidak lagi mempergunakan bahasa Jawa, melainkan menegur dan menyapa dalam bahasa Indonesia. Dengan para menantu, sebagai pihak mertua masih mempergunakan bahasa Jawa apabila menantunya juga berasal dari kelompok etnis yang sama. Akan tetapi kepada menantu yang bukan berasal dari kelompok etnisnya sendiri, pihak mertua menyapa dan bertegur sapa dalam bahasa Indonesia. Situasi yang serupa dijumpai dalam pemakaian bahasa oleh kakek dan nenek kepada cucu-cucunya, dimana bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia meskipun orang tua cucunya berasal dari kelompok Jawa sendiri.

Ternyata, para orang tua pada etnis Jawa memang tidak pernah secara sengaja mengajar bahasa daerahnya sendiri kepada anak-anak mereka. Sehingga dalam hal ini penguasaan bahasa Jawa pada golongan anak-anak cukup sekedarnya saja, dalam arti kata bahwa penguasaan dan tingkat bahasa Jawa yang dipergunakan adalah bahasa Jawa sehari-hari. Sementara, anak-anak mereka sendiri selain kurang menghayati bahasa daerahnya, tetapi juga tidak berminat untuk lebih mempelajarinya atau setidaknya untuk mempergunakannya sehari-hari. Terhadap para menantu yang bukan berasal dari etnis Jawa, secara jelas mereka tidak bisa mempergunakan bahasa Jawa dan sebaliknya merekapun tidak pernah berusaha agar mampu berbahasa Jawa.

Satu hal yang banyak ditemukan di daerah penelitian, bahwa kelompok etnis Jawa selain mempergunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, mereka pada umumnya mahir berbahasa Karo. Walaupun dalam hal ini tidak ada keluarganya yang berasal dari kelompok etnis Karo baik sebagai istri maupun suami. Kemahiran para etnis Jawa berbahasa Karo, semata-mata disebabkan oleh faktor lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa daerah Padang Bulan, etnis Karo adalah kelompok yang mayoritas.

Kemampuan berbahasa Karo seperti pada umumnya yang terlihat di kalangan kelompok etnis Jawa juga terjadi pada kelompok etnis lainnya yang bedomisili di kawasan Padang Bulan ini seperti disaksikan pada etnis: Melayu, Batak Toba, Mandailing, dan lainnya. Sehingga secara

sepintas lalu, dalam mempergunakan bahasa Karo sehari-hari kelompok etnis yang bukan Karo adakalanya tak dapat dibedakan dengan etnis Karo sendiri.

Sementara pada kelompok etnis Karo sendiri di lingkungan keluarga mereka, mempergunakan bahasa campuran yaitu bahasa daerahnya sendiri dan bahasa Indonesia, bahkan pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan keluarga, lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia yang lebih dominan ini selain karena kebiasaan harus mempergunakannya di tempat-tempat mereka bekerja baik sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, wiraswasta, dan tempat bekerja lainnya.

Faktor pendukung utama pada kelompok etnis Karo sehingga dominan berbahasa Indonesia di lingkungan keluarganya, erat kaitannya dengan kondisi lingkungan masyarakatnya yang heterogen. Seperti yang telah dijelaskan di atas, walaupun daerah kecamatan penelitian ini mayoritas penduduknya kelompok etnis Karo, namun masyarakatnya terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, dan kelompok etnis Karo sendiri pola pemukimannya menyebar. Bahkan di lingkungan tertentu adakalanya etnis Karo sendiri minoritas dan hidup terpisah dari kelompok etnisnya. Sehingga seperti dijumpai pada kelompok etnis Jawa, mereka mahir berbahasa Karo dan sebaliknya kelompok etnis Karo juga bisa berbahasa Jawa, Mandailing, dan Batak Toba. Kondisi seperti ini tergantung kepada keadaan lingkungan setempat di mana mereka bertempat tinggal. Atau dengan kata lain bahwa dengan kelompok etnis yang mana warga masyarakat banyak bergaul sehari-harinya. Dengan demikian, secara timbal balik kelompok-kelompok etnis yang ada akan saling menggunakan bahasa kelompok etnis yang menjadi tetangganya. Tegasnya, kontak-kontak di antara sesama kelompok etnis Karo, Jawa, Mandailing, dan Batak Toba cenderung memperlihatkan untuk bisa menguasai bahasa kelompok-kelompok etnis yang saling berhubungan dalam kehidupannya sehari-hari, baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun di tempat-tempat mereka bekerja.

Dalam keluarga etnis Karo, penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga yang digunakan oleh orang tua juga berakibat terhadap anak-anaknya, dalam arti kata kepada anak-anak pun kedua orang tua berbahasa Indonesia. Bahkan sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakatnya seorang ayah dari etnis Karo biasanya menguasai dan fasih berbahasa Mandailing dan Batak Toba. Antara ayah dan ibu yang berasal dari satu etnis, jika keduanya bercengkerama maupun misalnya dalam membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia, bahasa yang digunakan adalah bahasa Karo yang bercampur dengan bahasa Indonesia. Bahasa Karo sebagai bahasa daerahnya baru akan terlihat dipergunakan secara penuh apabila mereka bertemu dengan kelompok etnisnya sendiri, atau pada saat pulang kampung maupun apabila sanak keluarganya datang bertamu ke rumah mereka.

Pada umumnya kelompok etnis Karo menggunakan bahasa daerahnya di lingkungan keluarga yang bercampur atau diselingi dengan ucapan-ucapan dalam bahasa Indonesia. Sehingga dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam keluarga etnis Karo memperlihatkan frekuensi yang semakin tinggi keadaan ini dibuktikan lagi bahwa orang tua mereka lebih banyak mempergunakan bahasa Indonesia pada saat berkumpul dengan anak-anaknya, maupun ketika menyuruh atau bertanya pada anak-anaknya.

Tampaknya frekuensi penggunaan bahasa Indonesia pada kalangan keluarga etnis Karo turut pula ditentukan oleh situasi dan kondisi pada setiap keluarga. Dalam hal ini salah satu dari indikator semakin besarnya pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan keluarga adalah faktor pendidikan anak-anak. Artinya semakin banyak anak-anak mengecap pendidikan, apalagi sampai ke jenjang perguruan tinggi maka pemakaian bahasa Indonesia pada lingkungan keluarga tampak semakin lebih kuat. Dalam keluarga yang berpendidikan, terlepas dari apakah orang tuanya berpendidikan atau hanya bersekolah rendah saja, tetapi anak-anaknya banyak yang berpendidikan, maka dalam situasi seperti ini pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari dalam lingkungan keluarga akan terlihat

semakin besar frekuensinya. Keadaan ini sebenarnya tercipta dengan sendirinya yaitu sebagai akibat yang muncul dari pergaulan anak-anak selama bersekolah di mana selama bersekolah mereka lebih banyak berbahasa Indonesia.

Seperti halnya pada keluarga kelompok etnis Jawa, Karo, Mandailing dan Batak Toba, di mana orang tua lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ayah dan ibu lebih banyak berbahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan anak-anaknya dari pada mempergunakan bahasa daerahnya sendiri. Sehingga dalam suasana demikian, dengan sendirinya anak-anak mereka pun lebih banyak mempergunakan bahasa Indonesia, keadaan ini mengakibatkan anak-anak lebih fasih berbahasa Indonesia dari pada berbahasa etnisnya sendiri.

Di antara kelompok etnis Batak: Karo, Mandailing, dan Toba terdapat perbedaan dalam mempergunakan bahasanya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, etnis Batak menggunakan beberapa logat, yaitu: logat Karo (dipakai etnis Karo), logat Pak-pak (dipakai etnis Pak-pak), logat Simalungun (dipakai etnis Simalungun), dan logat Toba (dipakai etnis Toba, Angkola dan Mandailing). Di antara logat tersebut, dua yang paling jauh perbedaannya yaitu logat Karo dengan Toba (Payung Bangun, 1975). Ketiga sub suku bangsa Batak yang digolongkan pada logat Toba (etnis Toba, Mandailing, dan Angkola), sangat dekat logat yang dipergunakan, walaupun sebenarnya bahasa yang dipergunakan mempunyai perbedaan namun ketiga sub suku bangsa tersebut saling mengerti.

Pada umumnya, kelompok etnis Batak, Karo, Mandailing, dan Toba mempergunakan bahasa Indonesia di tempat-tempat resmi maupun di tempat-tempat bekerja. Namun dalam hal ini di antara kelompok etnis Karo dan Batak Toba di satu pihak dan kelompok etnis Mandailing di pihak lain terdapat perbedaan yang jelas terhadap pemakaian bahasa daerahnya sendiri. Kelompok etnis Batak Karo dan Toba, mereka lebih sering terdengar berbahasa daerah jika bertemu atau berkumpul sesama

anggota kelompok-kelompok etnisnya walau di mana saja mereka berada, bahkan di tempat-tempat bekerja atau di sela-sela mengerjakan tugasnya. Tidak demikian halnya dengan kelompok etnis Mandailing, mereka sangat jarang dan hampir tidak mempergunakan bahasa daerahnya sewaktu mereka berkumpul atau bercengkerama sesama anggota kelompok etnisnya, walaupun pada saat itu tidak ada kelompok etnis lainnya di tengah-tengah mereka.

Dalam lingkungan keluarga etnis Mandailing, penggunaan bahasa Indonesia lebih dominan dalam berkomunikasi antara ayah, ibu dan anak. Situasi demikian juga terjadi walaupun ayah dan ibu berasal dari kelompok etnis yang sama Artinya dalam berkomunikasi antara ayah dan ibu lebih banyak mempergunakan bahasa Indonesia dan bercampur dengan bahasa daerahnya.

Berbeda dengan kelompok etnis Batak Toba, di mana di lingkungan keluarganya, ayah dan ibu terdengar lebih banyak mempergunakan bahasa daerah yang diselingi bahasa Indonesia. Kepada anak-anakpun, ayah dan ibu sering menyapa dengan berbahasa daerah meskipun menyuruh anak-anak untuk sesuatu kepentingan. Pada saat membicarakan sesuatu masalah yang sifatnya sangat rahasia, para ayah dan ibu juga menggunakan bahasa daerah.

Dalam lingkungan keluarga etnis Melayu, bahasa yang dipergunakan saat berkomunikasi adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia berlogat Melayu. Hal ini dapat dipahami oleh karena bahasa Indonesia sendiri sangat dekat dengan bahasa Melayu. Para orang tua jika berkomunikasi terhadap anaknya mempergunakan bahasa Indonesia dengan logat Melayu. Tetapi antara ayah dan ibu apabila membicarakan hal-hal yang sangat penting dan rahasia mereka menggunakan bahasa Melayu. Pada pertemuan keluarga kelompok etnis Melayu, misalnya antara ayah dan ibu, mertua dengan menantunya, juga di tempat-tempat bekerja mereka menggunakan bahasa Indonesia.

Sebenarnya etnis Melayu sendiri dalam menggunakan bahasa Melayu sangat terbatas, artinya bahasa Melayu hanya dipergunakan di lingkung-

an keluarga saja, apabila mereka pulang kampung, dan di tempat-tempat pertemuan khusus seperti: saat pesta perkawinan, mengunjungi kemandirian, dan pertemuan lainnya yang tentunya terhadap kelompok etnisnya.

Pada umumnya para ayah maupun ibu dari setiap kelompok etnis yang ada tidak pernah mengajarkan bahasa daerahnya sendiri secara langsung kepada anak-anaknya. Dengan keadaan ini berarti kemampuan berbahasa daerah pada kalangan anak-anak saat ini, khususnya generasi muda semakin rendah. Bahkan sering dijumpai bahwa di kalangan generasi muda saat ini yang tidak dapat berbahasa daerahnya sendiri. Hal ini terutama terlihat pada kalangan generasi muda yang lahir dan dibesarkan di lingkungan masyarakat kota Medan yang heterogen.

3.2 Cara Berpakaian

Dalam hal berpakaian seperti pada saat pergi ke tempat bekerja secara umum, masing-masing kelompok etnis memperlihatkan cara-cara yang serupa, yaitu dengan menggunakan celana panjang dan kemeja bagi kaum pria, baik sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, maupun yang wiraswasta. Pada kalangan wanita juga memperlihatkan cara-cara berpakaian yang serupa yaitu dengan menggunakan rok dan blus pada saat mereka pergi bekerja maupun pergi berbelanja ke pasar. Sementara pada kalangan kaum pria adakalanya mereka mengenakan celana panjang dan kemeja lengan pendek maupun baju kaos yang pakai krah pada saat mereka pergi ke pasar atau pusat-pusat perbelanjaan.

Pada kalangan wanita, cara-cara berpakaian pada saat ke luar rumah, bukan ke tempat-tempat pesta atau tempat bekerja, terlihat adanya penyesuaian jenis pakaian yang digunakan berdasarkan tingkat usia. Bagi kalangan wanita setengah baya, mereka cukup terbiasa dengan hanya mengenakan rok dan blus. Bagi mereka yang sudah mulai berusia lanjut, terdapat kecenderungan untuk mengenakan pakaian yang menutup pada bagian kaki sampai batas betis atau mata kaki. Para ibu rumah

tangga wanita Karo, biasanya mengenakan sarung sebagai pengganti rok dan blus lengan pendek maupun lengan panjang. Begitu juga halnya bagi kalangan ibu rumah tangga kelompok etnis Jawa, Mandailing, dan Melayu. Namun sebagai kebiasaan yang membedakan dengan para ibu rumah tangga etnis Karo, bahwa para wanita yang mulai lanjut usia di kalangan etnis Jawa, Mandailing, dan Melayu mengenakan penutup kepala yang disebut *jilbab*. Jilbab ini dipakai baik pada saat di rumah maupun pergi ke pasar. Hal ini memang erat kaitannya untuk menunjukkan identitas sebagai seorang muslim. Adakalanya mereka tidak memakai sarung tetapi memakai rok panjang yang menutup bagian bawah tubuh sampai batas betis atau mata kaki.

Pada saat berada di rumah, biasanya para orang tua mengenakan pakaian biasa seperti: celana panjang dengan kemeja lengan pendek atau baju kaus bagi kalangan pria (bapak), dan rok serta blus bagi kalangan wanita (istri). Menjelang sore dan malam hari biasanya bagi kalangan pria (Suami) mengenakan sarung dengan kemeja longgar maupun baju kaus, atau celana panjang maupun piama. Cara berpakaian demikian terlihat pada kalangan pria (suami) kelompok etnis Melayu, Karo, Mandailing, dan Jawa. Tetapi pada kalangan pria (suami) kelompok etnis Batak Toba, mereka tidak mengenakan sarung sebagai pakaian di sore dan malam hari. Mereka biasanya hanya memakai celana panjang dan kemeja atau kaus, dan adakalanya mengenakan piama.

Pada saat menghadiri pertemuan keluarga, bagi kaum pria biasanya pakaian yang dikenakan adalah pakaian sehari-hari yaitu celana panjang dan kemeja, bagi kaum wanitanya memakai rok serta blus. Cara berpakaian demikian juga digunakan apabila menghadiri suatu upacara perkawinan tetangga sekitarnya atau kenalan lainnya. Namun, pada kaum pria adakalanya mengenakan kemeja batik lengan panjang saat pergi menghadiri pesta perkawinan.

Bagi kaum pria kelompok etnis Melayu sebenarnya mengenal tiga jenis pakaian, khususnya sebagai pakaian adat tradisional yaitu: Baju cekak musang, baju gunting cina, dan baju teluk belanga. Pada masa

dahulu, baju kecak musang dipakai apabila pergi menghadiri suatu pesta perkawinan maupun pada upacara adat lainnya. Sedangkan baju gunting cina adalah merupakan pakaian yang dipergunakan sehari-hari di rumah dan teluk belangan dipakai ketika pergi mengikuti upacara-upacara yang bersifat keagamaan. Pada saat ini, dari ketiga jenis baju tersebut hanya baju teluk belanga yang rata-rata masih dipunyai dan dipakai kaum pria Melayu, itupun sudah sangat terbatas pemakaiannya, yaitu apabila pergi menghadiri kenduri tetangga atau kadang-kadang dipakai pada waktu sore hari di rumah. Biasanya baju teluk belanga berwarna putih yang terbuat dari kain tetoron. Pada hari-hari lainnya baju teluk belanga dipakai saat pergi ke mesjid, atau pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam menghadiri pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh kelompok etnis Melayu sendiri pun masyarakat Melayu tidak mengenakan pakaian adatnya, kecuali apabila mereka sebagai penyelenggara pesta itu sendiri.

Pada kalangan wanita etnis Melayu terlihat adanya cara berpakaian yang disesuaikan dengan tingkat usia. Dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan keluarga, para ibu rumah tangga etnis Melayu biasanya mengenakan rok dan blus. Sementara bagi kaum wanita yang sudah mulai lanjut usia (50 tahun ke atas), mereka mengenakan kain sarung dan kebaya panjang. Jenis pakaian ini juga dipergunakan pada saat pertemuan keluarga maupun pergi ke tempat-tempat pesta perkawinan. Dalam hal ini yang membedakan cara berpakaian kebaya sehari-hari di rumah dan pergi ke pesta adalah jenis bahan pakaiannya. Apabila pergi menghadiri pesta perkawinan, mereka mengenakan kain songket sebagai pengganti kain sarungnya dan bahan baju kebaya terbuat dari kain yang berharga mahal. Sedangkan baju kebaya sehari-hari pada umumnya terbuat dari kain yang berharga murah disebut dengan kain "benang sering".

Pada kelompok etnis Karo, jenis pakaian sehari-hari yang dikenakan oleh kaum pria (suami) di rumah pada umumnya adalah celana panjang dan kemeja. Sedangkan pada sore dan malam hari adalah memakai kain

sarung dan kemeja yang longgar lengan pendek atau piyama. Apabila pergi bekerja dan menghadiri pesta perkawinan pakaian yang dikenakan adalah sama yaitu celana panjang dan kemeja lengan pendek atau lengan panjang, yang terbuat dari bahan batik maupun kain biasa.

Pada saat ini pakaian adat yang digunakan oleh etnis Karo tampaknya semakin sederhana, yaitu hanya dipakai pada saat upacara adat perkawinan atau upacara adat lainnya yang berhubungan dengan kepercayaan. Artinya bahwa kelompok etnis Karo tidak lagi mengenakan perlengkapan pakaian adat secara penuh, atau dengan perkataan lain, hanya tinggal beberapa kain adat saja yang masih sering terlihat dipergunakan pada waktu upacara adat tertentu. Hal itu pun, apabila mereka terlibat langsung sebagai penyelenggara upacara adat dalam suatu pesta adat. Misalnya seseorang yang menyelenggarakan suatu pesta adat perkawinan yang berada sebagai pihak *kalimbubu* (pihak pemberi gadis) tentunya langsung terlibat dalam upacara adat perkawinan tersebut sehingga mereka harus mengenakan jenis pakaian adat tertentu.

Jenis pakaian adat yang masih bertahan dipergunakan oleh etnis Karo adalah *bulang* yaitu sebagai penutup kepala, yang dipakai oleh pengantin pria dan bagi mereka yang menyelenggarakan pesta perkawinan tersebut. *Bulang* yang digunakan pada masyarakat Karo merupakan perlambang kebesaran dan berfungsi etis. Bahan kainnya dominan berwarna dasar merah dengan garis-garis lurus halus yang berwarna kuning. Pada saat ini, pemakaian *bulang* telah jarang dikenakan, tetapi kain untuk *bulang* sebagai penutup kepala tersebut hanya disandang di bahu untuk pengganti kain sarung yang biasanya juga disandang di bahu.

Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, maupun saat menghadiri pesta perkawinan kerabatnya yang bukan dari kelompok etnisnya kaum wanita Karo mengenakan rok dan blus. Adakalanya mereka memakai celana panjang dan blus atau kaus yang punya krah, dan cara berpakaian seperti ini juga digunakan apabila mereka pergi ke pasar atau keluar rumah. Namun, dalam cara mengenakan pakaian wanita Karo terdapat kebiasaan sesuai dengan tingkat usia mereka.

Umumnya bagi mereka yang sudah mulai berusia lanjut, mengenakan sarung dan kebaya, baik di rumah maupun sewaktu mereka ke luar rumah seperti pergi berbelanja ke pasar atau ke tempat-tempat pertemuan umum lainnya sehari-hari.

Berbeda halnya apabila wanita-wanita Karo menghadiri pesta perkawinan keluarganya sendiri, dalam hal ini stratifikasi sosial mereka akan terlihat, sebab dalam kehidupan sehari-hari orang Batak stratifikasi sosialnya berdasarkan kepada tiga prinsip, yaitu: perbedaan tingkat umur, perbedaan pangkat dan jabatan, perbedaan sifat dan keaslian, dan status kawin. (Bangun, 1975).

Bagi kalangan wanita Karo mereka mengenakan kain sarung dan kebaya apabila menghadiri pesta perkawinan keluarga. Semakin dekat hubungan kekerabatan dengan pihak penyelenggara upacara perkawinan, maka jenis pakaian yang dikenakan akan semakin tinggi kualitasnya. Hal ini terlihat misalnya pada bahan kebaya yang dipakai. Satu kebiasaan yang tampak pada kalangan wanita Karo bahwa mereka memakai bahan baju kebaya dari kain jenis renda. Sementara jenis kain renda ini sendiri bertingkat-tingkat kualitasnya. Semakin tinggi kedudukan sosial seseorang baik oleh karena tingkat usianya maupun karena pangkat dan jabatan suaminya, maka jenis bahan baju renda yang dipakai si istri juga semakin baik kualitas dan mahal harganya.

Dalam pesta perkawinan di lingkungan keluarga etnis Karo, apabila kaum prianya mengenakan bulang atau kain adat yang diselempangkan di bahu, sementara pada kalangan kaum wanitanya selain mengenakan sarung dan baju kebaya mereka juga mengenakan penutup kepala yang disebut dengan *tudung*, yaitu tudung yang merupakan ciri khas wanita Karo (yang membedakannya dengan jenis tudung etnis sub Batak lainnya). Tudung ini terdiri dari tiga lembar kain adat yang satu sama lain berbeda ditata pemakaiannya sedemikian rupa sehingga bentuknya hampir menyerupai sebuah segitiga di atas kepala. Dari tudung yang dipakai oleh seorang gadis pada suatu pesta akan diketahui apakah seorang gadis itu masih sendiri (*single*) atau tidak. Hal ini dapat disaksikan dari kain

rambu-rambu tudungnya. Apabila rambu-rambu tudungnya jelas terlihat, hal itu menandakan bahwa gadis tersebut belum ada yang punya atau masih sendiri (single). Sebaliknya apabila rambu-rambu tudungnya tidak jelas terlihat, berarti gadis tersebut telah terikat oleh seorang pemuda. Dengan demikian gadis tersebut tidak boleh diganggu oleh pemuda lain.

Pada kalangan etnis Jawa begitu juga Mandailing seorang suami pada saat pergi ke tempat pertemuan keluarga maupun menghadiri pesta kerabatnya mereka mengenakan celana panjang dan kemeja baik lengan pendek maupun lengan panjang, tetapi terkadang mereka mengenakan kemeja batik. Namun hal ini agak berbeda apabila mereka menghadiri kenduri atau hajatan maupun pergi ke tempat kemalangan selain memakai pakaian juga memakai peci dan kadang-kadang mengenakan kain sarung.

Bagi seorang suami dari kalangan etnis Jawa, tidak terlihat mereka mengenakan pakaian tradisinya baik pada saat pesta perkawinan sekalipun. Bahkan penutup kepala seperti blangkon pun mereka tidak memakainya. Pakaian adat Jawa hanya dikenakan oleh pasangan penganten pada saat pesta perkawinannya dan pakaian ini pun biasanya hanya disewa. Pada sebuah pesta perkawinan akan terlihat status sosial keluarga yang melaksanakan pesta tersebut. Apabila status sosialnya tinggi, maka di saat pesta perkawinan anaknya biasanya mengenakan pakaian adat termasuk kelengkapannya. Pada keluarga etnis Melayu, Karo, dan Jawa bagi mereka yang langsung terlibat sebagai keluarga penyelenggara pesta perkawinan tersebut akan turut mengenakan pakaian adatnya. Berbeda halnya dengan keluarga etnis Mandailing dan Batak Toba situasi demikian tidak terlihat. Bagi etnis Mandailing, orang tua kedua mempelai (bapaknya) hanya mengenakan kemeja batik dan peci, dan bagi etnis Batak Toba orang tua kedua mempelai (bapaknya) kadang-kadang mengenakan baju jas.

Sementara seorang istri kelompok etnis Jawa, Mandailing, dan Batak Toba sebagai pakaian sehari-hari di rumah, tidak berbeda dengan etnis

lainnya yaitu mengenakan rok dan blus dan adakalanya memakai celana panjang. Cara berpakaian demikian juga dipergunakan saat keluar rumah, seperti pergi ke pasar dan kadang-kadang memakai baju kebaya pendek. Bagi wanita yang sudah berusia lanjut mengenakan sarung dan kebaya panjang.

Para suami pada kalangan etnis Jawa, Mandailing, dan Batak Toba saat pergi menghadiri pesta perkawinan kerabatnya mereka mengenakan celana panjang dan kemeja biasa dan batik. Begitu juga pada saat menghadiri pesta keluarga etnisnya sendiri, pakaian yang dikenakan tidak ada perbedaan. Tegasnya, mereka tidak terlihat mengenakan pakaian adat khusus.

3.3 Tingkah Laku

Pada umumnya para keluarga kelompok etnis yang ada, acuh atau kurang mau tahu dan tidak ambil peduli terhadap suasana lingkungan tempat tinggalnya. Dengan perkataan lain, bahwa dalam mengikuti kegiatan yang bersifat sosial di lingkungan tempat tinggalnya seperti bergotong royong membersihkan saluran air atau parit. Bahkan membersihkan atau memperbaiki rumah-rumah ibadah, penduduk setempat kurang melibatkan diri secara aktif. Keadaan seperti itu terjadi meskipun biasanya dilaksanakan pada hari-hari libur. Berdasarkan pengalaman, mereka yang selalu aktif terlibat dalam kegiatan sosial orangnya tetap yang itu saja, dalam arti kata penduduk yang rajin akan ikut menyempatkan diri ikut bergotong royong, sebaliknya yang lain bersikap tak peduli. Apabila ditanyakan, mereka menjawab dengan berbagai alasan.

Satu hal yang terlihat berkembang dalam masyarakat, bahwa golongan orang kaya tidak pernah ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti: bergotong-royong, membersihkan atau memperbaiki rumah-rumah ibadah, ronda malam bagi keamanan lingkungan dan kegiatan lain yang bersifat sosial biasanya kegiatan demikian dikoordinasikan oleh Kepala Lingkungan setempat, bahkan dalam hal ini Kepala lingkungan sendiri

tidak dapat memotivasi para warganya untuk ikut secara bersama dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan pada lingkungan tempat tinggal mereka. Satu kebiasaan yang terlihat saat ini, bahwa golongan orang kaya, pejabat dan lainnya sering memberikan semacam “upeti” kepada Kepala Lingkungan. Upeti yang dimaksud adalah, apabila ada kegiatan-kegiatan sosial dan saat giliran untuk ronda malam misalnya, untuk tidak ikut melaksanakan kegiatan tersebut mereka memberikan uang melalui Kepala Lingkungan. Dari uang yang terkumpul kemudian didistribusikan melalui beberapa orang untuk menggantikan mereka yang tidak ikut ronda malam. Sehingga dengan demikian kegiatan ronda malam tetap berlangsung. Dengan catatan bahwa penduduk yang tidak membayar atau yang mempunyai kesadaran, mereka akan tetap melakukan ronda setiap terkena giliran.

Dalam hal berbagai kepentingan, misalnya yang menyangkut kepentingan pribadi, kepentingan keluarga maupun kepentingan kelompok etnis terlihat adanya perbedaan yang jelas diantara kelompok etnis yang ada. Terhadap kepentingan pribadi hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yang sangat tergantung kepada situasi dan kondisi maupun kemampuan yaitu dimana mereka bertempat tinggal dan di tempat mereka bekerja. Maksudnya seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa kegiatan bergotong-royong dan ronda malam di lingkungan sekitar tempat tinggalnya apabila kemungkinannya kegiatan tersebut bisa digantikan dengan uang, maka cara ini yang paling banyak ditempuh. Tetapi berbeda dengan masyarakat kebanyakan mereka lebih senang ikut bergotong royong maupun ronda malam walau sebenarnya mereka juga sanggup mengeluarkan sejumlah uang untuk pengganti kegiatan tersebut. Menurut mereka, dengan ikut sertanya mereka dalam berbagai kegiatan sosial tentunya akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitarnya dan apabila ada kesulitan akan memudahkan mendapat bantuan dari masyarakat sekitarnya. Mereka yakin bahwa orang pertama yang dapat membantu apabila ada kesulitan tentunya tetangga terdekat dan sekitarnya. Seandainya mereka tidak ikut terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat

tinggalnya, maka pertolongan atau bantuan pertama dari tetangga sekitarnya tidak akan bisa diharapkan. Hal ini sudah semacam tradisi pada masyarakat kota Medan dewasa ini, yaitu bantuan dan pertolongan para tetangga lebih diutamakan terlebih dahulu dari pada bantuan dan pertolongan keluarga sendiri (Famili).

Berbeda halnya dengan masyarakat yang tergolong elit, bahwa mereka beranggapan pertolongan dan bantuan para tetangga dengan sendirinya akan datang. Walaupun mereka jarang atau tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, namun apabila mereka mendapat kesulitan para tetangga akan segera datang membantu. Sebab masyarakat yang tergolong elit apabila ada kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya yang memerlukan tenaga, mereka menggantinya dengan sejumlah uang. Sehingga dalam pergaulan, terlihat adanya semacam tendensi ekonomis. Dimana, mereka yang cukup punya uang seolah-olah bisa membeli pergaulan dan mengganti sejumlah uang kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, tanpa ikut terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial tersebut.

Pada kelompok etnis Batak Karo dan Toba dalam hal membantu kepentingan keluarga, masih sangat kuat sekali seperti dalam hal membela kepentingan anggota keluarga sampai kepada untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan keluarga sendiri. Sedangkan pada kelompok etnis Jawa, Mandailing, dan Melayu untuk membantu kepentingan keluarga hanya terlihat sepanjang mereka masih bersaudara kandung. Biasanya, bantuan yang diberikan keluarga pada kelompok etnis Jawa, Mandailing, dan Melayu adalah bidang tertentu saja dan melihat kemampuan keluarga itu sendiri. Kalau anggota keluarga yang mengharapkan bantuan tidak mempunyai kemampuan atau tidak punya dasar pendidikan seperti yang diharapkan maka bantuan keluarga sangat sulit untuk diharapkan.

Situasi di atas bermuara kepada kepentingan kelompok atau etnis. Pada umumnya kepentingan kelompok atau etnis yang ada, kurang menonjol hal ini terutama terlihat pada kalangan keluarga yang lahir dan

dibesarkan di Kota Medan. Memang hubungan kekerabatan dengan keluarga di kampung asal masih tetap terjalin. Akan tetapi umumnya para keluarga sangat keberatan apabila ada anggota keluarga yang datang dari kampung dan tinggal bersama mereka, apalagi harus memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kecuali keluarga kandung sendiri. Sehingga dalam hal ini hampir tidak ada diantara keluarga yang menerima anak-anak saudaranya dari kampung untuk bertempat tinggal bersama mereka. Kalaupun ada, misalnya terhadap anak-anak mereka yang bersekolah di Medan dan tinggal di tempat keluarga, biasanya orang tua si anak akan tetap mengirimkan uang dari kampung. Situasi demikian biasanya hanya berlangsung sementara sebab bagi orang tua yang anak-anaknya bersekolah atau kuliah di Medan, akan berpikir bahwa tidak ada manfaatnya untuk menitipkan anak kepada keluarganya di Medan kalau mereka tetap mengeluarkan sejumlah uang setiap bulannya. Apabila demikian keadaannya, dalam arti keluarga sendiri tidak bisa untuk membantu biaya anaknya, maka lebih baik anaknya tersebut kost di tempat lain. Situasi seperti inilah pada umumnya banyak terjadi di kalangan para keluarga kelompok-kelompok etnis yang ada di Medan.

Kepentingan kelompok atau etnis sangat tergantung kepada kepentingan atau kebutuhan setiap anggota-anggota kelompok etnis sendiri, atau bergantung bagaimana pribadi orang yang bersangkutan. Maksudnya kepentingan kepada kelompok etnis sendiri sangat ditentukan oleh kebutuhan anggota-anggota kelompok etnisnya, atau dengan perkataan lain bahwa kepentingan kelompok etnis akan didukung sepanjang kelompok ini turut memberikan andil bagi kepentingan anggota kelompok etnisnya. Pada umumnya terdapat anggota kelompok etnis yang secara pribadi ingin memanfaatkan kekuatan kelompok etnisnya untuk tujuan tertentu. Sebaliknya mereka yang sadar bahwa mereka hanya dijadikan alat untuk tujuan tertentu, biasanya akan acuh terhadap kepentingan kelompok etnisnya. Bahkan tidak jarang mereka akan meninggalkan atau tidak mau bergabung lagi dengan kelompok etnisnya sendiri.

3.4 Interaksi Sosial

Interaksi sosial diantara masing-masing kelompok etnis berlangsung baik dan akrab, walaupun dalam hal ini muncul kecenderungan yang didasarkan kepada adanya stratifikasi sosial menurut pangkat dan status ekonomi seseorang. Maksudnya pergaulan diantara sesama anggota kelompok etnis akan akrab karena status dan kedudukannya setingkat. Mereka yang tergolong masyarakat kebanyakan akan lebih akrab dan intim sesamanya ketimbang dengan mereka yang tergolong elit. Satu hal yang perlu dicatat bahwa interaksi sosial di lingkungan masyarakat bahkan sampai ke tempat mereka bekerja telah menembus batas-batas kelompok etnis atau kesukuan. Artinya pergaulan diantara anggota masyarakat tidak membedakan asal dari kelompok etnis seseorang. Bahkan oleh karena pergaulan, diantara mereka yang berbeda kelompok etnisnya malah sangat akrab dan intim yang seolah-olah seperti keluarga sendiri. Situasi seperti ini tidak hanya berlangsung di lingkungan tempat tinggalnya akan tetapi juga terjadi di tempat mereka bekerja.

Interaksi sosial antara anggota masyarakat, lebih banyak berlangsung dengan kelompok etnis lain dibandingkan dengan kelompok etnisnya sendiri. Hal ini terjadi karena lingkungan sekitarnya dan pada umumnya masyarakat Kota Medan adalah masyarakat yang heterogen. Dalam hubungan keluarga, interaksi sosial yang terjadi sifatnya insidental, bahkan diantara anak sendiri dengan anak keluarganya sangat jarang berkomunikasi walaupun mereka tinggal di kota yang sama. Komunikasi hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya saat lebaran, tahun baru, dan pada pesta perkawinan. Pada saat ada kemalangan keluarga, anak-anak tidak ikut serta yang berarti anak-anak jarang ikut ke tempat keluarga sendiri yang tertimpa musibah. Dalam hal ini banyak alasan, misalnya mereka bersekolah atau sengaja tinggal untuk menjaga rumah.

Interaksi sosial dengan kelompok etnisnya sendiri dalam berbagai hal selalu tidak terikat, kecuali pada etnis Karo yang masih terikat dengan

tradisi dan kampung halamannya. Pada kalangan kelompok etnis Karo terdapat suatu tradisi yaitu pesta tahunan yang dikenal dengan istilah *merdang merdem*. Upacara *merdang merdem* ini diselenggarakan sekali dalam setahun di setiap desa yang ada di Kabupaten Karo yaitu daerah kelahiran atau daerah asal bagi masyarakat Karo yang sekarang bermukim di Kota Medan. Dalam setahun itu pelaksanaan kerja tahun berpindah atau bergilir, misalnya tanggal atau bulan ini dilaksanakan di desa A, maka tanggal dan bulan berikutnya di desa B dan begitu seterusnya. Pada saat kerja tahun tersebut warga Karo yang berada di Kota Medan akan pulang kampung, apalagi jika kerja tahun saat dilaksanakan di kampung asal mereka.

Pada kelompok etnis Batak Karo dan Toba di lingkungan tempat tinggalnya, interaksi sosial dengan kelompok etnisnya sendiri baru akan berlangsung apabila ada upacara adat, seperti saat upacara adat perkawinan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak terjadi bahwa secara pribadi mereka sengaja berkumpul. Dalam hal ini stratifikasi sosial masyarakatnya juga turut berperan, seperti pada masyarakat kebanyakan: kelompok etnis Batak Karo, Toba dan Mandailing adakalanya mereka berkumpul di warung yang menjual minuman. Pada etnis Batak Toba, mereka biasanya berkumpul di warung yang menjual minuman *tuak* dan sambil bermain catur atau bermain kartu yang hanya untuk sekedar minum-minum dan bercengkerama. Namun, sebagai pejabat atau yang tergolong elit tidak demikian halnya, mereka tidak pernah duduk dan berkumpul di warung-warung yang menjual minuman sekitar tempat tinggalnya.

Pada saat diadakan pesta adat, umumnya etnis yang ada mereka akan datang apabila diundang. Pada kelompok etnis Batak Karo dan Toba saat mengadakan upacara perkawinan, biasanya dicetak undangan yang berbentuk stensil untuk mengundang seluruh kaum kerabatnya dari pihak keluarga yang menyelenggarakan pesta tersebut.

Pada kelompok etnis Jawa, Mandailing, dan Melayu interaksi sosial yang berkaitan dengan kelompok etnisnya sendiri hampir tidak kelihatan.

Hanya pada etnis Mandailing terdapat perkumpulan sosial yang berdasarkan marga maupun berdasarkan asal kelahiran mereka di daerah Tapanuli Selatan. Perkumpulan itu seperti: Persadaan Rangkuti dohot boruna, Persadaan Ritonga dohot boruna, Perkumpulan Warga Padang Bolak di Medan, dan perkumpulan lainnya yang sejenis. Kegiatan perkumpulan ini biasanya dilaksanakan dari rumah ke rumah para anggotanya yang berupa arisan sebulan sekali. Namun, ternyata tidak semua yang bermarga Rangkuti maupun Ritonga seperti disebutkan contoh di atas yang ikut aktif menjadi anggota, umumnya adalah pegawai negeri atau mereka yang tingkat sosial ekonominya sudah lebih baik. Apabila anggota suatu perkumpulan mayoritas pegawai negeri, maka mereka yang bukan pegawai negeri seperti penarik beca, tukang dan buruh kasar lainnya, mereka ini pada umumnya tidak ikut menjadi anggota perkumpulan walaupun mereka sekampung atau semarga sekalipun.

Sebaliknya pada kelompok etnis Jawa dan Melayu tidak terdapat perkumpulan yang berdasarkan kelompok etnis. Secara umum terlihat bahwa perkumpulan yang didasarkan kepada marga maupun asal daerah kelahiran keadaannya tidak menyeluruh, yaitu hanya dibentuk dan diikuti oleh beberapa keluarga saja. Biasanya, yang terdaftar sebagai anggota cukup banyak yakni sampai ratusan orang, akan tetapi yang aktif dan selalu hadir dalam pertemuan setiap bulannya hanya sedikit saja dan orang-orangnya juga tetap sama.

Terlihat bahwa kepentingan para anggota masyarakat dengan kelompok etnisnya pada umumnya tidak kuat. Atau dengan kata lain para anggota masyarakat sudah lebih bersifat selektif dan kritis dalam menilai kepentingannya sendiri dengan kepentingan kelompok etnisnya dalam skala yang lebih luas. Pada umumnya mereka yang paling berminat dan antusias dalam mengikuti perkumpulan bagi kepentingan kelompok etnisnya adalah mereka yang tingkat kehidupannya sudah lebih teratur atau status ekonominya sudah baik, namun disamping itu terkadang ada motif-motif lain untuk memanfaatkan anggota kelompoknya melalui perkumpulan yang ada bagi tujuan-tujuan tertentu

3.5 Koflik

Meskipun penduduk kota Medan heterogen dengan kelompok-kelompok etnis yang ada pada umumnya kehidupan mereka menyebar, akan tetapi di lingkungan tertentu ditemukan juga satu kelompok etnis yang mayoritas. Sementara di tempat bekerja seperti di instansi pemerintah maupun swasta tidak ada kelompok etnis yang mayoritas.

Di tempat bekerja, persaingan untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu didasarkan kepada kemampuan seseorang dalam bidangnya, misalnya didasarkan kepada pangkat, kecakapan, dan loyalitas seseorang. Sehingga tidak ditemukan persaingan untuk mengangkat seseorang yang didasarkan kepada penilaian karena satu kelompok dengan etnisnya, keluarga sendiri, dan sebagainya. Akibat dari situasi demikian maka pergaulan diantara sesama pegawai atau karyawan di suatu instansi, terlihat intim dan terbuka. Dengan kata lain bahwa tidak ada perbedaan diantara mereka yang bekerja di tempat-tempat tertentu yang didasarkan atas kelompok etnis maupun keluarga.

Di sekitar lingkungan yang tidak ada kelompok etnis sebagai mayoritas, mereka saling menyesuaikan diri atau saling beradaptasi sesamanya. Masing-masing warga masyarakat saling menjaga dan menghormati warga lainnya baik dalam adat istiadat maupun agama yang dianutnya. Sementara di sekitar lingkungan yang terdapat kelompok etnis tertentu sebagai mayoritas, maka kelompok etnis yang minoritas menyesuaikan diri terhadap etnis yang mayoritas. Sehingga dalam kehidupan penduduk sehari-harinya tidak pernah terjadi konflik diantara sesama warga. Bagi penduduk yang minoritas sekalipun tidak pernah merasa dikucilkan atau terisolasi oleh kelompok etnis yang mayoritas. Situasi demikian terutama disebabkan terdapatnya sikap acuh atau kurang perhatiannya terhadap kehidupan sosial diantara masing-masing warga. Hal ini berarti, bahwa sifat individualisme secara sadar atau tidak disadari memang tumbuh di kalangan warga masyarakat. Dalam kaitan ini misalnya kegiatan bergotong royong tidak ditemukan lagi dan hubungan tatap muka secara

langsung diantara sesama penduduk sudah jarang terjadi.

Heterogenitas penduduk seperti yang terlihat dalam hal komposisi kelompok etnis yang ada, pada akhirnya menunjukkan perbedaan diantara sesama warga penduduk, seperti perbedaan tingkat sosial ekonomi dan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sifat individualisme yang sudah tampak tumbuh di kalangan warga masyarakat dan sikap acuh terhadap setiap kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, ini menunjukkan bahwa toleransi sosial maupun jarak sosial sudah mewarnai pergaulan hidup warga masyarakatnya. Tingkat pendidikan dan perbedaan status sosial ekonomi warga masyarakat telah mengakibatkan sangat kurangnya perhatian dan kontak-kontak diantara sesama anggota masyarakat sehingga menciptakan adanya jarak sosial sebab mereka acuh sesamanya dan kurang punya toleransi sosial.

Persaingan yang tampak di lingkungan masyarakat adalah dalam usaha mengejar kebutuhan ekonomi yaitu dalam hal persaingan untuk menaikkan status sosial ekonomi. Hal ini dilakukan tanpa disadari menimbulkan persaingan karena tujuannya adalah untuk menutupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, baik kebutuhan yang sifatnya primer maupun sekunder termasuk untuk membiayai pendidikan anak-anak. Sehingga masing-masing anggota masyarakat sibuk oleh tuntutan tersebut, yang pada gilirannya sekaligus untuk menaikkan status sosial ekonominya. Mereka berkeyakinan bahwa dengan keberhasilan dalam bidang ekonomi secara praktis akan menaikkan status sosialnya di lingkungan masyarakat. Apalagi bila mereka berhasil untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi dan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lumayan.

Berdasarkan uraian di atas, dengan sendirinya persaingan diantara masing-masing warga masyarakat tidak mengakibatkan sampai adanya konflik. Kerja keras untuk menaikkan taraf kehidupan sosial ekonomi ini terutama terlihat pada kalangan masyarakat kebanyakan, sehingga merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka yang mata pencahariannya sehari-hari hanya sebagai penarik beca akan tetapi mereka berhasil

menyekolahkan anaknya sampai berhasil meraih gelar sarjana.

3.6 Benda-benda Kerajinan

Secara umum, kelompok etnis yang ada sangat minim memiliki benda-benda kerajinan kelompok etnisnya sendiri, bahkan ada kelompok etnis yang tidak memiliki benda-benda kerajinan dari etnisnya sendiri. Sebaliknya ada pula kelompok etnis tertentu yang menyimpan dan memamerkan benda-benda kerajinan kelompok etnis lainnya.

Pada kelompok etnis Karo, mereka masih memiliki benda-benda kerajinan etnisnya sendiri. Benda kerajinan tersebut disimpan dengan rapi di dalam lemari dan hanya pada saat-saat tertentu dikeluarkan atau dipergunakan. Misalnya apabila ada pesta adat atau ada diantara keluarga (kelompok etnis sendiri) yang meminjamnya untuk dipergunakan pada suatu pesta yang akan diselenggarakan. Diantara benda kerajinan itu, seperti yang dimiliki oleh kelompok etnis Karo adalah benda-benda pusaka keturunan nenek moyangnya seperti: pisau, kain adat (uis), gelang-gelang, dan benda-benda lainnya. Benda-benda kerajinan sebagai milik kelompok etnisnya berfungsi etis.

Selain benda kerajinan adat yang masih dimiliki dan disimpan oleh etnis Karo, mereka juga memiliki benda-benda kerajinan kelompok etnis lainnya seperti benda-benda kerajinan milik etnis Jawa, Minangkabau, Batak Toba, dan dari daerah lainnya. Benda-benda kerajinan tersebut seperti: gambar wayang (kerajinan etnis Jawa), miniatur rumah adat Minangkabau, ulos Batak Toba, bahkan benda-benda kerajinan asal Yogyakarta, Bali dan Sulawesi tidak jarang juga mereka miliki. Benda-benda kerajinan milik kelompok etnisnya disimpan dalam lemari, akan tetapi benda-benda kerajinan yang mereka miliki berasal dari etnis yang lain, pada umumnya di letakkan pada ruang tamu rumah mereka.

Seperti halnya pada keluarga etnis: Karo, Melayu, Mandailing, dan Batak Toba, yang pada umumnya masih memiliki benda-benda hasil kerajinan kelompok etnisnya dan juga memiliki benda kerajinan dari etnis

lainnya. Para keluarga etnis Melayu, mereka tetap memiliki benda-benda kerajinan suku bangsanya sendiri seperti: kain songket, baju teluk belanga, destar atau tengkuluk (untuk penutup kepala pada pesta-pesta adat), baju kebaya, tepak sirih, dan balai. Benda-benda kerajinan tersebut pada umumnya dimiliki oleh hampir setiap keluarga kelompok etnis Melayu. Selain itu mereka menyimpan pula pisau *tumbuk lada*, yaitu pisau tumbuk lada ini merupakan benda kerajinan kelompok etnis Karo.

Pada kelompok etnis Batak Toba, mereka memiliki benda kerajinan terutama kain *ulos*. Sedangkan kelompok etnis Mandailing selain mereka menyimpan ulos juga terdapat *bulang* (penutup kepala pengantin pria) dan benda kelengkapan upacara perkawinan lainnya. Kelompok etnis Mandailing banyak menyimpan kain adat kelompok etnis lain, seperti songket: Palembang, Makasar, Bali, dan kain songket lainnya. Pada ruangan tamu rumah mereka sering diletakkan benda-benda kerajinan kelompok etnis lain, seperti: kipas asal Bali, benda kerajinan yang terbuat dari kuningan asal Yogyakarta, miniatur pisang Bali, miniatur rumah adat Toraja, dan miniatur rumah adat Minangkabau. Lain halnya pada keluarga etnis Jawa, sebab mereka tidak memiliki benda-benda kerajinan etnisnya sendiri. Bahkan seperti blangkon dan hiasan-hiasan wayang yang merupakan khas benda kerajinan Jawa, tidak terdapat di rumah mereka.

Pemilikan terhadap benda-benda kerajinan kelompok etnis sendiri oleh masing-masing keluarga terlihat sangat ditentukan oleh status sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Artinya bahwa pada keluarga yang status sosial ekonominya baik, pada umumnya mereka menyimpan benda kerajinan kelompok etnisnya sendiri. Keadaan ini dimungkinkan karena mereka memang mampu untuk membelinya, sebab benda-benda kerajinan tersebut terutama yang berhubungan dengan upacara adat harganya cukup mahal. Sehingga pada masyarakat kebanyakan, tidak sanggup untuk membelinya. Selain itu, benda-benda kerajinan demikian bagi kalangan masyarakat lapisan bawah kurang dibutuhkan dalam arti tidak bermanfaat sama sekali. Sementara bagi kalangan keluarga mampu atau

status sosial ekonominya baik, apabila mereka memiliki benda kerajinan kelompok etnisnya dianggap dapat menaikkan status sosial di lingkungan kelompok etnisnya sendiri.

Kecenderungan kelompok etnis tertentu untuk menyimpan dan memiliki benda-benda kerajinan dari kelompok etnis lain, merupakan kebanggaan dan untuk menunjukkan status sosial ekonomi mereka pada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Semakin tinggi status sosial ekonomi sebuah keluarga di lingkungan masyarakat, akan semakin banyak pula mereka memiliki benda kerajinan baik dari etnisnya sendiri maupun dari etnis lainnya. Adakalanya benda kerajinan tersebut sebagai pertanda bahwa mereka pernah mengunjungi tempat-tempat dari mana asal benda kerajinan itu. Jika demikian halnya maka sudah barang tentu bagi keluarga masyarakat lapisan bawah selain mereka tidak sanggup untuk membeli benda kerajinan tersebut, tetapi bagi mereka tidak akan memaksakan diri untuk dapat memilikinya.

BAB IV

PRANATA SOSIAL SEKOLAH

Keadaan masyarakat Kota Medan yang heterogen terlihat pula di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Pada daerah penelitian ini tergolong paling lengkap lembaga-lembaga pendidikannya, termasuk kursus-kursus dalam beraneka ragam pendidikan dan pengetahuan. Pada wilayah Medan Baru ini terdapat 6 buah SD Negeri, 6 buah SD Inpres, 1 buah Madrasah, 2 buah SD Swasta Umum, dan masing-masing 1 buah SD Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.

4.1 Sekolah Dasar (SD)

Pada tingkat Sekolah Dasar yang diambil menjadi sampel penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri Percobaan, terletak di jalan Sei Petani No. 19 Medan. Sekolah Dasar ini salah satu dari 20 Sekolah Dasar Percobaan yang ada di Indonesia, dan satu-stunya ada di Sumatera Utara. Sementara SD Percobaan lainnya yang ada di Pulau Sumatera hanya terdapat di Bukit Tinggi dan di Padang (Sumatera Barat), masing-masing 1 buah di Bali, Palangkaraya dan Ujung Pandang, selebihnya berada di Pulau Jawa (14 buah).

Sebagai Sekolah Negeri Percobaan yang merupakan unit pelaksana teknis pendidikan formal, statusnya adalah sekolah negeri yang penyelenggaraannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tugasnya adalah melaksanakan pendidikan formal bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekolah mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan tingkat dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sekolah menjalin hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat serta melaksanakan urusan rumah tangga sekolah. Sehingga dengan memperhatikan tugas dan fungsi SD Percobaan ini ternyata tidak ada perbedaannya dengan SD lain pada umumnya, dan penyelenggaraannya juga tidak berbeda. Kecuali, SD Percobaan ini merupakan alternatif misi yang diharapkan sebagai wahana uji coba konsep pembinaan pendidikan dasar dalam rangka diseminasi terhadap hasil-hasil pembaharuan dan sebagai model atau percontohan yang dapat mengimbas ke sekolah-sekolah sekelilingnya.

Sekolah Dasar Negeri Percobaan jalan Sei Petani Medan, berdiri sejak tahun 1950. Pada saat ini muridnya berjumlah 383 siswa, guru yang mengajar berjumlah 23 orang diantaranya 14 orang adalah guru honor, serta 3 orang tenaga administrasi, dan seorang Kepala Sekolah. Pada Sekolah ini tidak mempunyai wakil Kepala Sekolah. Adapun proses belajar-mengajar di SD Percobaan ini berorientasi pada kurikulum Sekolah Dasar yang berlaku.

Tujuan pendidikan dasar sebagai wahana proses pendidikan formal yaitu untuk mengembangkan sikap dan kemampuan bagi anak didik dengan memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan dasar untuk bekal selanjutnya di pendidikan menengah. Sehubungan dengan hal itu SD Negeri Percobaan ini, dalam penerimaan murid baru setiap tahun ajarannya melakukan penyeleksian, walaupun sebenarnya seleksi tersebut belumlah punya dasar atau kriteria yang tegas.

Dari segi umur, seorang calon murid sekurang-kurangnya berusia 6

tahun, dan apakah calon anak didik telah menempuh Taman Kanak-kanak terlebih dahulu bukanlah merupakan persyaratan. Tegasnya, seorang murid dapat diterima tanpa harus terlebih dahulu menempuh sekolah Taman Kanak-kanak (TK). Adapun persyaratan penerimaan murid baru, hanya tergantung kepada kapasitas ruang atau jumlah bangku belajar yang tersedia. Sementara, apabila jumlah calon murid yang mendaftar melampaui kapasitas lokal belajar yang ada maka dalam hal inilah dilakukan penyeleksian dengan cara pendekatan-pendekatan tertentu. Diantara cara pendekatan tersebut misalnya dengan memperhatikan para calon murid seperti: penampilan, tingkat keberanian dan kecerdasan. Artinya seleksi yang dilakukan tanpa memandang apakah orang tua calon anak didik pejabat atau hanya penarik beca, dan kaya atau miskin. Hal ini dibuktikan bahwa murid-murid SD Negeri Percobaan, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yaitu: anak seorang penarik beca, pedagang, Dosen, sampai pada anak pejabat. Sehingga apabila diperhatikan setiap harinya murid-murid sekolah ini diantar jemput dengan mempergunakan: mobil, beca, bus, dan bahkan pakai sepeda atau jalan kaki. Sementara, para siswa yang bersekolah di sini, tidak seluruhnya berdomisili di Kecamatan Medan Baru.

Dengan memperhatikan latar belakang para siswa yang sekolah, jelas menunjukkan bagaimana suasana kelas yang dihadapi oleh para guru dalam menyelenggarakan proses belajar-mengajarnya. Keadaan murid yang beraneka ragam tersebut menuntut berbagai tingkat kemampuan, ketekunan, perhatian, dan kesabaran dari para guru untuk mengembangkan sikap dan kemampuan anak-anak dalam mencapai sasaran pendidikan, yaitu agar anak-anak didik memperoleh perubahan pengetahuan yang diharapkan. Hal ini sangat penting terutama disebabkan anak-anak didik yang saling berbeda latar belakangnya satu sama lain seperti latar belakang: keluarga, sosial budaya, sosial ekonomi, maupun lingkungannya. Sementara para anak didik tersebut merupakan individu-individu yang berbeda baik disebabkan faktor pembawaan maupun lingkungannya (mileu).

Dalam proses belajar mengajar yang berlangsung, tidak terdapat kesulitan yang berarti dalam menghadapi para anak didik terutama ketika menyampaikan pelajaran. Para siswa semuanya menggunakan bahasa Indonesia, walaupun berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai suku bangsa mereka tidak lagi mampu berbahasa daerahnya. Sehingga di sekolah juga tidak terdengar anak-anak yang berbicara dalam bahasa daerah, keadaan ini sangat membantu para guru dalam proses belajar-mengajarnya.

Keaneka ragam latar belakang murid sekolah ini seperti perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan lingkungannya ternyata dalam pergaulannya sehari-hari tidak terlihat adanya kesenjangan sosial. Mereka yang berbeda status sosialnya bisa akrab dan intim dalam bergaul. Keadaan ini merupakan salah satu perkembangan proses belajar-mengajar yang diemban para guru yaitu dalam hal pembinaan sikap para murid. Suasana pergaulan yang akrab pada kalangan murid juga ditumbuhkan lewat kelompok-kelompok belajar, sebab dalam prakteknya mereka yang dikelompokkan dalam suatu kelompok tanpa membeda-bedakannya.

Adapun kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar-mengajar adalah dalam hal *output* pengajaran, yaitu perubahan yang diharapkan oleh murid-murid terutama perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam perubahan pengetahuan yang diharapkan, adalah seperti tugas mengerjakan PR (pekerjaan rumah) oleh para siswa. Sebab pada kenyataannya, setiap PR yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik oleh para siswa. Namun, hal ini sering menjadi tanda tanya bagi para guru dimana ditemukan ketidakseimbangan hasil PR murid dengan kenyataan kemampuan mereka sehari-hari di dalam kelas. Bahkan adakalanya PR yang dikerjakan di rumah hasilnya baik, namun apabila diminta untuk mengerjakan kembali oleh guru di sekolah ternyata para siswa tidak mampu mengerjakannya. Masalahnya dalam hal ini karena PR dapat dikerjakan di rumah secara bergotong royong dan adakalanya dikerjakan oleh kakak atau abangnya dan bahkan tidak jarang pula dikerjakan oleh orang tuanya. Hal ini memang diakui oleh para siswa, bahwa mereka tidak

mengerti apa yang diterangkan oleh gurunya di sekolah, namun mereka tidak pernah bertanya kepada guru. Tegasnya, para siswa hanya menerima pelajaran begitu saja walau mereka tidak memahaminya. Sedangkan tugas pelajaran yang disuruh dikerjakan di rumah (PR) ternyata bukan dikerjakan sendiri oleh siswa, melainkan dikerjakan oleh kakak atau abangnya, sedangkan sebagai siswa sendiri tinggal memindahkan saja pada buku PR nya. Hal demikian berarti sebagai kakak atau abang tidak mendidik adiknya atau tidak berlangsung pengembangan daya nalar dan kemampuan para siswa pada tingkat Sekolah Dasar. Masalahnya sama jika terdapat para orangtua yang ikut mengerjakan PR anaknya di rumah.

Ada satu hal yang unik ditemukan, yaitu terdapat pada beberapa murid yang ternyata lebih rendah kelasnya namun tidak sanggup dibantu oleh kakaknya yang lebih tinggi kelasnya. Misalnya seorang murid kelas 3 (tiga) tidak sanggup dibantu oleh kakaknya yang sudah duduk di kelas 4 (empat) atau kelas 5 (lima) dalam mengerjakan suatu PR yang ditugaskan, hal ini lebih sering terjadi pada mata pelajaran matematika. Keadaan seperti ini terutama disebabkan buku yang tidak seragam dipergunakan dan sering berganti pada setiap tahunnya sehingga istilah-istilah yang ada juga bermacam-macam. Buku yang dipakai oleh para siswa sekarang tidak sama dengan buku yang akan dipakai pada tahun berikutnya, baik pengarang maupun penerbitnya. Bahkan, antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya pemakaian buku sering tidak seragam. Akibatnya para orang tua murid setiap tahun ajaran baru harus membeli buku baru lagi, karena buku yang telah dipakai pada tahun sebelumnya oleh kakak atau abangnya misalnya, tidak dapat dipergunakan oleh adiknya walau buku tersebut masih baru. Akibat dari hal itu semua, mengakibatkan kesulitan para kakak atau abangnya untuk membantu pelajaran para adiknya di rumah, sebab buku yang pernah dipakai oleh kakak atau abangnya tidak sama dengan buku yang dipakai oleh adiknya sekarang ini, jadi materi pelajarannya juga agak berbeda. Kesulitan tersebut juga dialami oleh para orang tua untuk membantu anaknya pada saat belajar di rumah, misalnya membantu pelajaran matematika. Pada umumnya

orang tua murid tidak pernah mengecap mata pelajaran matematika, kecuali mata pelajaran yang dikenal dengan nama Aljabar. Sehingga sering para orang tua murid kesulitan untuk membantu belajar anak-anaknya karena istilah-istilah dan rumus-rumus Matematika tidak pernah mereka pelajari semasa bersekolah.

Kasus seperti di atas hanya merupakan salah satu contoh tentang hal-hal yang terjadi pada lingkungan keluarga mengenai proses belajar anak-anak didik. Namun keadaan tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju perkembangan pendidikan.

Para anak sekolah pada tingkat Sekolah Dasar dewasa ini seolah-oleh terlalu cepat terorbit, dimana para murid seakan-akan dikontrol atau dipacu untuk harus mampu mengikuti macam-macam mata pelajaran tertentu. Sebaliknya, kepada mereka seperti terabaikan bahwa di tingkat Sekolah Dasar ini adalah merupakan upaya pemberian pengetahuan dasar. Dalam hal ini, kurikulum yang dipakai sekarang ini sebagai acuan dasar dari sistem pengajaran sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Jika sampai pada tahun 1970-an murid-murid masih memperoleh mata pelajaran menulis halus kasar dengan segala teknik dan cara yang dilatih secara seksama oleh guru, tetapi mata pelajaran tersebut pada saat ini tidak ada. Akibatnya yang terlihat, bahwa tulisan anak-anak didik menjadi tidak rapi. Apalagi anak-anak didik mulai dari kelas dua sudah mulai mempergunakan pulpen untuk menulis.

Para murid dalam hal pemakaian buku selalu tidak hemat, yaitu banyak diantara murid yang mempergunakan halaman buku secara selang-seling sehingga terlihat para murid dengan sesuka hatinya menulis di halaman-halaman buku tulisnya. Bahkan adakalanya buku yang belum habis halamannya untuk ditulisi, sudah menggantinya dengan buku baru. Pada umumnya buku-buku murid tidak terjaga dengan baik, yaitu sering terjadi buku-buku murid hilang kemudian oleh orang tuanya dengan mudah membelikan buku yang baru.

Kemampuan berhitung para murid Sekolah Dasar sangat rendah. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya lagi murid-murid ditugaskan untuk

menghapal perkalian yang secara bergiliran disuruh satu per satu di depan kelas. Kesulitan berhitung para murid ada pula kaitannya dengan buku tulis yang tersedia di pasaran pada saat ini. Walaupun diakui kualitas dan juga secara kuantitas buku-buku tulis yang ada sekarang ini sangat baik tetapi juga merugikan anak-anak. Pada saat ini kita tidak ada lagi menemukan buku-buku tulis yang mencantumkan di kulit belakangnya perhitungan perkalian mulai dari satu sampai sepuluh. Tetapi yang ditemukan adalah gambar-gambar penyanyi, bintang filem, gambar boneka, robot, dan gambar-gambar lainnya yang tidak ada gunanya bagi kepentingan para murid.

Oleh karena para anak didik tidak dipaksakan lagi untuk menghadapi perkalian, maka timbul kesulitan dalam belajar matematika khusus untuk memecahkan soal-soal yang ada. Sehingga dalam hal ini sering terjadi para anak didik, menempuh jalan pintas dengan mempergunakan kalkulator. Hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena penggunaan alat hitung ini tidak dibenarkan di sekolah. Anehnya para orang tua murid seolah-olah merasa bangga apabila anaknya mempergunakan kalkulator untuk berhitung, membagi, dan mengalikan dalam mengerjakan PR sekolahnya.

Para guru SD Negeri Percobaan Jalan Sei Petani ini mayoritas adalah guru wanita, dan tidak sedikit para guru yang berhenti karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau karena berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi lalu mencari pekerjaan lain yang dianggap menjadi guru sekolah dasar bagi seorang sarjana sudah tidak sesuai lagi dengan dirinya. Hal ini sering terjadi pada guru-guru honor. Sementara lebih banyaknya tenaga guru wanita turut mempengaruhi proses belajar-mengajar dimana ada untung dan ruginya. Sebagai tenaga pendidik seorang guru wanita lebih sabar menghadapi anak-anak didiknya karena didukung oleh naluri kewanitaannya serta kodratnya sebagai wanita dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang mendidik anak-anaknya. Kerugian yang ditemukan pada seorang guru wanita menyangkut kepentingan sekolah khususnya. Maksudnya seorang guru wanita, jika ia masih

gadis maka tidak jarang mereka berhenti menjadi guru apabila mereka sudah menikah atau dibawa oleh suaminya ke kota lain atau karena kebetulan suaminya pindah tugas, dimana sebagai sorang istri terpaksa harus ikut suami. Adapun tingkat pendidikan guru SD Percobaan ini adalah sarjana muda, SGKP, SPG, PGSMTP, SGO, PGSLP, PGAKE, SMEA, SMA dan STN.

Guru-guru honor banyak membantu proses belajar-mengajar, di samping tenaganya dimanfaatkan dalam bidang-bidang pelajaran ekstra-kurikuler. Hal ini dimaksudkan untuk pengembangan keterampilan dasar murid-murid seperti menari, menyulam, pramuka, kesenian, dan olahraga. Dengan keterampilan dasar yang diberikan diharapkan apabila mereka drop out dari sekolah setidaknya-tidaknya mereka sudah memiliki modal pengetahuan dasar untuk bisa mandiri di kemudian hari.

Sekolah Dasar sebagai lembaga pendidikan formal terendah, tetapi yang paling menentukan peranannya untuk pengembangan watak dan sikap generasi selanjutnya sebab mulai dari jenjang pendidikan dasar inilah ditanamkan berbagai nilai yang sangat mendasar.

Pada umumnya anak-anak didik tingkat Sekolah Dasar jiwanya masih polos, mereka patut dan rajin untuk mengerjakan setiap tugas yang disuruh oleh guru. Misalnya menyapu halaman sekolah, membersihkan ruangan sekolah dan mengikuti upacara-upacara. Anak-anak murid sangat disiplin, mereka tetap mengerjakan PR nya, lebih cepat pergi ke sekolah apabila mendapat giliran menyapu dan membersihkan sekolah pada pagi hari sebelum masuk sekolah.

Anak-anak murid bergaul akrab sesamanya tanpa memperlihatkan perbedaan status sosial, ekonomi, agama. Sementara dalam upaya membentuk sikap dan menciptakan perubahan sikap bagi para murid tersebut, juga tidak mengenyampingkan sanksi-sanksi bagi murid yang melanggar peraturan sekolah atau yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Misalnya dengan memberikan hukuman berdiri di depan kelas apabila ada murid yang nakal karena ribut, tidak mengerjakan PR, dan tidak membawa perlengkapan sekolah.

Dalam pelaksanaan program pembinaan sekolah, agar dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien diperlukan berbagai penunjang yaitu disamping tenaga guru dan administratif juga termasuk dana. Sehubungan dengan dana ini peranan dari BP3 adalah sangat besar sekali, karena secara tidak langsung membantu proses belajar mengajar para guru, terutama peranannya dalam hal kesejahteraan guru khususnya guru-guru honor yang mengajar mata pelajaran ekstra-kurikuler, karena honorarium mereka berasal dari dana BP3. Dengan demikian peranan Kepala Sekolah sangat besar, karena harus menjalin kerja sama dengan instansi terkait khususnya Depdikbud dan masyarakat terutama para orang tua murid. Meskipun uang BP3 cukup tinggi, tetapi pada umumnya para orang tua tidak ada yang mengeluh karena uang yang dibayarkan dengan istilah uang pembangunan tersebut akan dipergunakan bagi kepentingan anak-anak mereka sendiri. Sehubungan hal tersebut, maka seorang Kepala Sekolah selain sebagai seorang pendidik juga adalah seorang administrator dan pengambil keputusan yang harus mampu memperhitungkan besarnya jumlah anggaran biaya yang diperlukan setiap tahunnya. Sebab dari uang BP3 ini sangat menunjang untuk membantu para guru meningkatkan proses belajar-mengajar, selain untuk honorarium guru honor juga termasuk pengadaan pakaian seragam guru yang digunakan sehari-hari pada waktu mengajar.

4.2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Sekolah yang menjadi sampel untuk tingkat SLTP dalam penelitian ini adalah SMP Kemala Bhayangkari I Medan. Sekolah ini terletak di jalan Sei Batu Gingging yang merupakan suatu yayasan dan dikelola oleh Kapolda (Kepala Polisi Daerah) Sumatera Utara. Sekolah ini sudah mulai menerima murid baru sejak tahun 1964, sedangkan untuk SD Kemala Bhayangkari I Medan sudah mulai dibuka pada tahun 1952.

Keadaan murid sekolah ini dalam tahun ajaran 1992/1993 berjumlah 358 siswa dengan rincian 172 siswa laki-laki dan 186 siswa perempuan.

Dari keseluruhan siswa tersebut hanya 76 orang anak anggota Polri, selebihnya adalah anak-anak yang orang tuanya bukan anggota Polri. Mayoritas anak-anak yang bersekolah di SMP Kemala Bhayangkari adalah beragama Islam (78,21%) dan selebihnya beragama Kristen (21,79%). Di sekolah ini, gurunya berjumlah 25 orang, diantaranya 18 orang merupakan guru honor.

Penerimaan murid baru setiap tahunnya disesuaikan berdasarkan daya tampung lokal (kelas) yang tersedia. Apabila calon siswa yang mendaftar sudah cukup dengan kapasitas ruang yang tersedia maka segera ditutup pendaftaran.

Oleh karena sekolah ini merupakan Yayasan Polri, maka biaya uang sekolah para anak anggota Polri lebih murah dibanding dengan anak-anak yang orang tuanya bukan anggota Polri. Memang selisih biaya uang sekolah tersebut tidak terlalu besar. Pada dasarnya sekolah ini dimaksudkan khusus diperuntukkan bagi para orang tua yang statusnya anggota Polri.

Sesuai dengan kurikulum yang ada, maka dalam ekstra kurikuler terdapat kegiatan-kegiatan seperti drum band, pramuka, olah raga dan kesenian. Sementara itu terdapat tambahan pelajaran pada sore hari (sekolah ini hanya menyelenggarakan pendidikan pada pagi hari) berupa pemberian les mata pelajaran tertentu, terutama bagi anak-anak murid kelas 3 yang akan mengikuti EBTA/EBTANAS. Ini dilakukan berdasarkan permintaan para orang tua siswa, dan untuk itu dikutip bayaran yang pengelolaannya diatur oleh Kepala Sekolah dan guru-guru.

Sebelum para siswa mulai mengikuti pendidikan mereka terlebih dahulu mengikuti penataran P4. Selama penataran yang berlangsung seminggu para siswa mulai bergaul sesamanya. Kegiatan penataran ini merupakan transisi dan suasana baru yang belum pernah dialami oleh anak-anak selama mereka bersekolah di Sekolah Dasar.

Sejalan dengan perkembangan usia anak-anak dan pergaulan yang semakin luas di tingkat sekolah menengah ini maka pola berpikir anak-anak juga semakin luas yaitu dihadapkan dengan keanekaragaman

teman-teman sepergaulan siswa di sekolah. Mereka mulai memilih teman-teman yang intim dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, siswa laki-laki dengan siswa laki-laki dan siswa perempuan dengan siswa perempuan. Pergaulan mereka tidak jarang berlanjut sampai ke tengah-tengah keluarga mereka masing-masing tanpa mengenal perbedaan kelompok suku bangsa. Jadi satu hal yang terlihat dalam pergaulan siswa bahwa secara umum tidak mengenal perbedaan atau batasan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan tingkat status ekonomi, dan kelompok etnis. Untuk pembinaan mental para siswa, sekali dalam sebulan diselenggarakan pengajian bagi murid-murid yang beragama Islam yang dilaksanakan pada pagi hari Minggu.

Hubungan antar pihak sekolah dengan para orang tua siswa berjalan lancar. Secara teoritis terjadwal bahwa sekali dalam sebulan diadakan pertemuan pihak sekolah dengan para orang tua siswa, tetapi dalam prakteknya program ini tidak berjalan. Bahkan pertemuan sekali per semester juga hanya sedikit para orang tua murid yang datang. Para orang tua siswa hanya akan datang ke sekolah anaknya apabila dipanggil oleh pihak sekolah misalnya karena anaknya terlibat perkelahian, melanggar disiplin, amoral, tidak membayar uang sekolah, dan sebagainya.

Pada umumnya para siswa tidak berani bertindak untuk melanggar tata tertib sekolah yang berlaku, sebab setiap siswa yang melanggar peraturan apalagi terlibat perkelahian, pihak sekolah dengan mudah akan memasukkan anak-anak tersebut ke penjara Brimob yang persis berada di belakang sekolah.

Kegiatan-kegiatan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) yang melibatkan para siswa menambah luasnya pergaulan dan keterampilan para siswa. Berbagai kegiatan OSIS SMP Kemala Bhayangkari 1 Medan diantaranya:

1. Penataran P4 yang dilaksanakan selama seminggu
2. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini diadakan peringatan hari-hari besar baik agama Islam maupun Kristen serta pengajian agama Islam secara rutin pada hari

Minggu pagi setiap minggu ketiga.

3. Kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kegiatan menyambut Proklamasi Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Kartini, Hardiknas dan Harkitnas.
4. Kepribadian dan budi pekerti luhur, yaitu kegiatan bantuan kemandangan, kunjungan ke rumah guru atau siswa yang sakit, dan melayat ke tempat kemandangan.
5. Organisasi pendidikan dan politik, yaitu pembentukan kelompok belajar siswa dan diskusi.
6. Keterampilan dan kewiraswastaan, yaitu kegiatan dalam keterampilan masak-memasak, kerajinan tangan dan tata hias.
7. Kesegaran jasmani dan kreasi:
 - Latihan olah raga rutin setiap hari Kamis sore
 - Pertandingan antar kelas setiap akhir semester
 - Pertandingan persahabatan antar sekolah
 - Latihan tata upacara setiap hari Sabtu
 - Latihan drum band setiap hari Jum'at sore
 - Latihan Pramuka setiap hari Sabtu sore.

Berkat pembinaan yang baik dan disiplin yang keras SMP Kemala Bhayangkari 1 Medan selama tahun 1992 meraih juara sebagai berikut: juara I putri gerak jalan HUT Golkar, juara II putri gerak jalan hari Sumpah Pemuda, juara III single putri Walikota Cup VI.

Disamping itu drum band SMP Kemala Bhayangkari Medan ini tampil dalam berbagai kegiatan di lapangan Benteng, lapangan Sekolah Polisi Negara Sampali, lapangan Olah Raga Kampus USU Medan, dan lain-lain. Begitu juga bidang Pramuka sering ambil bagian dalam berbagai kegiatan di lapangan Benteng Medan.

4.3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Sampel sekolah untuk tingkat SLTA dalam penelitian ini adalah SMA Kemala Bhayangkari 1 Medan yang terletak di jalan Sei Batu Gingging

Medan, yaitu satu lokasi dengan SMP Kemala Bhayangkari 1 Medan. Sekolah ini mulai menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 1977. Sewaktu penelitian ini dilakukan jumlah muridnya 362 orang (55 orang diantaranya putra-putri anggota Polri). Siswa SMA Kemala Bhayangkari 1 Medan ini mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 265 orang (73,20%), agama Kristen 89 orang (24,58%) dan lain-lain 8 orang (2,22%).

Seperti halnya penerimaan siswa baru untuk setiap tahun ajaran pada SMP Kemala Bhayangkari 1 demikian juga halnya penerimaan siswa baru untuk SMA Kemala Bhayangkari 1 Medan, dimana penerimaan siswa sesuai dengan kapasitas ruang yang tersedia. Apabila jumlah murid yang mendaftar sudah cukup maka pendaftaran segera ditutup.

Guru-guru yang ada di sekolah ini berjumlah 20 orang diantaranya 10 orang adalah guru honor, dan tenaga administrasi 2 orang, disamping itu 1 orang sebagai petugas kebersihan sekolah.

Adapun tujuan dari kegiatan program pendidikan sekolah ini adalah untuk mencapai:

- a. Setiap siswa memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran secara maksimal sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan sekaligus meningkatkan pendidikan.
- b. Terlaksana kurikulum SMA tahun 1984.
- c. Terlaksananya kegiatan ko-kurikuler/ekstra kurikuler yang menunjang kegiatan intra kurikuler.
- d. Terlaksananya kegiatan belajar-mengajar dengan baik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- e. Terlaksananya kegiatan bimbingan dan bimbingan mental, spritual siswa dengan baik.
- f. Terlaksananya kegiatan pembinaan siswa sehingga para siswa mencintai sekolah, lingkungan, dan tanah air.
- g. Memantapkan ketahanan sekolah.
- h. Terbimbingnya guru dan tenaga ke arah kesempurnaan tugas dan bertingkah laku panutan baik di dalam maupun di luar sekolah.
- i. Terbinanya semua personil dengan mengadakan supervisi kepada

guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas masing-masing.

- j. Meningkatkan profesi guru melalui penataran, rapat kelompok guru bidang studi dan rapat rutin.
- k. Melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarana sekolah.
- l. Terlaksananya administrasi sekolah yang baik.
- m. Memberikan atau menyampaikan data/laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud/Kabid ataupun Kakandepdikbud.

Untuk mencapai tujuan pendidikan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), kelompok guru mata pelajaran menyusun program semester/tahunan untuk setiap mata pelajaran yang dilengkapi dengan alokasi waktu. Sehubungan dengan hal tersebut setiap guru diharuskan membuat satuan pelajaran (SP) sesuai dengan program dan alokasi waktu yang diserahkan paling lambat dua hari sebelum dilaksanakannya KBM yang sebelumnya harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

Dalam hal evaluasi untuk satu semester, minimal harus ada tiga nilai sub sumatif. Pelaksananya diserahkan kepada guru bidang studi masing-masing. Setiap lembar jawaban dikembalikan kepada siswa setelah diperiksa terlebih dahulu. Sementara bobot soal untuk kelas paralel hendaklah sama. Evaluasi untuk mendapatkan nilai sumatif dilaksanakan secara serentak (jadwal evaluasi). Pada evaluasi sumatif harus memperlihatkan kisi-kisi tes, persentase pencapaian target kurikulum dan daya serap siswa. Terhadap pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), disesuaikan dengan petunjuk dari Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan (Dikmenum Kanwil Depdikbud) Sumatera Utara.

Sebagaimana tujuan pendidikan menengah untuk mempersiapkan siswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik antara lingkungan sosial budaya dengan alam sekitarnya, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Hal itu berarti dengan

kurikulum yang ada akan mampu menjawab tujuan pendidikan yang dimaksudkan. Untuk itu selain terdapat kurikulum program inti juga program ilmu-ilmu fisika, biologi, dan sosial.

Adapun tugas guru dalam membantu Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari maka diangkat tiga orang Wakil Kepala Sekolah, yaitu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Urusan Sarana dan Prasarana, dan Urusan Kesiswaan.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam hal: pengelolaan siswa, pembagian tugas guru, kegiatan belajar-mengajar, membubuhkan nilai formatif, sumatif, dan kokurikuler, menyusun jadwal pelajaran, menyusun penjabaran kurikulum, menyusun tata proses belajar-mengajar, mengkoordinasikan administrasi buku kurikulum, buku referensi guru, penyusunan test analisa bahan evaluasi, urusan mutasi siswa, STTB, secara bersama-sama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang prasarana dan kesiswaan membantu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan ujian atau ulangan umum, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam hal: bertanggung jawab dalam bidang sarana dan prasarana, pendayagunaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, bertanggung jawab dalam urusan berbagai format kerja, membantu Kepala Sekolah dalam bidang penyusunan anggaran pembiayaan sekolah, membantu Kepala Sekolah dalam bidang administrasi sekolah, menyusun statistik, kelengkapan supervisi, secara bersama-sama membantu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan ujian atau ulangan umum, pengelolaan keuangan, kerja sama dengan instansi lain, kegiatan yang berhubungan dengan hari besar, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugasnya.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut: bertanggung jawab dalam pembinaan OSIS, bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata tertib siswa, membantu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan ekstra kurikuler, bertanggung jawab

dalam pelaksanaan 5 K, bersama dengan guru Bimbingan Penyuluhan (BP) mengamati perilaku siswa, secara bersama-sama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Urusan Sarana dan Prasarana membantu Kepala Sekolah dalam perencanaan dan penerimaan siswa-siswa baru dan pelaksanaan ujian atau ulangan umum, pemilihan murid teladan dan beasiswa, penyusunan peta kelas, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugasnya.

Selain dibantu oleh tiga orang Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sekolah masih dibantu oleh guru bimbingan karir/BP, Wali Kelas, dan guru pengawas harian (guru piket). Guru bimbingan karir/BP mempunyai tugas dan bertanggung jawab: menyusun program BP dan bimbingan karir, melaksanakan kegiatan BP, bersama wali kelas melaksanakan bimbingan karir, membukukan absensi murid, mencatat dan mengumpulkan data murid atau kartu siswa, berkonsultasi dengan wali kelas dan guru dalam membina murid, administrasi pemanggilan orang tua murid dan kunjungan ke rumah murid (home visit).

Wali Kelas bertanggung jawab dalam pengelolaan kelas, baik teknis administrasi maupun segi edukatifnya yakni dengan tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala Sekolah adalah sebagai berikut: mengatur keindahan dan kebersihan dalam kelas, mengelola dan mengorganisir kelas yang dipercayakan, mengisi daftar kelas, buku absensi murid dan rapor kelas secara lengkap, mengadakan komunikasi sekolah dengan orang tua murid/wali mengenai kepribadian siswa dengan lisan dan tertulis, membuat laporan bulanan kelas dengan data-data secara lengkap, sebagai pembimbing dan penyuluh bersama dengan guru BP melayani murid kelasnya, memberi penjelasan tata tertib sekolah kepada seluruh siswa kelasnya pada hari pertama dan hari kedua sekolah setiap awal tahun ajaran baru atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengawasan serta pelaksanaan tata tertib sekolah oleh seluruh siswa kelasnya.

Guru piket harian atau pengawas harian bertugas dan bertanggung jawab dalam menciptakan, menjaga, memelihara keamanan dan keterti-

ban sekolah untuk kelancaran jalannya seluruh kegiatan sekolah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah yakni dalam hal: mengawasi penyelenggaraan sekolah, mencatat nama siswa yang terlambat atau meninggalkan sekolah dalam waktu belajar, mencatat pelaksanaan kegiatan pada buku piket harian, mengawasi pelaksanaan upacara bendera, bertugas memberi petunjuk kepada murid dan tamu, menertibkan siswa waktu masuk sekolah dan waktu pulang sekolah, mengawasi kelas yang gurunya berhalangan hadir, mengawasi siswa yang berbaris menuju kelasnya, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan tugasnya.

Guru-guru adalah tenaga edukatif yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya mendidik dan mengajar, dengan perincian tugas yang harus dipertanggung jawabkan kepada Kepala Sekolah, sebagai berikut: merencanakan dan melaksanakan secara operasional alokasi waktu, materi pelajaran dan persiapan mengajar harian, berada di sekolah pada setiap jam kerja, setelah lonceng berbunyi/pergantian jam pelajaran sesegera mungkin sudah berada di depan kelas (lebih dahulu guru ada dalam kelas, barulah siswa masuk ruangan), mengisi batas pelajaran pada buku harian kelas, memelihara ketertiban dan kebersihan kelas dengan mempergunakan tenaga para siswa, memeriksa absensi kelas para siswa, ikut mengawasi siswa sewaktu istirahat, mengadakan evaluasi secara berkala dan teratur sesuai dengan program satuan pelajaran yang telah ditentukan dan menyerahkan nilai sub sumatif minimal 4 kali per semester, mengawasi pelaksanaan tata tertib sekolah, membina hubungan baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, memberi hukuman atau ganjaran secara paedagogis terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah, memupuk kerja sama yang baik dan harmonis antar pendidikan dan pegawai tata usaha dan personil lainnya, kalau guru hendak berpergian liburan sekolah harus memberitahukannya kepada Kepala Sekolah alamat di tempat yang dituju, setiap guru bidang studi yang sejenis, harus mengadakan pertemuan untuk merumuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang telah atau yang akan dilaksanakan, bilamana berhalangan bertugas karena sesuatu hal yang

sangat penting harus mendapatkan ijin langsung dari Kepala Sekolah, dan jika sakit haruslah segera menyerahkan surat keterangan dari dokter pemerintah, menandatangani daftar hadir, diharuskan mengikuti upacara bendera, perayaan hari besar agama dan perayaan nasional, diharuskan mengikuti rapat dinas, membantu memberi informasi siswa kepada petugas BP, menginventarisasi pencapaian target kurikulum dan target daya serap siswa per semester tentang bidang studi yang diasuhnya, memiliki bahan dan metode penyajian yang serasi dalam pencapaian tujuan (TIK) dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menjalankan kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan situasi sekolah, melaksanakan secara berencana karya wisata/darma wisata, melaksanakan dan mengembangkan keterampilan tidak hanya untuk menghasilkan praktek saja, melainkan harus membina sikap menghargai nilai keterampilan sendiri; memanfaatkan semaksimal mungkin tentang: buku-buku paket yang ada, perpustakaan, laboratorium, dan alat-alat palajaran/olah raga dengan baik; penggunaan buku non paket/buku lokal harus mendapat persetujuan dari Kepala Sekolah, menyerahkan pekerjaan ko-kurikuler siswa dan nilainya kepada wakil Kepala Sekolah urusan Kurikuler.

Dalam hal tata tertib siswa diatur segala kewajiban siswa di sekolah yang meliputi tata penampilan, jam masuk sekolah, sikap pada waktu belajar termasuk waktu istirahat dan waktu pulang sekolah, larangan-larangan, dan sanksi-sanksi. Setiap siswa diwajibkan untuk mematuhi dan menjalankan tata tertib sekolah. Pada setiap hari sekolah, siswa harus berpenampilan sebagai siswa SMA dengan berpakaian sekolah yang rapi dan sopan, lengkap dengan atributnya yakni: kemeja atau blus putih berlengan pendek tanpa dilipat (digulung), memakai tanda OSIS, tanda SMA, dan nama siswa; Celana atau rok abu-abu terbuat dari bahan Tetrek 0220 (bukan jeans) dengan potongan atau model seperti yang telah ditetapkan yaitu tidak sempit pada kaki celana atau rok span (sempit/ketat) dan tidak berbelah samping; memakai topi sekolah sewaktu upacara pada hari Senin maupun pada upacara-upacara resmi lainnya, berpakaian

olahraga ketika mengikuti kegiatan olah raga; harus bersepatu karet atau kain berwarna hitam lengkap dengan kaus kaki warna putih dan tali sepatu warna hitam, berambut pendek bagi siswa laki-laki dan disisir rapi, tidak boleh berjabrik dan tidak gundul, tidak berkumis maupun berjenggot; dan rambut siswa perempuan harus disisir rapi, tidak boleh berjabrik.

Setiap siswa harus sudah berada di kompleks sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai yakni pukul 07.45 WIB. Pada hari Senin seluruh siswa wajib mengikuti upacara penaikan bendera dengan pakaian lengkap (memakai topi dan dasi). Pelaksanaan upacara penaikan bendera dilaksanakan setiap kelas secara bergilir yang dikoordinir oleh wali kelas, guru olah raga, guru BP, serta PKS Bidang Kesiswaan. Setelah lonceng tanda masuk kelas berbunyi, setiap siswa harus berbaris di depan kelasnya masing-masing dan menunggu Bapak/Ibu guru yang masuk pada jam tersebut, kemudian masuk ke kelas dengan tertib dan teratur. Khusus jam pelajaran pertama, sebelum pelajaran dimulai maka begitu Bapak/Ibu guru memasuki ruangan kelas, para siswa berdiri dengan sikap sempurna sambil memberi hormat, kemudian berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Demikian juga halnya setelah jam pelajaran usai. Jika guru yang akan memberikan pelajaran tidak hadir maka ketua kelas segera melapor kepada guru piket dan mengerjakan tugas yang diberikan dan tidak dibenarkan keluar kelas tanpa izin. Siswa yang datang terlambat harus melapor kepada guru piket dan setelah mendapat izin barulah diperbolehkan memasuki ruangan kelas atau tempat upacara. Setiap siswa yang akan meninggalkan kelasnya pada saat pelajaran berlangsung, harus meminta izin terlebih dahulu kepada guru yang sedang mengajar di kelas dan memberitahukannya kepada ketua kelas. Kemudian siswa yang akan meninggalkan sekolah harus melapor kepada guru BP untuk mengambil surat izin dan selanjutnya memberitahukannya kepada guru piket atau pengawas harian. Setiap siswa harus mempunyai buku penghubung yang ditulis sesuai dengan nama, kelas, nama orang tua/wali lengkap dengan

contoh tanda tangannya tanpa coret-coret yang meragukan. Siswa yang tidak dapat hadir mengikuti pelajaran harus dapat menunjukkan surat keterangan yang sah dan buku penghubung, apa alasannya tidak hadir yang ditandatangani oleh orang tua atau wali. Siswa yang sakit lebih dari dua hari harus ada surat keterangan dokter atau dari rumah sakit. Pada waktu istirahat, siswa harus meninggalkan ruang kelas dan berada di pekarangan sekolah dan tidak dibenarkan keluar dari kompleks, dengan demikian pada waktu istirahat keamanan kelas berada di tangan piket kelas. Pada waktu pelajaran berlangsung, siswa tidak dibenarkan menerima tamu kecuali ada izin dari guru BP atau piket harian. Siswa harus menyediakan peralatan sekolahnya masing-masing tanpa pinjam meminjam pada waktu jam pelajaran berlangsung. Setiap siswa harus turut serta menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah dengan; turut bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah seperti: dinding, lantai, pintu, pekarangan, dan bagian-bagian lain dalam lingkungan sekolah; turut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keutuhan alat-alat sekolah seperti: laboratorium, perpustakaan, olah raga, dan kesenian; turut bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan sekolah termasuk waktu upacara bendera dan upacara-upacara resmi lainnya; turut bertanggung jawab terhadap keindahan dan kesejukan lingkungan sekolah; dan turut bertanggung jawab atas ketenteraman dan kekeluargaan pada keluarga besar SMA Kemala Bhayangkari I Medan. Setiap siswa wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Sekolah. Harus berlaku sopan, tertib, dan penuh rasa kekeluargaan terhadap: teman-teman, pegawai sekolah terutama kepada Bapak dan Ibu guru, baik pada lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Setiap siswa yang beragama Islam diupayakan semaksimal mungkin untuk aktif dalam pengajian Islam yakni pada hari Minggu, di minggu pertama setiap bulannya, dan bagi siswa yang beragama Kristen mengikuti kebaktian yang dilaksanakan pada hari Minggu, di minggu ke tiga setiap bulannya. Setiap siswa wajib melaksanakan pembayaran uang sekolah paling lama tanggal 10 setiap bulannya.

Larangan-larangan dan sanksi bagi para siswa apabila: meninggalkan sekolah atau pelajaran selama pelajaran berlangsung tanpa izin Kepala Sekolah atau guru BP dan piket harian, membawa rokok atau merokok dan sejenisnya, membawa minuman keras, ganja, obat pene-nang, dan obat terlarang lainnya; membawa senjata api, senjata tajam atau alat-alat yang membahayakan lainnya; melakukan permainan judi dengan taruhan uang; melakukan aksi demonstrasi, mogok, coret-coret, main hakim sendiri, berkelahi atau membawa orang lain ke kompleks sekolah dengan tujuan tidak baik atau meresahkan ketenteraman seko-lah; mengeluarkan kata-kata kotor, tidak sopan, berteriak mengejek, memfitnah teman apalagi terhadap Bapak atau Ibu guru; berpakaian tidak senonoh seperti bersolek berlebihan maupun memakai perhiasan seperti: kalung, cincin, gelang mas, dan memakai tatto; membawa buku atau majalah dan sejenisnya yang bergambar porno, maupun alat-alat lain yang kurang etis; dan mencemarkan nama baik sekolah.

Sanksi dan tindakan pembinaan dilakukan secara edukatif oleh guru, wali kelas, guru BP, Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah sendiri, dalam hal: siswa yang terlambat satu kali disuruh membersihkan ling-kungan sekolah, setelah lonceng pergantian baru boleh diizinkan me-masuki kelas; terlambat 3 kali, orang tua murid akan dipanggil untuk membuat surat perjanjian; setelah dibuat perjanjian masih juga terlam-bat, siswa tersebut diskors selama tiga hari; tidak hadir tanpa pemberi-tahuan akan ditegor secara lisan; tidak hadir tanpa berita sampai tiga hari, maka orang tua siswa akan dipanggil dan membuat surat perjanjian; tidak hadir juga setelah itu sampai enam hari, diberi peringatan masih mau meneruskan atau pindah sekolah, prosesnya dilakukan oleh guru BP yang diketahui oleh Wali Kelas dan Kepala Sekolah; absen lebih 10%, dari kehadiran, tidak diperolehkan mengikuti ujian; siswa yang kedapatan merokok, berjudi, dan meminum-minuman keras di dalam lingkungan sekolah akan diskors selama tiga hari tanpa surat dan dianggap absen; panggilan kepada orang tua yang anaknya melanggar tata tertib sekolah diadakan sampai tiga kali yaitu, pada panggilan pertama orang tua hadir

bersama anaknya untuk membuat perjanjian tertulis, panggilan kedua orang tua hadir bersama anaknya untuk membuat perjanjian tertulis yang diikuti sanksi lainnya, panggilan ketiga dengan keputusan Kepala Sekolah dimana siswa harus dikembalikan kepada orang tuanya untuk sementara (beberapa hari), dan yang terakhir pemberhentian dengan tidak hormat; setiap ada kegiatan pribadi siswa di luar sekolah untuk meminta izin dari pihak sekolah maka terlebih dahulu harus ada surat permohonan dari orang tua para siswa kepada Kepala Sekolah; setiap siswa yang baru masuk, diwajibkan untuk mengikuti penataran P4 SLTA dengan pakaian seragam secara lengkap; setiap siswa diwajibkan memiliki kartu pelajar dan kartu perpustakaan.

Dalam proses belajar mengajar di SMA Kemala Bhayangkari I Medan, sebagai guru dituntut secara ketat untuk menyampaikan materi yang sangat padat demikian juga alokasi waktu. Disiplin dan peraturan-peraturan sekolah tidak hanya ditujukan kepada siswa, tetapi juga terhadap para guru yang mengajar. Hal ini dimaksudkan agar sasaran bisa tercapai dimana siswa dapat menyerap materi pelajaran yang diberikan. Untuk mendukung kegiatan belajar siswa berbagai tugas masih diberikan seperti mengerjakan PR, membuat kliping koran atau majalah dan diskusi kelompok. Sejauh itu yang dituntut kepada siswa adalah untuk mengikuti semua kegiatan pengajaran yang berlangsung dimana siswa semata-mata merupakan obyek dari pada tujuan pencapaian pendidikan.

Secara umum, dalam kegiatan belajar mengajar tatap muka hanya berlangsung satu arah yaitu merupakan metode ceramah, dimana guru menyampaikan materi pelajaran dan para siswa harus diam menyimak dan mendengarkan guru yang menerangkan di depan kelas. Siswa hanya menerima begitu saja materi pelajaran tanpa hampir tidak punya kesempatan untuk bertanya. Sering terjadi bahwa terdapat siswa tidak paham atau belum mengerti tentang apa yang baru diterangkan guru, tetapi kebanyakan mereka tidak berani untuk bertanya, bahkan berkembang semacam kebiasaan jelek yaitu siswa malas bertanya dan berpura-pura

mengerti. Siswa yang berani bertanya kepada guru adalah mereka yang tergolong pintar di kelasnya. Para siswa yang sering melalaikan tugasnya dan tidak memperhatikan guru ketika menerangkan pelajaran apabila mereka bertanya kepada guru, maka sering seorang guru akan mengabaikan pertanyaannya. Sifat malas atau enggan bertanya seorang siswa kepada guru terkadang hanya disebabkan ejekan dari siswa lainnya seperti “dasar bodoh”, “sok pintar”, atau “sok mau tahu”. Meskipun ucapan-ucapan demikian hanya dimaksudkan sebagai kata sindiran yang bukan bermaksud mematikan kreativitas sesama siswa, namun hal itu membuat nyali siswa untuk bertanya menjadi terkekang dan akhirnya timbullah suasana kelas yang pasif dengan para siswa yang malas bertanya. Keadaan yang terus berlangsung demikian, telah memupuk kebiasaan buruk yaitu mengekang daya kreativitas pada kalangan siswa sendiri karena dengan malas bertanya tersebut mereka telah menipu diri sendiri, padahal sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang telah diterangkan guru. Selain itu, waktu untuk bertanya bagi para siswa hampir tidak ada karena alokasi waktu yang sangat padat, dimana waktu sudah diatur sedemikian rupa. Setiap mata pelajaran yang sudah terjadwal harus selesai diberikan kepada siswa secara tepat waktu, dan apabila guru terlambat menyampaikan materi pelajaran disebabkan sesuatu hal, maka sistem pengajaran dan target yang seharusnya dicapai akan terkendala. Hal ini tidak diinginkan oleh seorang guru, karena pada tatap muka berikutnya sebagian waktu terpaksa disita menyelesaikan materi yang belum tuntas diberikan pada tatap muka sebelumnya. Dengan demikian, seorang guru seolah-olah robot yang telah diprogramkan untuk mengerjakan tugasnya secara tepat waktu, dengan mengabaikan apakah siswa dapat menyerap dengan baik atau tidak tentang materi pelajaran yang diberikan. Dalam keadaan seperti ini, siswa yang rajin akan belajar sendiri di rumah tetapi bagi siswa yang malas tetap saja acuh. Sehingga saat ujian akhir semester muncullah siswa yang nyontek yaitu mengerjakan tugas ujian dengan mencontoh pekerjaan teman sebelumnya yang bukan dari hasil pemikirannya.

Terhadap pembagian jurusan siswa ketika mereka naik kelas 2 (dua) hal ini sering menimbulkan masalah. Walaupun tidak dapat disebutkan dengan angka pasti, namun sebenarnya hanya sebagian diantara siswa yang benar-benar murni memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Paling sering terjadi adalah bahwa siswa menganggap jurusan fisika (A-1) dan jurusan biologi (A2) lebih tinggi kualitasnya dari ilmu-ilmu sosial (A3). Sehingga banyak siswa yang memaksakan diri untuk masuk ke jurusan fisika atau biologi, walaupun nilai mata pelajaran yang diperolehnya untuk dapat masuk jurusan tersebut pas-pasan saja. Sehubungan dengan penjurusan bidang studi ini tidak jarang pula para orang tua siswa mendatangi pihak sekolah guna memindahkan anaknya yang berdasarkan minat dan kemampuan sebenarnya harus masuk ke jurusan ilmu sosial, tetapi oleh orang tuanya memaksa keinginannya supaya anaknya mengambil jurusan fisika atau biologi. Minat dan kemampuan yang dipaksakan demikian akan terlihat akibatnya ketika anak-anak akan naik kelas tiga, dimana banyak siswa yang tinggal kelas ataupun kalau mereka berhasil juga naik kelas namun nilai rapor-nya hanya sekedar bisa naik kelas.

Sangat sedikit diantara siswa yang benar-benar memahami dan bisa mengerti tentang minat dan kemampuannya, sehingga mereka tidak mau memaksakan diri untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan kemampuannya, dan mereka rela menduduki jurusan yang sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu tumbuh pula semacam pemoe di kalangan masyarakat dan siswa bahwa jurusan ilmu sosial lebih rendah dibandingkan dengan jurusan fisika dan biologi, bahkan siswa yang masuk ke jurusan ilmu sosial adalah dari pada tidak naik kelas sama sekali.

Asumsi pada orang tua dan memaksakan anak-anaknya memilih jurusan fisika dan biologi dari pada jurusan ilmu sosial, karena seperti kenyataan bahwa jurusan fisika dan biologi punya nilai lebih dan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk di kemudian hari. Sebagai contoh misalnya terhadap nilai tersebut, bahwa serendah-rendahnya nilai hasil

belajar seorang siswa yang jurusan fisika dan biologi tetapi mereka bisa mengikuti testing UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri), untuk bidang eksakta maupun ilmu sosial. Sementara, oleh siswa pada jurusan ilmu sosial hal yang sama tidak dapat dilakukan. Sehubungan dengan itu, sangat sedikit sekali dijumpai para orang tua yang memotivasi anaknya supaya memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan maupun minatnya, walaupun hal ini sangat menentukan pengaruhnya bagi pengembangan karir anak-anak mereka di kemudian hari. Sehingga secara umum, meskipun anak-anak mereka bercita-cita menjadi seorang sarjana: akuntan, hukum, notaris, sekretaris, sosiolog, antropolog dan sarjana sosial lainnya, akan tetapi sewaktu pembagian jurusan di SLTA diharapkan untuk masuk ke jurusan fisika atau biologi. Para orang tua sangat kecewa apabila anak-anak mereka masuk ke jurusan ilmu sosial walaupun disadari pilihan itu tepat bagi si anak untuk mengejar cita-citanya di masa depan. Sebaliknya sangat sedikit diantara para siswa yang menyadari akan kemampuan dan minatnya, sehingga mereka berani dan konsekuen memilih jurusan ilmu sosial walaupun pada kenyataannya nilai mata pelajaran dalam bidang fisika dan biologi cukup baik. Mereka tidak ingin memaksakan diri memilih bidang ilmu yang dapat menjerumuskan mereka di kemudian hari karena jurusan tersebut tidak sesuai dengan minatnya.

4.4 Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Universitas Sumatera Utara (USU), yaitu sebagai satu-satunya universitas negeri di Propinsi Sumatera Utara, yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 November 1957. Sebenarnya pada tanggal 4 Juli 1952 telah berdiri sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Universitas Sumatera Utara yang sebagai cikal bakal untuk membangun suatu perguruan tinggi di Sumatera Utara.

Dalam buku "USU 35 Tahun Lustrum VII (1957-1992)", USU menge-

lola 9 fakultas dan 1 politeknik. Program studi yang ditawarkan sebanyak 46 buah, Strata satu (S1) dan 19 buah Program Diploma (D3). Disamping itu USU menyelenggarakan Program Pasca Sarjana yang bekerjasama dengan IPB (KPK IPB-USU) yang telah menjadi program mandiri dalam Ilmu Pertanian, dan dengan UGM (KPK UGM-USU) dalam Ilmu Hukum Perdata. Sampai tahun 1992 memiliki 1.721 tenaga dosen dan 1.071 tenaga administrasi serta menghasilkan alumni sebanyak 31.681 orang.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, USU mempunyai tugas untuk: membentuk manusia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, kreatif dan bertanggung jawab, bersikap demokratis dan penuh tenggang rasa, berkecerdasan tinggi disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sehubungan tujuan tersebut, USU bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tinggi menengah dan memberikan pendidikan atau pengajaran berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rektor sebagai unsur pimpinan Universitas berkedudukan sebagai Pembantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang yang menjadi tugas kewajibannya disamping kedudukannya selaku pimpinan USU. Adapun tugas Rektor USU adalah: memimpin USU sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu membina civitas akademika agar berdaya guna dan berhasil guna; menentukan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan USU yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum pemerintah, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta kebijakan teknis Direktur Jenderal Perguruan Tinggi; membina dan melaksanakan bekerja sama dengan instansi, badan swas-

ta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh 4 (empat) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, yaitu: Pembantu Rektor I, berkedudukan sebagai Pembantu Rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; Pembantu Rektor II, berkedudukan sebagai Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum dengan tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum; Pembantu Rektor III, berkedudukan sebagai Pembantu Rektor bidang kemahasiswaan dengan tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan yang bersifat kokurikuler; Pembantu Rektor IV, berkedudukan sebagai Pembantu Rektor bidang perencanaan dan hubungan luar dengan tugas mewakili Rektor dalam memimpin kegiatan bidang hubungan kerja sama.

Fakultas, berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan pokok dan fungsi USU yang berada di bawah Rektor. Tugas fakultas adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam Program Sarjana, Program Pasca Sarjana dan Doktor yang mencakup Program Diploma dan Program Akta.

Program pendidikan yang diselenggarakan oleh USU adalah: Program Non-Gelar, jenjang program pendidikan Diploma (D3) yang mempunyai beban studi minimal 110 SKS dan maksimal 120 SKS dengan kurikulum 6 semester dan masa studi 6 sampai 10 semester, pada tahun 1987 USU termasuk salah satu Universitas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Program pendidikan D3 yaitu pendidikan matematika dan IPA, yang kemudian program ini dikelola oleh fakultas MIPA USU. Dalam rangka pengembangan program pendidikan telah diadakan kerja sama antar Politeknik USU dengan PT Indosat, dimana mahasiswa Politeknik dapat melakukan praktek di PT Indosat dan Politeknik menerima karyawan PT Indosat untuk mengikuti pendidikan.

Program gelar, jenjang pendidikan sarjana (S1) mempunyai beban

studi kumulatif minimal 144 SKS, maksimal 160 SKS dengan lama studi kumulatif antara 8 sampai 14 semester. Dalam membantu program pendidikan Universitas lain maupun pendidikan bagi karyawan dan instansi lain, USU telah menjalin kerja sama dengan: Universitas Riau Pekanbaru dengan Fakultas Ekonomi USU di bidang pendidikan Jurusan Akuntansi; Departemen Dalam Negeri yaitu untuk pendidikan karyawan Depdagri ke jenjang Program S1 di Program Studi Hukum Agraria, Sosiologi, Administrasi Negara dan Komunikasi, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 1988 telah dibuka program studi baru di Fakultas MIPA yaitu Program Studi Biologi. Selanjutnya pada tahun 1991 telah ditetapkan Program Studi Arsitektur oleh Dirjen Dikti.

Magister (S2) adalah jenjang kedua program gelar yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 180 SKS dan maksimal 194 SKS dengan lama studi kumulatif antara 12 sampai 18 semester. Fakultas Kedokteran USU telah menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor Spesialis (PPD S1) yang setara dengan Program Pendidikan Magister (S2) sejak tahun 1977, yaitu meliputi bidang: Ilmu Bedah, Kesehatan Anak, Penyakit Jiwa, Penyakit Kulit dan Kelamin, Penyakit Mata, Penyakit Paru, Penyakit THT, Obsetri dan Ginekologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, Anestesiologi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Radiologi dan Neurologi. Pada tahun 1987 USU mengadakan kerjasama dengan IPB untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan kredit (KPK) S2 Ilmu-Ilmu Pertanian dengan Program Studi Agronomi, Ilmu Tanah, Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pada tahun 1988 USU menjalin kerja sama dengan UGM untuk menyelenggarakan KPK S2 Ilmu Hukum Keperdataan.

Pendidikan Kandidat Notaris yaitu merupakan pastgraduate studi Sarjana Hukum. Pendidikan ini sudah dimulai sejak tahun 1969 yaitu dengan dibukanya jurusan Notaris di fakultas Hukum USU, dengan lama pendidikannya antara 2 sampai 4 tahun.

Dalam penerimaan mahasiswa di USU dilakukan melalui seleksi yang

diatur lewat Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Namun demikian, meskipun Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud telah menemukan bahwa seseorang telah lulus seleksi atau ujian masuk perguruan tinggi untuk salah satu fakultas atau jurusan di lingkungan USU, tetapi mereka masih dapat ditolak menjadi mahasiswa apabila tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang lebih khusus seperti berikut ini: syarat tidak buta warna dan cacat anggota badan bagi fakultas: kedokteran, kedokteran gigi, pertanian, teknik, MIPA, kesehatan masyarakat PS KM dan politeknik; syarat tidak cacat anggota badan untuk fakultas: sastra, hukum, ekonomi, ilmu sosial dan politik; syarat tidak cacat berbicara (gagu, gagap dan lainnya) untuk fakultas sastra; untuk fakultas kedokteran diadakan pemeriksaan rontgen.

Minat masyarakat Sumatera Utara agar anak-anak mereka dapat masuk ke Universitas Sumatera Utara satu-satunya perguruan tinggi negeri di daerah ini adalah sangat besar. Sehingga dengan sedikitnya diantara mahasiswa yang masuk ke USU diharapkan mereka adalah putra-putri terbaik, tetapi dalam kenyataannya masih harus dipertanyakan kembali mengenai sistem penyiangan masuk ke perguruan tinggi tersebut. Sebab setelah masa perkuliahan ternyata para mahasiswa tidak menunjukkan hal-hal yang istimewa, demikian juga halnya terhadap mahasiswa PMDK. Setelah empat semester perkuliahan ada saja diantara mahasiswa yang terkena drop out (DO), bahkan banyak ditemukan mahasiswa yang tidak melanjutkan kuliah dan mereka hilang setelah penataran P4. Sementara tidak sedikit mahasiswa yang kuliah hanya satu semester dan ada yang tidak sampai satu semester.

Tentang kemampuan dan minat belajar mahasiswa masih ada yang rendah, yaitu dengan melihatnya dari berbagai sudut. Misalnya dalam hal memiliki buku-buku hanya sedikit diantara mahasiswa yang mampu membeli buku yang dianjurkan oleh dosen, dan ke perpustakaan saja mereka sangat jarang. Mereka yang sering ke perpustakaan adalah para mahasiswa yang tingkat terakhir dengan maksud untuk mencari buku-buku referensi bagi kebutuhan penulisan skripsinya.

Tidak sedikit ditemukan mahasiswa yang berhasil masuk ke suatu fakultas atau jurusan, bukan disebabkan berdasarkan minatnya atau memprioritaskan memiliki fakultas atau jurusan tersebut, tetapi adalah pilihan kedua atau ketiga. Keadaan ini berakibat satu persatu mahasiswa mengundurkan diri karena pada testing UMPTN tahun berikutnya mereka ikut kembali dan jikalau berhasil lulus maka kuliah sebelumnya ditinggalkan begitu saja. Situasi demikian hampir terdapat di semua fakultas yaitu tidak saja pada fakultas ilmu sosial tetapi juga pada fakultas eksakta. Kecuali pada fakultas eksakta persentasenya lebih kecil bila dibandingkan dengan fakultas ilmu sosial. Sehingga banyak dijumpai mahasiswa yang kuliah pada fakultas ilmu sosial mereka berasal dari jurusan eksakta (fisika dan biologi) ketika di SMA sebelumnya.

Situasi mahasiswa demikian ditambah lagi dengan faktor-faktor lain seperti latar belakang budaya maupun yang berasal dari daerah turut mempengaruhi proses belajar mengajar. Para mahasiswa yang berasal dari luar kota tampaknya masih harus menyesuaikan diri terutama dengan lingkungan perkotaan dan pergaulan sesama mahasiswa. Bahkan secara keseluruhan mahasiswa masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan kampus baik terhadap sistem pendidikan yang dijalankan maupun tata krama serta sikap dan penampilan sebagai calon intelektual.

Masa transisi kondisi belajar dan pergaulan ketika di bangku SLTA dengan suasana yang dihadapi di perguruan tinggi, membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri yaitu sebagaimana suasana pada tahun 1960-an ketika masih berlangsung "plonco", kemudian tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an disebut dengan Posma (Pekan Orientasi Studi Mahasiswa). Kegiatan ini dimaksudkan untuk pembinaan calon mahasiswa secara fisik maupun mental. Pada saat ini kegiatan plonco maupun posma tidak dikenal lagi di perguruan tinggi dan bagi mereka yang sempat mengalaminya hanya tinggal kenangan (nostalgia). Dengan tidak adanya plonco dan sejenisnya itu mempunyai pengaruh terhadap sikap mahasiswa, seperti berkurangnya atau bahkan hampir tidak ditemukan lagi rasa

hormat mahasiswa baru terhadap mahasiswa seniornya. Bahkan tidak jarang mahasiswa yang berlainan jurusan pada suatu fakultas mereka tidak saling mengenal. Lebih jauh lagi mahasiswa tidak memperlihatkan rasa hormatnya terhadap para dosen, jikalau dosen yang bersangkutan tidak memberikan mata kuliah secara langsung kepada mahasiswa tersebut. Hal lain yang dijumpai bahwa antara sesama mahasiswa pada fakultas yang sama mereka kurang akrab dalam bergaul dan mahasiswa kurang menaruh rasa hormat kepada dosen yang bukan mengajar di fakultas atau jurusannya.

Tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di USU adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Tujuan penerapan sistem ini secara umum adalah agar perguruan tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan karena di dalamnya dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu macam jenjang profesi tertentu yang dituntut oleh pembangunan.

Satu hal yang sangat jelas terlihat dengan penerapan sistem kredit ini bahwa mahasiswa yang benar-benar jeli dan punya motivasi kuat, mereka dapat menyelesaikan studinya lebih cepat. Sebaliknya bagi mahasiswa yang lemah dimana kuliah hanya dijadikan pelarian, mereka akan lama untuk dapat menyelesaikan studinya.

Penerapan sistem kredit ini di satu sisi telah mengurangi kesempatan pergaulan sesama mahasiswa, karena mahasiswa saling mengejar kesempatan dengan beban studinya masing-masing. Akibatnya kerja sama diantara mahasiswa menjadi berkurang. Memang diakui, penerapan sistem kredit ini IP Kumulatif mahasiswa dapat dicapai setinggi mungkin, tetapi hal ini tidak dibarengi dengan keterampilan khusus yang lain seperti kemampuan berorganisasi. Mahasiswa yang benar-benar belajar secara sungguh-sungguh biasanya jarang melibatkan diri dengan berbagai kegiatan di kampus, seperti misalnya tidak mengikuti kegiatan: Olah raga, anggota Senat atau BPM, anggota kepanitiaan atau memimpin organisasi maupun kegiatan-kegiatan tertentu di kampus.

Tentang mutu pendidikan mahasiswa sangat sulit untuk menjelaskannya, namun dengan melihat kenyataan sehari-hari banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) cukup tinggi. Namun, setelah diteliti lebih jauh tampak adanya kesenjangan antara IP yang tinggi tersebut dengan kemampuannya dalam perkuliahan. Artinya, tidak jarang terjadi IPK seorang mahasiswa di Kartu Hasil Studi (KHS) sangat baik, ternyata hal itu belum merupakan jaminan mahasiswa yang bersangkutan benar-benar pintar di perkuliahan. Lebih jauh misalnya dijumpai beberapa mata kuliah yang punya latar belakang prasyarat. Mata kuliah prasyarat dimaksudkan sebagai dasar mata kuliah yang diberikan oleh dosen sebelumnya untuk benar-benar dikuasai untuk melanjutkan mata kuliah yang sama yang diajarkan oleh dosen berikutnya. Ternyata beberapa dosen merasa kecewa sebab apa yang diharapkan dengan mata kuliah prasyarat tersebut belum dikuasai oleh para mahasiswanya. Sehingga faktor lemahnya kemampuan penguasaan materi perkuliahan turut memberi pengaruh terhadap proses belajar-mengajar.

Dalam proses belajar-mengajar, belum terdapat keseragaman kriteria tenaga pengajar (dosen). Pada fakultas yang masih berusia muda dimana tenaga pengajarnya baru saja diterima sebagai tenaga edukatif, mereka sudah seperti dosen yaitu mereka dapat secara langsung memberi perkuliahan dan bahkan berkuasa secara penuh sebagaimana layaknya seorang dosen senior. Padahal harus diingat bahwa mereka yang disebut sebagai dosen adalah tenaga edukatif yang sudah berpangkat Lektor dengan golongan ruang IV/a. Sedangkan para tenaga pengajar yang masih golongan III statusnya adalah sebagai asisten pembantu dosen. Tenaga pengajar yang sudah berstatus dosen, hanya terdapat pada fakultas yang sudah tua dan mapan. Sementara sistem magang bagi seorang tenaga edukatif junior/muda untuk menjadi asisten seorang dosen hanya terdapat beberapa fakultas yang sudah cukup tua, karena dosennya memang sudah cukup banyak.

Banyak ditemukan, bahwa mahasiswa tidak punya motivasi dan

tujuan yang jelas sehingga walaupun dengan penerapan sistem kredit tidak seluruhnya memacu minat mahasiswa untuk lebih cepat menyelesaikan studinya. Bahkan mahasiswa tampaknya seperti sudah kalah sebelum berperang, yaitu setelah selesaipun studinya dengan menyandang dasar sarjana tapi itu bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Dengan demikian, begitu mereka meraih gelar sarjana, mereka segera diharapkan dengan masalah baru yaitu untuk bekerja. Tuntutan yang datangnya dari orang tua sangat kuat agar mereka segera mendapatkan pekerjaan dengan alasan untuk membantu meringankan biaya orang tua dalam menyekolahkan adik-adiknya yang lain. Padahal penerimaan tenaga kerja sarjana sangat terbatas, yang mengakibatkan muncullah sikap apatisisme pada kalangan mahasiswa. Permasalahan seperti itu sering ditemukan, bahwa setelah mereka menyelesaikan studinya akan dihadapkan kepada masalah baru tentang sulitnya mendapatkan pekerjaan bahkan menjadi pengangguran. Selain itu setelah menyelesaikan studinya harus bekerja di bidang lain (wiraswasta) yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Mereka menganggap jikalau hanya untuk berwiraswasta tidak perlu sampai kuliah hingga meraih sarjana.

Kebanyakan cita-cita mahasiswa setelah menyelesaikan studi adalah untuk menjadi pegawai negeri, sama sekali tidak ada di kalangan mahasiswa yang berkeinginan menjadi seorang pengusaha atau wiraswasta walau bidang ilmunya memungkinkan untuk itu. Sehingga untuk mewujudkan cita-citanya mereka menempuh berbagai cara supaya bisa menjadi seorang pegawai negeri dan adakalanya pekerjaan sebagai pegawai negeri itu malah tidak sesuai dengan bidang ilmu yang didapatkannya selama perkuliahan.

BAB V

PRANATA SOSIAL EKONOMI

Pranata sosial ekonomi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Koperasi Keluarga Besar Universitas Sumatera Utara (KKB-USU). Adapun KKB-USU ini secara resmi dikukuhkan sebagai badan Hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 April 1982. Berdirinya KKB-USU karena sadar akan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat berwatak sosial yang harus semakin dikembangkan, yaitu sebagai realisasi dari Keppres No. 40 tahun 1981 untuk mengelola asrama mahasiswa. Kantor KKB-USU ini berada di Jalan Dr. Mansyur No. 19 Kampus USU Medan.

Untuk memacu laju pembangunan nasional, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan peran serta pelaku-pelaku ekonomi yaitu pemerintah, swasta dan koperasi. Memasuki Pelita V sebagai tahap persiapan menuju tinggal landas, peranan koperasi yang merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya harus semakin dikembangkan dan diupayakan peran sertanya dalam pembangunan nasional.

Koperasi yang tumbuh dari masyarakat harus dikembangkan bukan saja pada golongan masyarakat petani di pedesaan atau karyawan-

karyawan dalam suatu instansi atau perusahaan, akan tetapi juga perlu bagi kalangan pemuda dan mahasiswa. Hal itu sesuai dengan penjelasan GBHN, bahwa pembangunan koperasi yang diutamakan pada KUD dan koperasi fungsional seperti koperasi karyawan, koperasi pemuda dan mahasiswa sehingga koperasi pemuda Indonesia (Kopindo), Koperasi Mahasiswa (Kopma) dan sesuai dengan obyek kajian penelitian ini yaitu KKB-USU. Oleh karena KKB-USU sebagai suatu koperasi yang merupakan wadah kesatuan dari civitas akademika USU, maka keanggotaannya terdiri dari para tenaga edukatif, mahasiswa dan karyawan di lingkungan keluarga besar USU.

Keberadaan KKB-USU di lingkungan perguruan tinggi dan termasuk sebagai koperasi di kalangan generasi muda serta telah berbadan hukum, maka KKB-USU pun berhak menjadi anggota Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo) yang merupakan koperasi sekunder tingkat nasional di kalangan generasi muda. Pada tanggal 13 Nopember 1982 KKB-USU telah terdaftar sebagai anggota Kopindo, sehingga dalam kepengurusan KKB-USU yang menjadi penasehatnya adalah Rektor USU, Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Sumatera Utara dan Dekopin Sumatera Utara. Disamping pengurus harian, kepengurusan KKB-USU dilengkapi dengan Pembantu Umum serta Badan Pemeriksa.

Dalam Anggaran Dasar KKB-USU, azas dan tujuannya tercermin pada pasal 2 yaitu: koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan, koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perkembangan KKB-USU sejak didirikan sampai tahun 1987 masih belum menggembirakan, bahkan sampai saat itu anggotanya baru berjumlah 41 orang. Kemajuan yang pesat dicapai KKB-USU terutama setelah adanya pinjaman untuk membangun asrama mahasiswa USU adalah sebagai realisasi Keppres No 40 tahun 1981 untuk mengelola asrama mahasiswa, maka pada tanggal 15 Mei 1985 KKB-USU mandiri-

kan asrama baru yang peletakan batu pertamanya dilaksanakan oleh Menteri Muda Perumahan Rakyat Drs. Cosmas Batubara.

Adapun sebagian besar dasar pembangunan asrama untuk perguruan tinggi di Indonesia adalah Keppres No. 40 tahun 1981 yang dalam hal ini melibatkan 5 menteri yaitu Menteri Keuangan, Mendikbud, Menteri Muda Pemuda dan Olah Raga, Menteri Koperasi dan Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat. Dengan demikian, pengadaan asrama mahasiswa sangat serius diperhatikan oleh pemerintah. Memang disadari bahwa perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat di daerah sekitarnya, maka pengadaan asrama mahasiswa bagi perguruan tinggi merupakan hal yang sangat diharapkan bagi mahasiswa terutama yang berasal dari luar daerah.

Sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di luar pulau Jawa, USU tidak terlepas dari permasalahan akan kebutuhan asrama mahasiswa. Pada saat ini USU sudah punya dua unit asrama yang kedua-duanya berada di kampus USU, yaitu asrama putri di Jalan Universitas yang berkapasitas daya tampung 111 orang dan asrama putra yang berada di Jalan Dr. Mansyur berkapasitas 100 orang. Asrama putra yang ada, dirasakan tidak memadai lagi untuk tempat belajar mahasiswa.

Pembangunan asrama USU dibiayai Kredit Pemilikan Asrama (KPA) dan BTN bernilai Rp. 1.329.189.000,00 yaitu dengan perincian Rp. 75.237.000,00 untuk jaminan kredit. Pembayaran kreditnya berlangsung selama 20 tahun, dimana KKB-USU membayar angsuran kredit sebesar Rp 9 juta dalam satu bulan.

Asrama USU yang berlantai lima terdiri dari 3 unit dengan kapasitas tampung 552 orang dari 213 kamar dengan perincian 87 kamar berukuran 3 x 3 meter untuk dua orang dan 126 kamar berukuran 4,8 x 3 meter untuk tiga orang. Biaya yang dikenakan bagi setiap penghuni mahasiswa adalah Rp 15.000,00 per bulan.

Peresmian asrama mahasiswa USU dilakukan oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Drs. Cosmas Batubara pada tanggal 9 April 1987. Dan modal KKB-USU diperoleh dari BTN dengan modal kerja dari

Sisa Hasil Usaha (SHU) dari rapat Anggota Tahun 1987 sebesar Rp 5.373.505.

Adapun unit-unit usaha yang dikelola oleh KKB-USU di antaranya adalah: Unit Usaha Asrama Mahasiswa, Unit Usaha Komputer dan Pendidikan Umum, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Jasa, dan Divisi Khusus Kolat Merpati Putih.

Unit usaha asrama Mahasiswa, dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air. Masing-masing calon penghuni disediakan fasilitas lemari, tempat tidur dan meja belajar. Penghuni tetap asrama mahasiswa USU ini adalah mahasiswa USU yang menjadi anggota KKB-USU. Sebagai unit usaha yang selain memikirkan dan melayani kesejahteraan anggota-anggotanya, maka unit usaha juga menawarkan fasilitas yang ada bagi tamu-tamu KKB-USU maupun tamu-tamu USU sendiri. Pada tahun 1988 unit usaha asrama mengadakan latihan bela diri tangan kosong yang diresmikan oleh Menpora Akbar Tanjung pada 15 Pebruari 1989.

Unit usaha komputer dan Pendidikan Umum, diresmikan Mendikbud Fuad Hasan pada tanggal 2 Nopember 1987. Bidang usaha ini mengingat kemajuan penggunaan komputer yang sangat pesat dewasa ini, sehingga KKB-USU juga tanggap dengan keperluan para anggotanya yang membutuhkan pelayanan peralatan komputer. Para mahasiswa yang akan menyiapkan skripsinya dapat menggunakan jasa komputer. Sementara bagi yang berniat untuk mendalami komputer dapat pula mengikuti pendidikan pada unit usaha ini. Manpower development atau pengembangan kualitas sumber daya manusia koperasi merupakan langkah yang sangat menentukan dan perlu dijelmakan di dalam satu sub sistem pendidikan yang terarah karena konteks ini sangat menentukan dalam pengembangan dan pembinaan koperasi itu sendiri. Untuk itu KKB-USU berusaha: mengadakan bimbingan dan penyuluhan yang kontinyu bagi calon dan anggota penuh; menyelenggarakan diskusi, seminar, lokakarya mengenai masalah koperasi; mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengadakan kursus/latihan bagi peningkatan keterampilan usaha, unit usaha komputer selain memberikan jasa pendidikan juga

menyewakan komputer untuk umum.

Unit usaha Simpan Pinjam dan komoditas, diresmikan oleh Menteri Koperasi Bustanil Arifin pada tanggal 29 Juli 1988, yang sekaligus juga diresmikannya unit usaha jasa. Pengelolaan unit usaha ini karena adakalanya kebutuhan terhadap dana yang tiba-tiba atau di luar perencanaan rutin terasa sangat sulit untuk mengatasinya. Sementara peminjaman uang melalui bank memerlukan waktu untuk pengurusannya. Mengingat hal tersebut KKB-USU membuka unit usaha simpan pinjam. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan suku bunga yang relatif rendah diharapkan anggota KKB-USU akan memberikan bunga yang baik kepada anggota yang menyimpan uangnya pada KKB-USU.

Unit Usaha Jasa, mengelola beberapa divisi diantaranya divisi kantin KKB-USU yang pengelolaannya dilakukan bekerja sama dengan pihak swasta sebagai pemasok modal.

Divisi khusus Kolat Merpati Putih KKB-USU, unit usaha ini sama sekali didirikan bukan bertujuan komersil, kecuali semata-mata bertujuan memberikan nilai tambah bagi para anggota melalui seni bela diri tangan kosong Merpati Putih.

Memang citra perkoperasian dewasa ini masih kurang mendapat perhatian di tengah-tengah masyarakat, disamping mengidentifikasi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat kecil di pedesaan dan tidak menjangkau lapisan masyarakat menengah ke atas. Unit menghilangkan image inilah merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya KKB-USU yaitu mengingat perlunya ditingkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat untuk berkoperasi melalui jalur pendidikan. Dengan kehadiran KKB-USU sekaligus merupakan upaya untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam hal memasyarakatkan koperasi.

Sehubungan keberadaan KKB-USU di kalangan kaum intelektual, yang terlihat secara langsung dengan tenaga kerja dan mahasiswa, maka KKB-USU dituntut untuk lebih berani memasyarakat. Sehingga dengan misinya, KKB-USU sering menyelenggarakan kegiatan yang ada kaitannya dengan upaya memasyarakatkan koperasi.

Pada tanggal 15 Februari 1989 Menpora Akbar Tanjung membuka Diklat Perkoperasian yang diselenggarakan KKB-USU sekaligus peresmian Gedung Serba Guna KKB-USU. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ini diikuti peserta utusan Koperasi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara dan Aceh. Dari penyelenggaraan Diklat tersebut tampak minat yang semakin besar di kalangan pemuda dan mahasiswa untuk lebih mengetahui dan memahami koperasi. Keadaan ini terlihat dengan banyaknya tambahan peserta, yang semula hanya 46 orang tetapi kemudian menjadi 55 orang terdiri dari KKB-UBH (Universitas Bung Hatta) Padang (Sumatera Barat). Hasil yang dicapai dari penyelenggaraan Diklat yaitu terkrystalisasinya, misalnya untuk menjadikan koperasi sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi masing-masing. Hal ini didukung karena mahasiswa merupakan asset yang sangat berharga bagi pengembangan koperasi.

Dalam pengembangan usaha KKB-USU dilakukan dengan mempergunakan prinsip kemampuan, tekad, dan peluang (KTP). Dengan prinsip ini berarti bahwa seluruh anggota diberikan kesempatan untuk mengembangkan KKB-USU yaitu dengan kemampuan yang dimilikinya (termasuk misalnya menyumbangkan ide-ide/buah pikiran) dan pelaksanaannya akan ditangani kemudian oleh pengurus. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya berpikir kritis anggotanya dalam upaya pengembangan koperasi, dimana hal itu berarti memberikan sumbangan yang besar pengaruhnya tidak saja bagi KKB-USU, akan tetapi juga terhadap pengembangan koperasi secara umum. Dalam upayanya ini KKB-USU mempunyai slogan "Tiada hari tanpa prestasi, tiada hari tanpa koperasi".

Adapun aktivitas yang dilaksanakan KKB-USU berpegang pada pasal Anggaran Dasar yaitu: mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur; memberikan pinjaman kepada anggota untuk keperluan yang bermanfaat; menyediakan dan mengusahakan barang-barang kebutuhan pokok anggota sehari-hari; mengadakan usaha-usaha industri (percetakan) buku-buku pelajaran keperluan anggota dan masyarakat; membuka perdagangan ekspor impor serta

perdagangan interinsuler, buku dan alat-alat keperluan mahasiswa/ anggota lain, lain-lain usaha yang bermanfaat bagi anggota selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Koperasi serta peraturan-peraturan lain yang berlaku pada koperasi; menambah pengetahuan anggota tentang koperasi.

Adapun yang dapat diterima menjadi anggota KKB-USU adalah warga negara RI yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindak hukum dan tidak berada dalam perwakilan; bertempat tinggal di Kotamadya Medan dan sekitarnya; bermatapencaharian/pekerjaan sebagai mahasiswa, staf dosen dan karyawan USU; menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 Anggaran Dasar KKB-USU mengisi formulir pendaftaran anggota dan melunasi Simpanan Pokok sebesar Rp. 2.000,- untuk satu kali pembayaran, serta melunasi Simpanan Sukarela sebesar Rp. 500,- perbulan; menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Keuntung-keuntungan yang dapat diperoleh setiap anggota KKB-USU adalah: dapat memanfaatkan semua jenis unit usaha yang ada; dapat memperoleh discount yang mungkin disediakan bagi setiap unit usaha yang ada; mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan persen simpanan anggota; berhak ikut menentukan arah dan garis kebijaksanaan KKB-USU; dapat menambah pengetahuan tentang perkoperasian. Dalam menjalankan mekanismenya, perangkat organisasi KKB-USU terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Badan Pemeriksa.

Rapat Anggota Tahunan merupakan institusi pengambilan keputusan tertinggi bagi gerakan koperasi dimana pada forum ini pengurus yang mendapatkan kepercayaan harus mempertanggungjawabkan segala kerja yang telah dilakukan selama setahun sebelumnya, serta bersama anggota menyiapkan rencana program kerja untuk satu tahun berikutnya. Pada kesempatan ini, Badan Pemeriksa berkewajiban menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas segala aktivitas pengurus koperasi yang akan menjadi pegangan penilaian bagi para anggota koperasi. Dengan demikian

forum Rapat Anggota Tahunan adalah sangat penting artinya bagi kelangsungan mekanisme organisasi koperasi begitu juga halnya dengan KKB-USU.

Adapun ciri-ciri demokrasi ekonomi adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dalam kaitan ini dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional harus berperan secara positif. Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian pasal 33 ayat 3 menyatakan pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Rapat Anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi, dan ayat 5 menyatakan pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan menurut ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar

Dalam Anggaran Dasar KKB-USU bab XIII pasal 27 ayat 3 menyatakan, Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pasal 31 ayat 2 menyatakan, acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain: pembukuan, pembacaan dan pengesahan berita acara rapat anggota yang lampau, pelaporan oleh pengurus tentang koperasi dan perusahaannya dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta surat bukti yang perlu, pembacaan laporan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa, pengesahan rencana pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan anggaran belanja untuk tahun buku yang berjalan, penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan, pemilihan anggota pengurus dan anggota Badan Pemeriksa, tanya jawab/usul-usul, dan penutup.

Pada setiap organisasi diperlukan suatu tujuan yang jelas, dengan demikian setiap bentuk aktivitas yang dilaksanakan akan mengacu serta mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Koperasi sebagai suatu bentuk organisasi dimana KKB-USU juga tidak luput dari paradigma tersebut. Guna pencapaian tujuan organisasi, maka dibuatlah suatu

rencana program kerja. Program kerja yang dihasilkan merupakan titik tolak dari mana bangun usaha yang akan dimulai dan ke arah mana bangun usaha tersebut dikembangkan. Sehubungan dengan itu, tujuan pendidikan KKB-USU adalah terutama sebagai wadah yang akan mengelola asrama mahasiswa yang akan didirikan di kampus USU sebagai realisasi Keppres No. 40 tahun 1981, maka tujuan tersebut telah tercapai. Berdasarkan keberhasilan tersebut maka kepengurusan KKB-USU dalam masa bakti tahun 1987-1990 lebih memperluas sasaran yang akan dicapai dengan maksud keberadaan KKB-USU agar benar-benar dirasakan manfaatnya.

Pada awal berdirinya KKB-USU berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengurusnya terutama terhadap citra perkoperasian yang belum menggembirakan di daerah ini. Sementara tidak dapat dibantah bahwa KKB-USU adalah sebagai bagian dari gerakan koperasi di Sumatera Utara yang dalam melakukan aktivitasnya harus senantiasa berorientasi pada keadaan lingkungan daerah ini. Bahkan dalam sejarah perkoperasian sendiri di Indonesia harus kita akui bahwa potensi dan peran serta gerakan koperasi dalam membangun perekonomian Indonesia belumlah sebagaimana yang diharapkan oleh UUD 1945. Adapun citra perkoperasian terutama pada kalangan masyarakat menengah ke atas dan masyarakat perkotaan masih sangat memprihatinkan. Koperasi dinilai tidak lebih hanya merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil dipedesaan yang bukan merupakan konsumsi masyarakat perkotaan. Sangat diakui bahwa potensi ekonomi Indonesia berada di pedesaan, namun kota adalah merupakan pusat perekonomian. Sehingga apabila kita ingin menguasai pusat perekonomian tersebut, maka gerakan koperasi harus mampu menguasai perkotaan yaitu sebagai muara dari sirkulasi perekonomian Indonesia. Dalam konteks inilah perlunya memasyarakatkan koperasi pada masyarakat perkotaan. Padahal untuk memasyarakatkan koperasi pada masyarakat perkotaan bukanlah hal yang mudah. Citra terhadap perkoperasian yang belum begitu menguntungkan adalah merupakan kendala. Sehingga untuk mengkoperasikan masyarakat perkotaan benar-

benar diperlukan konsep tertentu.

Dengan lahirnya Kopindo sebagai kelanjutan pertumbuhan koperasi-koperasi kampus adalah merupakan langkah strategis bagi dunia perkoperasian. Sehingga melalui koperasi yang tumbuh di kampus-kampus tersebutlah diharapkan citra perkoperasian dapat lebih diperbaiki. Apabila masyarakat kampus yang dihuni oleh kaum intelektual sudah mau menerima koperasi sebagai bangun usahanya, maka situasi itu diharapkan akan mengimbas kepada masyarakat lingkungan sekitarnya. Sementara mahasiswa sebagai sasaran gerakan koperasi adalah merupakan asset yang strategis bagi gerakan koperasi tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KKB-USU berusaha semaksimal mungkin untuk merubah pola pikir masyarakat perkotaan, khususnya masyarakat kampus yaitu dengan melalui konsep-konsep programnya. Dengan kehadiran KKB-USU di tengah-tengah sivitas akademika USU telah berhasil mengangkat citra perkoperasian di kalangan masyarakat kampus. Hal ini misalnya dibuktikan dengan kedatangan para menteri untuk meresmikan unit-unit usaha KKB-USU, sehingga telah merubah image masyarakat kampus dimana koperasi bukanlah semata-mata hanya merupakan lembaga ekonomi masyarakat pedesaan. Kemudian seminar nasional perkoperasian serta Diklat Perkoperasian Pemuda Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan Aceh yang dilaksanakan oleh KKB-USU telah menunjukkan bahwa potensi kampus bisa melaksanakan kerja-kerja konsepsional dan strategis bagi perkembangan dunia perkoperasian. Bukti lain yaitu semakin bertambahnya jumlah anggota KKB-USU dalam waktu relatif singkat dari 41 orang dan selama dua tahun menjadi 801 orang.

Terhadap unit usaha KKB-USU terutama Unit Asrama Mahasiswa, ternyata punya kendala dalam pengelolannya. Sampai tahun 1989 misalnya mereka yang menjadi penghuni asrama baru mencapai sekitar 20% dari kapasitas maksimal. Menghadapi kenyataan tersebut, maka KKB-USU mengambil kebijaksanaan yaitu asrama mahasiswa juga disewakan kepada pemakai yang bersifat tidak permanen seperti kepada

rombongan studi tour, perorangan, peserta pendidikan seperti seminar dan lokakarya, dan sebagainya. Sehingga secara keseluruhan kondisi tentang unit usaha ini baru sampai pada tahap mampu membiayai diri sendiri, dan belum memberikan SHU (sisa hasil usaha) disebabkan feasibility studi yang dicanangkan ketika asrama ini didirikan ternyata kurang feasible.

Sementara Unit Usaha Simpan Pinjam yang didirikan berdasarkan pemikiran strategis dalam upaya merangkul sivitas akademika USU untuk menjadi anggota KKB-USU. Sebab disadari bahwa unit usaha ini akan mampu membantu kepentingan orang banyak, yang dalam hal ini yaitu para sivitas akademika USU. Sehingga melalui kerja sama dengan Bukopin, maka sampai tahun 1989 saja, Unit Usaha Simpan Pinjam KKB-USU ini telah menyalurkan dana sekitar Rp 500 juta. Dalam pengelolaan Unit Usaha ini dipasarkan dengan bunga yang cukup rendah yaitu 16,5% per tahun. Kehadiran unit usaha ini sangat dirasakan banyak membantu memenuhi kebutuhan anggota, sehingga unit usaha ini sudah berada pada posisi memberikan SHU.

Unit Usaha Simpan Pinjam ini paling banyak membantu anggota terutama dalam hal membantu para sivitas akademika USU terhadap kebutuhan uang. Sebab selain suku bunganya yang relatif rendah, prosedurnya tidak berbelit-belit. Sebagian besar para anggota yang memanfaatkan Unit Usaha Simpan Pinjam KKB-USU ini dengan besar pinjaman berkisar antara Rp 2 juta sampai Rp 4 juta. Setiap sivitas akademika USU yang akan meminjam uang prosedurnya adalah melalui Bendaharawan fakultas dan pemotongannya dari gaji setiap bulannya lewat Bendaharawan fakultas. Sehingga petugas dari KKB-USU sekitar tanggal 5 sampai tanggal 10 setiap bulannya hanya tinggal mendatangi bendaharawan fakultas yang ada anggota koperasi meminjam uang kepada KKB-USU. Sementara besarnya jumlah pinjaman yang bisa diperolehnya yaitu sebesar 40% dari gaji dikalikan 24 bulan (untuk masa pinjaman 2 tahun).

Semakin bertambahnya terus jumlah anggota KKB-USU pada umum-

nya adalah disebabkan semakin besarnya dan bertambahnya jumlah sivitas akademika USU yang meminjam uang kepada KKB-USU. Sebab apabila mereka meminjam uang kepada KKB-USU maka secara otomatis mereka akan terdaftar menjadi anggota KKB-USU. Dengan mereka akan terdaftar menjadi anggota KKB-USU. Dengan demikian terlihat motivasi keanggotaan dari KKB-USU terutama dari kalangan staf pengajar maupun tenaga administrasi USU lebih didasari karena keinginan untuk dapat meminjam uang kepada KKB-USU. Sementara untuk merekrut anggota dari kalangan mahasiswa terdapat kesulitan disebabkan kebutuhan mereka akan keberadaan koperasi dirasakan masih kecil atau tidak menyentuh keperluan dan kebutuhannya.

Dalam hal mahasiswa yang menjadi anggota KKB-USU sering terdapat kesulitan. Misalnya terdapat banyak mahasiswa yang menunggak pembayaran sewa asrama, menunggak pembayaran makan di kantin, dan juga menunggak pembayaran kembali akan pinjaman atas kredit yang diberikan disebabkan tidak kuatnya jaminan yang ada. Sebab dalam upaya untuk meringankan beban anggota mahasiswa untuk membayar SPP, maka sejak akhir tahun 1988, KKB-USU mencoba memberikan bantuan berupa pemberian kredit SPP bagi mahasiswa yang tidak mungkin berkesempatan untuk membayar SPP sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh USU, sebab jika mahasiswa terlambat membayar SPP dan melewati batas waktu yang telah ditentukan, mahasiswa akan dikenakan denda sebesar 25%. Guna meringankan beban mahasiswa tersebut, KKB-USU menyalurkan kredit tanpa bunga bagi mahasiswa yang mengembalikan kredit tersebut sebelum jangka waktu 1 bulan, akan tetapi apabila pengembaliannya lewat 1 bulan, maka mahasiswa dikenakan bunga ringan. Namun dalam kenyataannya banyak diantara mahasiswa yang tidak melunaskan pembayaran kredit tersebut. Sementara kredit pada anggota staf pengajar maupun staf administrasi belum pernah mengalami kesulitan, sebab pembayaran kembali kredit mereka langsung dipotong melalui pembayaran gaji setiap bulannya.

Permasalahan lain yang dihadapi KKB-USU adalah dalam hal ke-

pengurusannya. Masalah ini muncul oleh karena tidak dimungkinkannya para pengurus KKB-USU untuk meluangkan seluruh waktunya secara penuh untuk mengelola koperasi tersebut. Hal ini disebabkan para pengurus dari KKB-USU mempunyai kesibukan lain, dimana para pengurus juga adalah sebagai tenaga pengajar maupun tenaga administrasi di lingkungan USU, disamping mereka masih mempunyai kesibukan lain di luar tugas utamanya di USU. Sementara keadaan keuangan KKB-USU yang belum mampu memberikan imbalan yang layak atas jasa pengurusnya, sebab sampai tahun 1987 pengurus KKB-USU sama sekali tidak memperoleh honorarium. Barulah mulai tahun 1988, lima orang pengurus mendapat honorarium sebesar Rp 30.000,- perbulan sebagai uang transportasi.

BAB VI

PRANATA SOSIAL AGAMA

Dalam pranata sosial agama, sampel yang diambil adalah Yayasan Pendidikan Islam Indonesia (YPII) yang terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting, Padang Bulan Medan. Yayasan ini mulai didirikan pada tahun 1957 oleh seorang tokoh yang baru saja memeluk agama Islam yaitu Abdul Basir Sibarani (almarhum). Beliau berasal dari Tapanuli Utara. Pada saat ini yang menjabat sebagai ketua yayasan adalah puteranya sendiri yang bernama Haji Awaluddin Sibarani.

Yayasan Pendidikan Islam Indonesia ini, mengelola tiga macam kegiatan yaitu: panti asuhan, dakwah, pendidikan dan pengajaran (sekolah). Dalam prakteknya ketiga jenis kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, terutama antara pola pengasuhan anak-anak panti asuhan dengan sekolah.

6.1 Panti Asuhan

Pada saat ini, jumlah anak-anak sebagai penghuni panti asuhan terdapat sebanyak 57 orang. Para anak tersebut berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara, dan yang paling banyak berasal dari daerah:

Sidikalang Kabupaten Dairi, Tanjung Tiram Kabupaten Asahan, dan daerah Tapanuli Utara. Pada umumnya anak-anak yang menjadi penghuni panti asuhan karena dititipkan orang tuanya yang tidak sanggup membiayai pendidikan anak-anaknya, atau karena orang tuanya tidak sanggup mengurusnya disebabkan anak tersebut nakal, dengan menyerahkan anaknya ke panti asuhan para orang tua berharap semoga menjadi anak yang baik, berguna, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di kemudian hari.

Sebenarnya panti asuhan ini, dapat menampung lebih dari 57 orang, bahkan oleh ibu panti asuhan pernah mencoba menampung anak-anak sampai 80 orang. Tetapi ternyata hal ini membuat ibu pengurus panti asuhan sangat kewalahan dalam mengurus anak-anak sebanyak itu, apalagi mereka berasal dari berbagai daerah dengan beraneka ragam adat istiadat sehingga perhatian yang diberikan tidak sepenuhnya ditumpahkan untuk mengasuh dan mengurus anak-anak tersebut. Seperti diketahui bahwa anak-anak tersebut, juga terdiri dari berbagai tingkat usia yaitu: tingkat sekolah dasar, SLTP, SLTA, dan ada yang menjadi mahasiswa. Tidak sedikit anak-anak bekas panti asuhan ini yang berhasil dalam berbagai bidang baik yang memperoleh bidang pekerjaan pada instansi pemerintah, maupun swasta dan bahkan ada yang sampai menempuh program pendidikan S3 (Doktor).

Mereka yang bernasib di kemudian hari, ada yang tetap ingat kepada Yayasan Pendidikan Islam Indonesia yang pernah mengasuh dan mendidiknya, namun ada juga yang melupakannya sama sekali. Bagi panti asuhan sendiri, soal ingat atau tidaknya anak-anak yang pernah menjadi penghuni panti asuhan, hal itu tidaklah penting dan tidak pernah dipersoalkan. Sebab yang utama bagi panti asuhan adalah dapat memberikan perhatian dan mencurahkan segenap kemampuan untuk mendidik, membina, dan membimbing anak-anak tanpa pernah mengharapkan imbalan baik materil maupun moril. Apabila panti asuhan mampu melakukan yang terbaik maka batin para pengurus cukup merasa puas karena kepuasan batin inilah yang selalu menjadi tujuan. Para petugas

panti asuhan semua bekerja secara ikhlas, dengan mencurahkan tenaga serta buah pikirannya mengasuh anak-anak sebagai mana halnya mengasuh dan mendidik anak kandung sendiri tanpa membeda-bedakannya. Sehingga anak-anak panti asuhan, merasakan ibu panti asuhan sangat dekat dengan mereka seperti halnya orang tua kandung sendiri.

Pembiayaan panti asuhan ini lebih banyak berasal dari sumbangan masyarakat, sedangkan bantuan dari pihak Departemen Sosial hanya berupa bantuan sebesar Rp. 250,- per hari untuk setiap orang. Bantuan lain pemerintah adalah dari Departemen Agama dengan mendatangkan guru agama yang mengajar pada Sekolah Dasar Yayasan tersebut. Dengan bantuan biaya sebesar itu tidak mencukupi kebutuhan anak-anak panti asuhan, sehingga bantuan masyarakat sangat berperan. Pada umumnya, bantuan masyarakat adalah dalam bentuk material, artinya bukan dalam bentuk uang walaupun diantara masyarakat ada yang memberikan bantuan dalam bentuk uang. Jenis bantuan tersebut misalnya: bahan bangunan seperti semen, pasir, batu kerikil dan bahan bangunan lainnya; kemudian berupa: beras, lauk pauk, dan juga nasi bungkus terutama pada hari-hari besar agama Islam dan pada bulan puasa. Bantuan masyarakat dalam bentuk makanan yaitu dengan memberikan nasi bungkus, atau diundang makan oleh anggota masyarakat. Apabila ada anggota masyarakat yang ingin mengundang makan anak panti asuhan, biasanya terlebih dahulu memberitahukannya kepada pihak yayasan. Dengan demikian pihak yayasan dapat membuat jadwal, karena adakalanya masyarakat selalu saja ada sehingga untuk mengelola yayasan tidak mengalami kesulitan. Dalam hal ini pihak yayasan berprinsip, bahwa dengan niat yang baik dan tujuan yang ikhlas serta mulia, senantiasa tuhan akan melimpahkan rezekinya.

Secara umum tidak terdapat kesulitan yang terlalu berat dalam mengurus dan mendidik anak-anak yang masuk ke panti asuhan ini. Sebab, setelah anak-anak diberi motivasi dengan disiplin yang tinggi, akhirnya anak-anak tersebut menjadi baik dan sadar serta bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di panti asuhan. Namun, menghadapi

anak-anak panti asuhan yang beraneka ragam latar belakang adat istiadat maupun kehidupannya, kadang-kadang timbul juga kesulitan. Seperti diketahui bahwa anak-anak yang ada di panti asuhan ini berasal dari berbagai daerah, maka tingkah laku dan perangai anak-anak tersebut juga beraneka ragam. Menurut pengurus panti asuhan satu hal yang jelas sekali terlihat bahwa terdapat perbedaan sifat, tingkah laku maupun perangai anak-anak yang berasal dari daerah pegunungan dengan anak-anak yang berasal dari daerah pantai. Misalnya antara anak-anak yang berasal dari daerah Sidikalang dengan anak-anak yang berasal dari Tanjung Tiram. Menurut pengakuan pengurus panti asuhan, anak-anak dari daerah Asahan lebih nakal dan bandel jika dibandingkan dengan anak-anak dari daerah-daerah lainnya. Berdasarkan pengamatan, ini terutama disebabkan latar belakang lingkungan dan budaya daerah anak-anak tersebut. Anak-anak yang berasal dan datang dari Asahan pada umumnya sudah kenal akan uang, dalam pengertian bahwa di daerah asalnya mereka telah terbiasa mendapatkan uang dari hasil jerih payahnya, atau mudah memperoleh dan mengantongi uang. Sebab biasanya orang tua mereka tidak jarang memanfaatkan tenaga anak-anaknya untuk membantu orang tua baik ikut ke laut maupun untuk pekerjaan-pekerjaan lain di darat seperti menjemur ikan, membersihkan dan memperbaiki jaring yang rusak, ikut di Tangkahan Penangkapan Ikan (TPI) dan sebagainya. Memang bantuan tenaga anak-anak yang dimanfaatkan tersebut terutama disebabkan rendahnya penghasilan masyarakat setempat sebagai nelayan. Dan itu pulalah salah satu faktor penyebab anak-anak nelayan banyak putus sekolah (drop-out), atau bahkan orang tuanya menganggap bahwa sekolah itu kurang penting sebab menurut mereka seorang anak nelayan akan tetap menjadi nelayan. Misalnya karena mereka tidak sanggup untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Atau bahkan anak-anak tersebut memang tidak ingin bersekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh karena sejak kecil mereka sudah terbiasa mengantongi uang yang didapatkan dari hasil keringatnya sendiri.

Anak-anak yang dimasukkan ke panti asuhan dari daerah Asahan oleh orang tuanya, agar anaknya kelak tidak menjadi nelayan, disamping ada yang merupakan anak yatim, atau orang tuanya miskin. Dengan menitipkan anak-anak ke panti asuhan ini, mereka mengharapkan bahwa nantinya anak-anak tersebut dapat merubah pola hidup masyarakat daerah asalnya, tegasnya mereka berharap anaknya kelak tidak menjadi nelayan lagi seperti orang tuanya.

Latar belakang kehidupan anak-anak di daerah asal, sedikit banyaknya terbawa pula ke dalam lingkungan panti asuhan. Dalam arti kata sikap kebebasan mereka di daerah asal dan perhatian yang sangat kurang dari orang tua terutama dalam hal pendidikan dan pengajaran, atau kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak-anak tersebut sebelum menjadi penghuni panti asuhan. Sehingga hal tersebut masih terbawa pada tingkah laku anak-anak setiap harinya dalam lingkungan panti asuhan. Misalnya terlihat mereka kurang berdisiplin, tegasnya menghadapi anak-anak seperti ini lebih sulit untuk menanamkan disiplin karena mereka suka membantah. Namun, secara perlahan-lahan dan penuh dengan kesabaran akhirnya mereka juga dapat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di panti asuhan.

Berbeda dengan anak-anak yang berasal dari dataran tinggi misalnya Kabupaten Karo dan Dairi yang terdapat di panti asuhan ini, walaupun mereka juga ikut pernah memperoleh uang dari hasil keringatnya. Mereka semata-mata bekerja membantu orang tua, dan tidak pernah mengharapkan imbalan berupa uang. Sehingga cara berpikir mereka yang berasal dari daerah dataran tinggi masih murni, dalam arti anak-anak tersebut belumlah terpengaruh oleh nilai uang seperti halnya anak-anak yang berasal dari daerah pantai.

Terhadap anak-anak yatim, lain lagi masalahnya sebab terdapat semacam sifat pembawaan dari seorang anak yatim yaitu agak bandel. Dalam arti, apabila diberikan peringatan dan kata nasehat mereka berjanji akan mematuhi, tetapi dalam kenyataannya hal-hal yang sudah diperingatkan atau dilarang itu masih saja tetap dilakukan.

Seolah-olah ada sifat melawan dalam diri seorang anak yatim. Dalam hal ini sangat dibutuhkan perhatian secara sungguh-sungguh untuk mendidik mereka, apalagi berdasarkan ajaran agama bahwa anak-anak yatim ini adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara baik-baik.

6.2 Dakwah

Pengertian dakwah tidaklah semata-mata memberikan ceramah di depan umum atau di hadapan sekelompok orang-orang tertentu tentang sesuatu yang ingin disampaikan, terutama hal-hal yang berkenaan dengan ajaran agama tetapi dengan memberikan bantuan baik moril maupun materil terhadap sesama umat yang seagama, tindakan demikian juga adalah merupakan dakwah. Pengertian ini berkaitan erat dengan syariat ajaran agama bahwa semua orang Islam adalah mubaligh yaitu untuk menyampaikan ajaran-ajaran agamanya. Dengan menolong umat yang seagama juga merupakan dakwah, sehingga sebenarnya pengertian dakwah sangat luas sekali. Dengan demikian, tindakan dari dakwah itu tidak hanya ceramah untuk menyampaikan atau memberi penerangan tentang ajaran agama, tetapi juga membantu dalam bentuk materi.

Dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Indonesia ini tidak hanya dalam hal untuk memberikan ceramah agama, melainkan banyak membantu berbagai masalah yang dihadapi masyarakat yang beragama Islam dimana saja berada. Bahkan dakwah yang disampaikan ada kalanya tidak direncanakan sebelumnya yaitu menurut situasi dan keadaan yang dihadapi. Misalnya ketika pengurus yayasan bepergian ke suatu daerah baik atas undangan masyarakat Islam setempat maupun atas kemampuan sendiri (tanpa diundang), mereka singgah di sepanjang jalan baik ketika akan menuju daerah tujuan maupun sewaktu kembalinya. Tempat-tempat yang disinggahi bisa bermacam-macam, adakalanya masyarakat Islam yang mendermakan harta kekayaannya, pengusaha orang-orang Islam maupun mesjid-mesjid sepanjang perjalanan. Dalam hal ini pihak yayasan mengungkapkan kegiatan yayasan mengelola panti

asuhan, sehingga tidak jarang pula dalam perjalanan mereka mendapat bantuan dari masyarakat. Namun terkadang bantuan tersebut datangnya belakangan setelah beberapa lama mereka bertemu, atau bahkan sama sekali tidak pernah kunjung tiba sumbangan yang diharapkan. Namun Tuhan adalah Maha Besar dan Maha Penyayang, apabila sumbangan bantuan tidak mengalir dari seseorang yang diharapkan, ternyata Tuhan memberi rezeki dari yang lain. Tegasnya, yayasan dan para pengelolanya tidak pernah mengeluh apalagi berputus asa. Karena sikap berputus asa adalah sikap orang yang tidak beriman. Apabila manusia berusaha maka Tuhan akan selalu memberinya rezeki.

Sebaliknya bantuan yang diterima oleh yayasan ternyata datang dari orang-orang yang terkadang tidak pernah diketahui identitas dirinya. Mereka biasanya menyebut sumbangan tersebut berasal dari "hamba Allah", pada hal tidak jarang mereka yang menyumbangkan uang maupun hartanya adalah orang-orang kaya. Hal ini sejalan dengan sikap maupun sifat-sifat yang sederhana dari umat Islam karena yang diharapkan dan yang menjadi tujuan menyumbang atau bersedekah tersebut adalah pahala yang akan diterima kelak di akhirat. Dalam hal ini bukan duniawinya diharapkan, walaupun adakalanya hal itu perlu. Sebab dengan mencantumkan nama seseorang sebagai donator atau yang menyumbang untuk membangun ini dan itu, sebenarnya hal itu hanyalah duniawi. Padahal dibalik itu adalah pahala yang diharapkan, dan soal pahala bukanlah urusan dunia, akan tetapi pahala adalah urusan umat manusia dengan Tuhannya, yang hanya akan diketahui di hari akhirat kemudian setelah manusia meninggal dunia. Jadi sumbangan setiap umat Islam khususnya yang berkenaan dengan syariat agama Islam misalnya guna membangun atau mendirikan mesjid, membantu penyelenggaraan Pendidikan Islam, adalah pahala yang terus mengalir walau sekecil apapun sumbangan sedekah tersebut. Bahkan setelah orang yang memberikan sumbangan tersebut pun meninggal dunia, namun pahala baginya akan terus mengalir dan inilah yang dikejar oleh setiap umat Islam.

Apabila pihak Yayasan Pendidikan Islam Indonesia pada satu pihak menerima uluran tangan bantuan dari anggota masyarakat terutama untuk pembiayaan yang berkaitan dengan panti asuhan, akan tetapi pada lain pihak yayasan ini juga memberikan sumbangan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini berkenaan dengan misi Yayasan Pendidikan Islam Indonesia dalam hal dakwah. Yayasan ini juga membantu masyarakat Islam di berbagai daerah. Misalnya pihak pengurus yayasan apabila berkunjung ke berbagai daerah, tidak jarang pula yayasan membantu pembangunan mesjid-mesjid yang mereka jumpai. Demikian pula misalnya untuk membantu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Islam, dengan memberikan mencari bantuan guru ini semua juga adalah dakwah. Selanjutnya juga adalah dakwah dengan menampung anak-anak fakir miskin ke panti asuhan baik mereka yang ditemukan secara langsung di daerah-daerah maupun anak-anak yang datang secara pribadi untuk masuk ke panti asuhan.

6.3 Pendidikan dan Pengajaran

Sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Indonesia ini terdiri dari Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan madrasah. Sementara kurikulum yang dipakai di tingkat SD ini sebenarnya adalah kurikulum yang sifatnya umum sebagaimana kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah umum lainnya, kecuali di sekolah ini pendidikan dan pengajaran agama Islam lebih mendapat prioritas dalam membina dan mendidik anak-anak muridnya. Berarti kurikulum umum yang ada tetap merupakan kurikulum dasar tetapi lebih dikembangkan dengan mengacu kepada pendidikan Islam. Murid sekolah ini berjumlah 257 orang dengan guru-gurunya ada 8 orang (semuanya wanita). Tingkat pendidikan guru-gurunya antara lain KPG, SPG, SGO, PGA, dan juga dari IAIN.

Madrasah yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Indonesia ini sebenarnya adalah untuk memberikan pendidikan awal bagi pengajaran agama Islam, karena dirasakan pendidikan agama Islam yang diberikan

oleh seorang guru agama tidak mencukupi bahkan tidak memadai sama sekali, apalagi pendidikan yang diselenggarakan tidak terlepas dari misi yayasan yaitu pendidikan yang bernafaskan Islam. Sehingga madrasah yang ada ini adalah merupakan madrasah “diniyah-awaliyah” yaitu hanya sampai kelas IV. Dalam prakteknya murid-murid yang sudah duduk di kelas III Sekolah Dasar, maka mereka masuk ke madrasah pada kelas I.

Satu hal yang menjadi prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bagi yayasan ini adalah soal mutu pendidikan yang dipertahankan. Hal ini sangat dipentingkan terutama dalam menghadapi persaingan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dimana persaingan ini sekaligus adalah bisnis sehingga mutu pendidikan adalah mendapat prioritas yang utama. Soal mutu pendidikan ini memang mendapat pengakuan masyarakat sekitarnya, bahkan karena mutu pendidikan yang baik di sekolah ini terdapat anak-anak yang bersekolah yang bukan beragama Islam (10 orang). Walaupun orang tua murid-murid tersebut menyadari bahwa sekolah ini merupakan khusus lembaga pendidikan Islam, tetapi bagi mereka yang bukan Islam terpenting adalah untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik bagi anak-anaknya.

Disamping kurikulum umum yang dipakai, juga soal pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam dengan jelas dapat disaksikan, antara lain misalnya dengan penyelenggaraan pesantren kilat, pelajaran membaca Al Qur'an, dan sanksi kepada murid. Pesantren kilat dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan yang berlangsung antara tiga sampai lima hari. Seluruh murid kelas VI diwajibkan untuk mengikuti pesantren kilat ini, untuk murid kelas V juga diperbolehkan namun tidak diwajibkan.

Kegiatan pesantren kilat ini adalah untuk memberikan dan menanamkan motivasi kepada murid-murid yang mengikutinya, apalagi pesantren kilat ini terutama diikuti oleh murid yang duduk di kelas terakhir, maka dengan demikian perlu diberikan motivasi yang kuat tentang dasar-dasar Islam, disiplin, dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selama mengikuti pesantren kilat, murid-murid diwajibkan untuk membaca kitab suci Al Qur'an. Hal itu sangat diperhatikan bahkan sekaligus diajarkan harkat bacaan Al Qur'an yaitu tentang panjang pendeknya cara membaca ayat-ayat dalam Al Qur'an. Selama mengikuti pesantren ini murid-murid dibagi menjadi dua bagian yaitu kelompok yang bisa membaca Al Qur'an dan kelompok yang lainnya yaitu murid-murid yang tidak dapat membaca Al Qur'an dengan baik. Para murid yang mampu membaca Al Qur'an yaitu yang mengerti dan memahami panjang pendeknya bacaan, hanya lebih kurang sepertiga dari 30 orang jumlah murid kelas VI.

Bagi murid-murid yang mampu membaca kitab suci Al Qur'an selama mengikuti pesantren kilat lebih banyak waktunya dipergunakan untuk membaca Al Qur'an di bawah bimbingan guru dengan tujuan agar cara membacanya lebih fasih dan benar. Sementara bagi murid yang kurang mampu membaca Al Qur'an, karena kepada mereka hanya diwajibkan sekedarnya saja seperti membaca ayat *Qulhuwa llahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad* sebanyak 1000 kali selama mengikuti pesantren kilat. Adapun cara menghitung jumlah bacaan ayat tersebut, dengan mempergunakan biji-biji jagung atau batu-batu kecil sebagai ganti tasbih. Dalam hal ini penggunaan biji-biji jagung dianggap lebih efisien, karena dengan menggunakan tasbih kurang dapat terkontrol jumlah bacaan yang dilakukan para murid. Semua kegiatan pesantren kilat diselenggarakan di mesjid yang memang ada di kompleks yayasan ini. Untuk membaca ayat *Qulhuwa'llahu ahad* dilakukan setelah selesai sholat zuhur. Anak-anak membacanya sambil duduk-duduk atau berbaring dengan tumpukan biji-biji jagung atau batu-batu kecil di dekat mereka dan setiap satu bacaan, mereka mengambil satu butir biji jagung. Biasanya setelah mereka membaca 5 sampai 10 kali, mereka pun tertidur dengan biji-biji jagung dalam genggamannya. Dengan memberikan motivasi kepada mereka dan berdasarkan ajaran agama bahwa dengan membaca ayat tersebut mereka akan mendapat pahala, selalu harus jujur, dan anak-anak melaksanakan beban yang ditugaskan se-

nantiasa tanpa keluhan dan tanpa merasa terpaksa.

Sesuai dengan misi yayasan ini memberikan pendidikan dan pengajaran, tetapi sekaligus juga menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sebenarnya pendidikan agama pada tingkat Sekolah Dasar pada yayasan ini, dirasakan sangat minim sekali dan materi yang disampaikan adalah pengetahuan yang bersifat umum. Selain waktu untuk jam mata pelajaran agama sangat terbatas dan dalam kurikulumnya tidak terdapat materi untuk mengajarkan membaca Al Qur'an, maka pada tingkat Sekolah Dasar setiap hari jum'at kepada anak-anak diberikan pelajaran mengaji yaitu membaca Al Qur'an. Untuk itu yayasan sengaja mendatangkan guru untuk membaca Al Qur'an dari IAIN Sumatera Utara. Pelajaran ini mulai diberikan kepada para murid kelas IV. Diharapkan selama anak-anak mengikuti pendidikan di yayasan ini, paling tidak anak tersebut sudah pernah khatam (dapat menamatkan membaca kitab suci Al Qur'an). Pada setiap hari Jum'at semua murid berpakaian muslim, karena pada hari itu anak-anak belajar membaca Al Qur'an. Sedangkan pada hari lainnya para murid mengenakan pakaian seragam yang berlaku umum yaitu dengan baju warna putih dan rok atau celana warna merah.

Yayasan Pendidikan Islam Indonesia ini, menyelenggarakan pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Madrasah. Uang sekolah yang dikenakan kepada setiap murid relatif murah, yaitu Rp 4.000,- perbulan untuk Sekolah Dasar dan Madrasah, sedangkan bagi murid-murid Taman Kanak-kanak sebesar Rp 5000,- perbulan. Mengenai segi keterampilan yang diberikan kepada anak-anak murid oleh pihak yayasan terasa sangat kurang, untuk menutupi kekurangan itu ditempuh alternatif memberikan kualitas pendidikan yang baik sehingga pada tingkat Taman Kanak-Kanak sudah mampu mengenal huruf dan angka-angka serta mulai dapat membaca. Begitu pula pada tingkat sekolah Dasar para siswa telah memperoleh pelajaran mengaji yaitu membaca Al Qur'an. Masyarakat di sekitarnya telah mengakui tentang mutu Yayasan Pendidikan Islam Indonesia ini.

Tentang Madrasah yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Indonesia

ini adalah tingkat awal yaitu istilahnya Diniyah Awaliyah dengan masa pendidikan 4 tahun. Para muridnya mulai dari kelas 3 Sekolah Dasar masuk ke Madrasah sebagai kelas 1. Dengan demikian anak-anak akan sekaligus selesai pendidikannya yaitu tamat Sekolah Dasar juga tamat Madrasah. Hal ini berarti, disamping anak-anak mendapat pendidikan umum juga memperoleh bekal pengetahuan agama dan mengenal tulisan Arab-Melayu. Sehingga orang tua murid merasa puas dengan mutu pendidikan yang diperoleh anak-anaknya.

Mengenai motivasi yang ditanamkan kepada para murid selalu berorientasi kepada ajaran agama Islam yang kuat. Misalnya terhadap sanksi yang diberikan jika anak-anak melanggar peraturan atau membuat kesalahan akan diberikan sanksi untuk membaca ayat *Qul huwal'laahu* ahad sebanyak 5 sampai 10 kali. Apabila bacaannya terlalu pelan atau salah karena takut atau malu pada teman-teman yang lain, membacanya harus diulang sampai lancar dan jelas terdengar oleh murid-murid lainnya. Hal ini sekaligus membuat anak-anak cepat fasih dan hafal membaca ayat tersebut.

Disamping itu selalu diajarkan kepada murid-murid untuk memberi salam kepada orang lain, kepada guru, kepada tamu di sekolah maupun di rumah dan jika masuk atau datang ke kantor sekolah yaitu ucapan yang lazim dalam agama Islam yaitu *Assalamu'alaikum*, karena ucapan salam ini adalah ciri-ciri khas orang Islam. Misalnya terdapat seorang murid lupa atau karena terburu-buru sehingga tidak mengucapkan salam ketika masuk ke kantor guru maka murid tersebut akan disuruh keluar dan supaya masuk kembali dengan mengucapkan salam. Dengan cara demikian diharapkan anak-anak tersebut terbiasa bila memasuki ruangan atau rumah terlebih dahulu memberi salam kepada orang yang berada di dalamnya dan begitu juga apabila keluar rumah atau ruangan. Contoh lain dalam memotivasi murid-murid tersebut, misalnya ketika mengikuti sholat Jum'at, dimana sering terjadi anak-anak ribut dan tidak tertib dalam melaksanakan sholat. Untuk mengawasi anak-anak tersebut sengaja pihak yayasan menugaskan seorang guru untuk memperhatikan murid-

murid yang membuat keributan. Selesai sholat, mereka yang ribut pada saat sholat akan dipanggil menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah dan guru yang ditugasi mengawasi para murid tersebut akan memberikan nasehat, agar anak-anak harus sopan dan berbuat baik. Selain itu, diberi penjelasan bahwa dalam melaksanakan sholat harus tertib sesuai dengan ketentuan-ketentuan sholat. Apabila kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan sholat tentu Tuhan tidak mengabulkan permintaan setiap umatnya.

BAB VII

PRANATA SOSIAL POLITIK

Politik erat kaitannya dengan kekuasaan, dengan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu akan tetap diupayakan untuk mempertahankannya. Kekuasaan terdapat pada setiap lapisan masyarakat, mulai dari tingkat keluarga terkecil yakni keluarga inti (nuclear family), dan masyarakat yang lebih luas yakni dalam keluarga luas (extended family), serta dalam suatu pemerintahan. Dalam sebuah keluarga inti biasanya yang paling berperan adalah orangtua terutama ayah, sedangkan dalam masyarakat yang lebih luas seperti kepala suku, kepala desa, camat dan sebagainya. Kekuasaan tersebut mengatur status dan peranan masing-masing anggotanya. Pada tingkat keluarga, peranan atau kekuasaan seorang ayah atau orang tua tercermin dari kebiasaan, betapa besarnya kesalahan yang dibuat oleh mereka terhadap anak, tidak akan pernah terucapkan oleh orang tua pengakuan atas kesalahannya. Sebaliknya apabila anak yang bersalah, akan dimarahi dan diberikan hukuman dan nasehat. Situasi ini kadang-kadang terasakan tidak adil, anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus menerima apa yang dikatakan orang tuanya. Padahal dari keluarga seorang anak terbina dengan kesadaran akan tanggung jawab, status dan peranannya dalam lingkungannya. Kebiasaan seperti itu

merupakan tradisi orang Timur yang sulit untuk dihilangkan, yaitu sulit untuk mengakui kesalahan sendiri bagi orang memiliki kekuasaan. Secara umum begitulah politik, berlaku mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas.

Pendidikan politik perlu ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sebab apabila tidak ditanamkan akan berpengaruh secara luas terhadap diri seorang anak dalam pergaulannya di lingkungan masyarakat. Apabila setiap orang tua tetap mempertahankan status quo yang dimilikinya dalam keluarga, tentu dapat dibayangkan status quo yang dimilikinya di luar rumah dalam bagaimanapun diupayakan untuk mempertahankannya. Dalam hal ini berarti, tidak ada pembinaan kesadaran politik mulai dari tingkat keluarga sampai pada tingkat yang lebih luas dan tinggi.

Status quo seorang ayah terhadap anak-anaknya, tidak hanya di rumah tetapi juga sampai juga ke sekolah, bahkan setelah anak-anak tersebut menjadi mahasiswa sekalipun. Dalam arti kata, orang tua selalu memaksakan keinginannya terhadap anak-anaknya tanpa mau memahami kemampuan dan bakat maupun minat anaknya sendiri. Seorang anak pejabat atau anak orang kaya, akan selalu mendapat prioritas di hadapan para guru sekolah. Bahkan para orang tua akan mengurus anaknya yang tinggal kelas, atau setidak-tidaknya memindahkan anaknya ke sekolah lain agar bisa naik kelas.

Dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat sering terjadi keterlibatan orang tua dalam persoalan anak-anak maupun urusan-urusan isteri. Misalnya seperti perkelahian sesama anak-anak tetangga yang sedang bermain, orang tua akan ikut turun tangan membela anaknya sendiri dengan menyalahkan lawan anaknya tanpa terlebih dahulu menyelidiki sebab-sebab timbulnya perkelahian tersebut. Begitu pula apabila isterinya bertengkar dengan isteri tetangga atau dengan orang lain, maka selalu suami membela isteri sendiri. Bahkan sering terjadi, akibat persoalan anak-anak maupun akibat ulah isteri sendiri maka antara sesama suami ikut terlibat pertengkar dan perkelahian.

Situasi demikian sering terjadi sampai ke perguruan tinggi, dimana

seorang dosen menghubungi dosen mata kuliah tertentu pada fakultas dimana anaknya kuliah dengan tujuan agar anaknya dapat lulus. Dengan demikian bagaimana pun rendahnya nilai mahasiswa tersebut, karena ia anak dosen akan tetap lulus dan bahkan nilainya cukup baik. Sementara itu sering timbul tanda tanya di kalangan mahasiswa tentang nilai hasil evaluasi, khususnya nilai ujian akhir semester, tetapi sejauh itu mereka tidak pernah berani untuk memprotesnya sekalipun mereka tidak lulus misalnya, padahal menurut mereka soal-soal tersebut dapat dijawab dengan baik. Disamping itu sangat jarang dosen yang menjelaskan mengenai tata cara penilaian jawaban mahasiswa, bahkan lembar jawaban ujian tidak pernah dikembalikan kepada mahasiswa.

Organisasi kekuatan sosial di daerah penelitian ini masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Indonesia (PDI) setiap organisasi mempunyai satu komisariat. Berdasarkan Data Monografi Kecamatan Medan Baru tahun 1992 tercatat hasil pemungutan suara dalam Pemilu sebagai berikut: Pemilu tahun 1977, PPP memperoleh 11.625 suara (20,97%), Golkar memperoleh 40.352 suara (72,78%), PDI memperoleh 3.465 suara (6,25%); Pemilu tahun 1982, PPP memperoleh 20.268 suara (29,48%), Golkar memperoleh 42.459 suara (61,77%), PDI memperoleh 6.016 suara (8,75%); Pemilu tahun 1987, PPP memperoleh 13.935 suara (18,04%), Golkar memperoleh 48.682 suara (63,00%), PDI memperoleh 14.649 suara (18,96%).

Memperhatikan perolehan suara hasil Pemilu tampak menggambarkan adanya persaingan yang ketat antara sesama partai politik pada masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian yang terjadi. Turun naiknya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terutama disebabkan kemelut yang terjadi dalam tubuh partai tersebut, sehingga organisasi pendukung partai ini banyak berpaling memberikan suaranya kepada organisasi politik yang lain. Pada umumnya PPP didukung oleh organisasi-organisasi Islam.

Sementara perolehan suara PDI sangat banyak dipengaruhi oleh

penghormatan yang masih sangat besar dari masyarakat terhadap Soekarno. Kharismanya bahkan kelihatannya turun kepada putera-puterinya, sehingga sedikit saja putera puteri Soekarno berbicara hal itu sudah cukup untuk menarik massa terutama Guntur, dan begitu juga Sukmawati. Apalagi jika mereka ikut berkampanye dalam Pemilu, hal itu sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Situasi tersebut diperkuat lagi bahwa masyarakat Karo yang mayoritas di daerah Padang Bulan termasuk Kecamatan Medan Baru adalah merupakan pengagum sekaligus pendukung Soekarno semenjak lama.

Dengan memperhatikan perolehan suara hasil Pemilu tersebut seolah-olah akan dapat ditelusuri ke mana anggota-anggota masyarakat memberikan suaranya, dalam arti secara resmi dan konsekuen mereka menjadi anggota organisasi politik tersebut. Dari hasil pengamatan, ternyata tidak didapatkan data yang menunjukkan anggota-anggota yang menjadi anggota sesuatu organisasi politik. Walaupun menurut Data Monografi Kecamatan Medan Baru tahun 1992 masing-masing, PPP, Golkar dan PDI mempunyai Komisariat di Kecamatan ini, tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata tidak ditemukan komisariat dimaksudkan secara resmi dalam arti kata masing-masing komisariat punya kantor dengan papan nama. Menurut keterangan yang diperoleh bahwa nama-nama anggota organisasi politik hanya ada di kantor Pengurus Besar yaitu daerah Tingkat I.

Kampanye yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi politik selalu meriah dengan jumlah massa yang besar, menurut pengamatan sebagian besar pesertanya adalah massa, dalam arti tidak seluruhnya mereka yang ikut pada kampanye adalah benar-benar sebagai pendukung partai yang sedang kampanye. Sebab untuk meramaikan suasana kampanye adalah benar-benar sebagai pendukung partai yang sedang berkampanye organisasi-organisasi politik melibatkan berbagai kalangan masyarakat dimana untuk menarik massa tidak jarang organisasi-organisasi politik membagi-bagikan kaos secara gratis, bahkan ada yang memberikan uang ala kadarnya sebagai pembeli nasi bungkus sehingga

masyarakat tertarik terlepas dari pada ideologinya masing-masing. Maka bergabunglah berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari anak-anak muda yang tidak punya kegiatan sehari-harinya dan penarik beca, sopir-sopir mini bus, dan lain-lain. Jika organisasi politik yang lain berkampanye, mereka pun ikut lagi, dan begitu seterusnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penduduk tidak bersedia menyebutkan organisasi politik mana yang dipilihnya sewaktu Pemilu. Jawaban mereka, itu adalah rahasia, tidak perlu diperbincangkan lagi, dan hasilnya juga sudah diketahui bersama. Bagi masyarakat, sebagai rakyat kecil siapapun yang menang dan siapapun yang menjadi pemimpin, itu tidak menjadi soal, karena menurut mereka keadaannya akan sama saja tanpa mengalami perubahan. Yang terpenting bagi rakyat yaitu tetap memberikan suara, karena itu merupakan haknya, dan sebagai warga negara yang baik mereka tidak mau kehilangan hak pilihnya atau menyia-nyiakannya. Dalam hal ini ke mana mereka menjatuhkan pilihannya adalah kepada yang terbaik menurut persepsi masing-masing. Sementara mana yang terbaik, tentu tidak sama bagi setiap orang. Bahkan terkadang dalam satu keluarga antara suami, istri dan anak-anak saling tidak mengetahui organisasi politik mana yang telah dipilihnya.

Terhadap sikap maupun pandangan masyarakat yang demikian diberikan kepada organisasi-organisasi politik yang ada, menurut mereka bukan tidak beralasan. Menurut pandangan para tokoh masyarakat, sikap masyarakat demikian disebabkan tidak adanya pendekatan secara rutin dari organisasi-organisasi politik yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Organisasi-organisasi politik baru akan merangkul masyarakat jika ada kepentingannya saja misalnya pada saat menjelang Pemilu. Sementara selama rentang waktu kurang lebih 4 tahun, organisasi-organisasi politik tidak pernah berbuat apa-apa yang langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Organisasi-organisasi politik tersebut hanya mendekati diri kepada masyarakat pada saat-saat akan Pemilu, misalnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti bergotong royong membersihkan riol-riol saluran air, dan berkampanye dengan

mengumbar janji yang muluk-muluk. Namun, janji yang selalu diumbar-kan pada saat berkampanye tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat pada umumnya tetap patuh kepada atasan atau pimpinannya. Selama tokoh pimpinan yang menjadi pujaan masyarakat tetap berbuat baik, loyal, tidak bertindak amoral, selalu memperhatikan bawahan/rakyat kecil; tokoh tersebut akan tetap dihormati dan mendapat tempat di hati masyarakat. Tidak menjadi soal, apakah tokoh tersebut berasal dari kalangan bangsawan.

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian “Peranan Pendidikan dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional” ini maka pada bagian terakhir ini tim peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan maupun menyampaikan saran-saran.

Penggunaan bahasa Indonesia dominan dipergunakan pada lingkungan masyarakat baik dalam pergaulan sehari-hari, maupun dalam keluarga. Para orang tua tidak pernah mengajarkan bahasa ibunya kepada anak-anak walaupun kedua orang tuanya berasal dari kelompok etnis yang sama. Bahkan para orang tua lebih dominan mempergunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari di lingkungan keluarga. Hal itu mengakibatkan banyak di antara anak-anak yang tidak mampu atau tidak mengetahui bahasa daerahnya sendiri terutama mereka yang dilahirkan dan dibesarkan di kota Medan.

Dalam pergaulan sehari-hari, oleh karena wilayah Kecamatan Medan

Baru termasuk daerah Padang Bulan yang penduduknya mayoritas masyarakat Karo maka muncul bahasa pergaulan yaitu bahasa Karo, yang dipergunakan oleh anggota-anggota masyarakat dari kalangan bukan orang Karo. Bahasa pergaulan dalam bahasa Karo ini tidak hanya dijumpai pada pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat, tetapi sampai ke kantor-kantor resmi di wilayah Kecamatan Medan Baru dimana dominan terdapat orang-orang Karo. Para orang tua hanya berbahasa daerah apabila kedatangan sanak keluarga dari kampung ataupun ketika mereka pulang kampung.

Pakaian adat hanya dipergunakan pada saat upacara-upacara adat misalnya pada upacara perkawinan. Bahkan diantara beberapa kelompok etnis tidak memiliki pakaian dan kelengkapan kelompok etnisnya sendiri, sehingga apabila diselenggarakan upacara adat misalnya upacara mengawinkan salah seorang putera-puterinya, maka keluarga tersebut terpaksa menyewa pakaian adat. Dengan demikian dalam pertemuan-pertemuan keluarga, menghadiri pesta perkawinan atau pergi menghadiri undangan kenduri tetangga, anggota-anggota masyarakat hanya mengenakan pakaian biasa yaitu celana panjang dengan kemeja berlengan pendek maupun berlengan panjang terbuat dari kain biasa ataupun dari bahan batik.

Sifat individualisme sebagai salah satu ciri sosial masyarakat perkotaan semakin jelas mulai terlihat pada lingkungan masyarakat kota Medan. Keadaan ini dibuktikan dengan hilangnya sifat kegotongroyongan, dimana kegiatan-kegiatannya bagi kepentingan umum seperti membersihkan dan memperbaiki rumah-rumah ibadah, ronda malam bagi keamanan lingkungan, dan sebagainya. Kesadaran anggota masyarakat terhadap kehidupan sosial di sekitarnya sangat kurang sekali. Hal ini terlihat, apabila ada kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, sebagian masyarakat tidak pernah terlibat dan diganti dengan membayar sejumlah uang.

Interaksi sosial diantara anggota-anggota masyarakat berlangsung harmonis, intim dan akrab baik sesama kelompok etnis yang berbeda

sekalipun. Namun tumbuh semacam kecenderungan adanya stratifikasi sosial yang berdasarkan status sosial ekonomi. Artinya anggota-anggota masyarakat yang status sosial ekonominya sama, mereka akan lebih intim melampaui batas-batas kelompok etnis. Bahkan hal ini juga terjadi pada lingkungan kekeluargaan.

Tidak terjadi persaingan di antara kelompok-kelompok sosial yang ada maupun persaingan sesama kelompok etnis. Kelompok etnis di lingkungan tertentu menyesuaikan diri kepada kelompok mayoritas, sehingga tidak pernah terjadi konflik. Adapun persaingan yang tampak adalah berdasarkan kecakapan serta loyalitas seseorang baik untuk mendapatkan pekerjaan maupun untuk menduduki jabatan tertentu, dan sama sekali bukan berdasarkan sukuisme.

Pemilikan benda-benda kerajinan milik suku bangsa sendiri mulai berkurang, bahkan terdapat suku bangsa yang sama sekali tidak memiliki benda-benda kerajinan maupun kelengkapan pakaian adat suku bangsanya sendiri. Sebaliknya pemilikan benda-benda kerajinan suku-suku bangsa lain semakin meluas dimiliki oleh suku bangsa yang bukan pendukung budayanya.

Kurikulum Sekolah Dasar yang ada khususnya terhadap beberapa mata pelajaran tertentu tidak terkejar oleh kemampuan murid. Artinya beberapa materi pelajaran tidak diimbangi oleh mata pelajaran pendukung lainnya. Misalnya pelajaran matematika tidak didukung oleh hapalan perkalian. Sesuai dengan tingkat usia siswa-siswa SLTP dan SLTA maka pergaulan mereka semakin luas dan pola berfikirnya juga semakin kreatif dan kritis. Satu hal yang masih merupakan dilema dan yang terjadi di kalangan para orang tua murid bahwa adanya anggapan jurusan fisika dan biologi lebih tinggi dari jurusan ilmu-ilmu sosial, sehingga anak-anak mereka meskipun sebenarnya tidak mampu atau hanya pas-pasan kemampuannya dalam bidang ilmu fisika dan biologi tetapi dipaksakan untuk masuk ke jurusan tersebut.

Mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri yang melalui penyaringan UMPTN, lulus dan diterimanya mereka menjadi mahasiswa

belum merupakan jaminan keberhasilan mereka dalam studinya. Semakin terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk meraih tingkat pendidikan, ternyata hal itu bukan tidak menimbulkan masalah. Sebab keberhasilan pendidikan juga ditunjang oleh berbagai faktor lain termasuk misalnya kemampuan ekonomi.

Dihilangkannya “perpeloncoan”, “posma” telah turut menghilangkan suasana keakraban di antara sesama mahasiswa bahkan lebih jauh mahasiswa menjadi kurang etis baik terhadap sesama mahasiswa, bahkan terhadap dosen.

Citra perkoperasian yang kurang mendapat perhatian di tengah-tengah masyarakat, maka ditempuh usaha meningkatkan peran koperasi melalui jalur pendidikan. Koperasi Keluarga Besar Universitas Sumatera Utara (KKB-USU) beranggotakan tenaga pengajar, mahasiswa dan karyawan. Kemajuan yang pesat dicapai koperasi ini terutama dalam unit usaha simpan pinjam, sehingga tampaknya keinginan untuk menjadi anggota koperasi hanya untuk memudahkan mendapat kredit.

Nilai-nilai ajaran agama adalah sangat penting untuk ditanamkan ke dalam jiwa anak-anak semenjak dini. Metode pendidikan pengajaran agama dilakukan persuasif dan dengan memberikan motivasi yang jelas, di samping toleransi beragama.

8.2 Saran

Perlu meninjau kembali kurikulum tingkat Sekolah Dasar dengan materi pendukung mata pelajaran tertentu yang merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Para guru di tingkat SLTA hendaknya secara tegas menyeleksi murid-murid dalam pemilihan jurusan fisika dan biologi hanya untuk masuk ke fakultas-fakultas eksata dan tidak bisa mengambil fakultas-fakultas ilmu-ilmu sosial. Fakultas ilmu-ilmu sosial semata-mata diperuntukkan bagi siswa-siswa yang berasal dari jurusan ilmu-ilmu sosial.

Perlu meninjau kembali kemungkinan penyelenggaraan Pekan Orien-

tasi Mahasiswa terutama untuk memberikan bekal etika dan moral setelah mereka menjadi mahasiswa, sehingga jadilah mereka sebagai calon-calon intelektual yang bermoral tinggi dan punya etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, ed. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES. 1979.
- Alfian. *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press. 1986
- Bangun, Tridah. *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Idayu Press. 1986
- Bangun, Tridah. *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*. Jakarta: Kesaint Blanct. 1986.
- Bintarto, R. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Dove, Michael R, penyunting. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1985.
- Koentjaraningrat, ed. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1975.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat. 1980.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. 1985.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1989.

- George, Vig & Paul Wilding. *Idiologi dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Pustaka Utama grafiti. 1992.
- Sahur, Ahmad, dkk. *Migrasi, Kolonisasi, Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1988.
- Siahaan, N. *Sedjarah Kebudayaan Batak, Suatu Studi Tentang Suku Batak (Toba-Angkola-Mandailing-Simalungun-Pakpak Dairi-Karo)*. Medan: Napitupulu & Sons. 1964.
- Smelser, J. *Sosiologi Ekonomi*. (alih bahasa A. Hasymi Ali). Jakarta: Bahana Aksa. 1987.
- Siregar, Timbul. *Sendi Peradaban Tapanuli Selatan*. Medan: Pola Pengembangan Sejarah Kebudayaan Daerah Peningkatan Karya Seni Sumatera Utara, 1980.
- Tarigan, T.E. dan Emilkan Tambunan. *Struktur dan Organisasi Masyarakat Toba*. Ende-Flores: Nusa Indah. 1974.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ana Solmidas Jelpa, BA
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Jalan Sei Petani
no. 19 Medan.
Alamat : Jl. Sunggal/Jl. Kesatria No. 10/48 Medan.
2. Nama : T. Syahruwardi
Umur : 61 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Sipil ABRI (Kodam)
Alamat : Jl. Abdullah Lubis Gang. Mantri No. 21 Medan
3. Nama : Raja Nimbang Ginting
Umur : 67 tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Jl. Sei Kuala No. 20 Medan.
4. Nama : Rebin
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Penarik Becak Mesin
Alamat : Jl. Letjen Jamin Ginting Gang Senina Medan

5. Nama : Linder Ginting
Umur : 66 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri
Alamat : Jl. Universitas No. 22 Medan.

6. Nama : Nurmaini Pasaribu
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Guru SD Negeri Percobaan
Alamat : Jl. Sei Petani No. 19 Medan.

7. Nama : Harisah Usman
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Sei Petani No. 19 Medan.

8. Nama : Drs. Rusli Arus
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMP Kemala Bhayangkari I Medan
Alamat : Jl. Yos Sudarso Lk. 5 No. 1 Medan

9. Nama : Chalidin Ali
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Garuda Gang Amal No. 39 F Medan.

10. Nama : Agustiawan Ginting
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Letjen Jamin Ginting No. 129 Medan.

11. Nama : Lentius Silaen
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kompleks Veteran Blok C No. 55 Medan.
12. Nama : Drs. Denny Simamora
Umur : 27 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Durung No. 66 Medan.
13. Nama : Nurlela Hasibuan
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Islam Medan
Alamat : Jl. Kamboja 13/118 Blok IV Perumnas Helvetia Medan.
14. Nama : Drs. Muhammad Kamil, Z.
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMA Kemala Bhayangkari I Medan
Alamat : Jl. Pimpinan Gang Delima No. 7A Medan.
15. Nama : Endang Purwani, BA
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Guru SMA Kemala Bhayangkari I Medan
Alamat : Taman Setia Budi Indah Blok G/53 Medan.
16. Nama : Drs. Rajamin Lubis
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Guru SMA Bhayangkari I Medan
Alamat : Jl. Binjai KM 16,5 Lr. Mesjid No. 10 Medan.

17. Nama : Drs. Drajat Rangkuti
Umur : 33 tahun
Pekerjaan : Guru SMA Kemala Bhayangkari I Medan
Alamat : Jl. Penguin 3 No. 518 Blok 14 Perumnas Mandala
Medan.
18. Nama : Drs. Viktor Panjaitan
Umur : 33 tahun
Pekerjaan : Guru SMA Kemala Bhayangkari I Medan
Alamat : Jl. Perwira/Kesatria No. 5 Medan.
19. Nama : Syahrunnisa
Umur : 9 tahun
Pekerjaan : Murid SD
Alamat : Jl. Abdullah Lubis Gang Mantri No. 21 Medan.
20. Nama : Fitriany
Umur : 17 tahun
Pekerjaan : Siswa SMA
Alamat : Jl. Letjen Jamin Ginting Gang Senina Medan.
21. Nama : Fredy Indriawan
Umur : 14 tahun
Pekerjaan : Siswa SMP
Alamat : Jl. Letjen Jamin Ginting Gang Senina Medan
22. Nama : Ewi Pratama
Umur : 15 tahun
Pekerjaan : Siswa SMP
Alamat : Jl. Universitas No. 22 Medan.

23. Nama : Luwinita Asih Hasibuan
Umur : 17 tahun
Pekerjaan : Siswa SMA
Alamat : Jl. Pertiwi Baru Gang Mardi No. 3
24. Nama : Lukman Hakim Hasibuan
Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bersama Gang Nusa Indah 15 Medan
25. Nama : E l f i
Umur : 23 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Letjen Jamin Ginting Gang Keluarga No. 1 Medan.
26. Nama : H. Rusdi Hasibuan
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri (USU)
Alamat : Jl. Bersama Gang Nusa Indah 15 Medan.

Perpustakaan
Jenderal